

TUGAS AHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) DALAM MEMBENTUK
PERILAKU PRODUKTIF MASYARAKAT;
(di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)**



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik

Disusun Oleh :
Moh. Hakam Yamin
NIM: 015771971

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

ABSTRAK**Analisis Implementasi Kebijakan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
dalam Membentuk Perilaku Produktif Masyarakat;
(di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)**

Moh.Hakam Yamin
Universitas Terbuka
yamin.hakam@yahoo.co.id

Kata kunci : Implementasi Kebijakan PNPM, Perilaku Produktif.

Penelitian ini fokus pada kajian implementasi PNPM dalam penciptaan perilaku produktif masyarakat di wilayah Kecamatan Kayangan. Tujuan yang dirumuskan adalah memberikan deskripsi implementasi program PNPM dan menganalisis penciptaan perilaku produktif masyarakat penerima PNPM di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dukungan angket sebagai alat pengumpulan data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif, jadi sangat mengandalkan hasil wawancara dan isian, selanjutnya dilakukan analisis atas temuan tersebut.

Temuan dalam penelitian ini adalah program PNPM merupakan upaya pemerintah dalam memberdayakan potensi masyarakat yang dijalankan dengan proses kerja yang cukup panjang mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan program, pelestarian dan pemeliharaan hasil program dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari aparat Kecamatan Kayangan, aparat desa dan masyarakat serta personal khusus yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan.

Masyarakat sebagai pelaku dan pemeran utama program PNPM, mendapatkan porsi yang cukup luas untuk mengusulkan kegiatan yang dianggap sebagai permasalahan yang menghambat kegiatan produktifnya, melaksanakan aktualisasi dari usulan dan melestarikan hasil pelaksanaan program dengan dibantu oleh para fasilitator dalam mengidentifikasi potensi dan kelemahan yang ada di setiap desa.

Program PNPM yang masuk di Kecamatan Kayangan terdiri atas PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC). Seluruh usulan kegiatan difokuskan pada perbaikan pengadaan, perbaikan sarana prasarana, kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembuatan jalan, pembukaan jalan, pengerasan jalan, penaulutan, perpipaan, pembangunan gedung sekolah, pembangunan pasar, pemberian makanan tambahan, pemberian insentif kader pos yandu, dan guru – guru tidak, pelatihan kader. Total dana yang terserap untuk pembiayaan program PNPM tersebut, dalam kurun 2008-2011 Rp.9.400.058.500.

Program dan aktualisasi PNPM berjalan bersesuaian. Adapun implikasinya dalam membentuk perilaku produktif dapat dinyatakan telah terjadi, walaupun demikian diperlukan kerja lebih giat dari semua pelaku, pelaksana, untuk berupaya secara terus menerus mewujudkan kegiatan yang dapat memunculkan perilaku produktif masyarakat, serta sekaligus mempertahankan dan memelihara masyarakat yang telah memulai kegiatan produktifnya melalui pemanfaatan program PNPM.

Saran dalam penelitian ini adalah kerja program PNPM di Kecamatan Kayangan perlu ditindak lanjuti dengan memberikan bantuan pelatihan keterampilan untuk menambah semangat dalam melakukan kegiatan produktif. Pemberian pelatihan dapat dilakukan melalui kerjasama, dengan instansi terkait seperti dari BLK, LIPI dan lembaga lain yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRACT

**Analysis of the implementation of the policy
of National Community Empowerment Program (PNPM)
in shaping the behavior of Productive community;
(in district of North Lombok Regency Kayangan)**

**Moh.Hakam Yamin
Universitas Terbuka
yamin.hakam@yahoo.co.id**

Keywords: Policy Implementation PNPM, Productive Behavior

This research focused on the study of the implementation of the PNPM in the creation of productive communities in perlikau subdistrict in paradise. The goal formulated is to provide a description of the PNPM program implementation and analyse the creation of productive behavior the community sub-district PNPM desk Heaven North Lombok Regency.

This type of research is research that is used the dekriptif. The Data collected with interview techniques and support question form as a means of data collection. The approach used in this study with a qualitative approach, so rely heavily on the results of interviews and the stuffing, then carried out an analysis of the findings.

The findings in this study is a program PNPM is the Government's attempt in the empowering potential of the communities that run with a fairly lengthy work process starting from the planning stage of programs, program implementation, preservation and maintenance of program results by involving many parties, darin apparatus, Kecamatan in Paradise village and community agencies as well as special personal was commissioned to do the mentoring.

The community as the main actor and doers PNPM program, getting a large enough portion to propose activities that are considered as the problems that inhibit the activity of produktifnya, implement the actualization of dri and preserve the results of the implementation of the proposed programs assisted by the facilitators in identifying the potential and weaknesses that exist in every village.

The PNPM Program entry in the PNPM Mandiri Paradise made up of countryside and Healthy and intelligent generation of PNPM (GSC). All the proposed activities focused on perbaikan procurement, infrastructure improvements, the basic needs of the community, such as the creation of roads, the opening of the road, the hardening of the road, penaulutan, piping, construction of school buildings, the construction market, the granting of additional food, the granting of incentives heading yandu cadres, and teachers – teachers are not, training cadres. Total Fund that absorbed the PNPM program for financing, in the 2008-2011 Rp. 9.400.058.500.

Program and the actualization of the PNPM runs match. As for its implications in the form of productive behavior can be expressed has occurred,

although the more enterprising work required from all actors, executors, to strive to continuously realize activities that can bring up the behavior of the community, as well as productive while keeping and maintaining communities that have started produktifnya activities through the utilization of PNPM program.

The suggestions in this study is the PNPM program works in Heaven need to be followed up with ditndak to provide assistance to increase skills training in conducting productive spirit. Training delivery can be done through cooperation, with related institutions such as from BLK, LIPI and other institutions who have concern for community empowerment.

UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Pamulang Tangerang Selatan 15418
Telp.021 7415050, Fax 021 7415588

PERNYATAAN

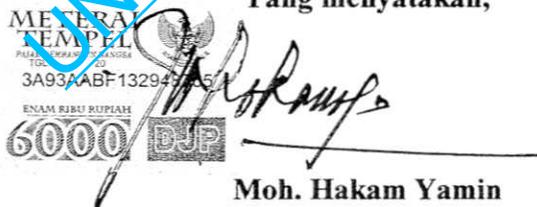
TAPM yang berjudul “ Analisis Implementasi Kebijakan Program Nasional -
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Membentuk Perilaku Produktif
Masyarakat; (di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)”

adalah hasil karya saya sendiri
dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat),
maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Mataram, 28 juli 2012

Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGALIAN
3A93AABF-13294735
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Moh. Hakam Yamin

NIM. 015771971

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Pamulang Tangerang Selatan 15418
Telp.021 7415050, Fax 021 7415588

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL TAPM : Analisis Implementasi Kebijakan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam
membentuk Perilaku Produktif Masyarakat;
(di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)

NIM : 0157711971

PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Ir. Manggaukang Raha, MM
NIP. 196112311986031172.

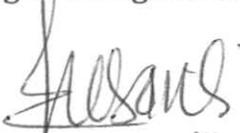
Pembimbing II



Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP.1952021319850320 01

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik,



Dra Susanti, M.Si
NIP.196712141993032003



Direktur Program Pascasarjana,



Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP.195202131985032001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Pamulang Tangerang Selatan 15418
Telp.021 7415050, Fax 021 7415588

PENGESAHAN

Nama : MOH. HAKAM YAMIN
NIM : 015771971
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) dalam membentuk Perilaku Produktif Masyarakat;
 (di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas- Terbuka pada :

Hari/tanggal : Jum'at/07 September 2012
Waktu : 13.00 – 15.00 wita.

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua Komisi Penguji : Suciati, M.Sc, Ph.D
 NIP. 19520213 198503 2 001

Penguji Ahli : Dr.Lieslyodono, B.I, M.Si.
 NIP: 196112311986011002

Pembimbing I : Dr. Ir. Manggaukang Raba, MM
 NIP.19611231 198603 1 172.

Pembimbing II : Suciati, M.Sc., Ph.D
 NIP. 19520213 198503 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Azzawajalla, atas Taofik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) dengan judul “ **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DALAM MEMBENTUK PERILAKU PRODUKTIF MASYARAKAT; (di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)**”. Penulisan TAPM ini adalah untuk memenuhi syarat akhir penyelesaian studi pada Program Magister Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Terbuka Mataram NTB.

Meskipun penulis telah berupaya optimal untuk mencurahkan kemampuan yang dimiliki, namun penulis menyadari bahwa, masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis membuka kesempatan dari semua pihak untuk memberikan kritikan, masukan atau saran yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa, Penulisan TAPM ini tidak akan berhasil tanpa mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai saat perkuliahan samapai dengan penyelesaian penulisan ini. Oleh karena itu melalui kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus - tulusnya kepada yang terhormat :

- (1) Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- (2) Kepala UPBJJ – UT Mataram selaku penyelenggara Program Pascasarjana;

- (3) Bapak Dr. Ir. Manggaukang Raba.,MM., selaku Pembimbing I, dan Ibu Suciati., M.Sc., Ph.D, selaku Pembimbing II yang dengan tulus ihlas dan dengan sabar membimbing dan mengarahkan, sehingga penulisan TAPM (tesis) ini dapat diselesaikan;
- (4) Kepala Bidang MAP Universitas Terbuka selaku Penanggung Jawab Program MAP atas bimbingan dan arahnya.
- (5) Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah di lingkungan Program Magister Administrasi Publik UPBJJ UT - Mataram yang telah memberikan tambahan ilmu pengetahuan.
- (6) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Utara beserta jajaranya, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kuliah di UPBJJ - UT Mataram.
- (6) Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara beserta jajaranya yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kuliah di UPBJJ - UT Mataram.
- (7) Bapak H.M.Syatral Yamin, Ibu Hj. Gandawati yang telah membesarkan, merawat dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.
- (8) Istriku tersayang Siti Rasmani, juga buah hati saya Sofia Cityani, Rahman Hakim, Hani Kamila Sukma, yang senantiasa dengan setia dan ikhlas mendukung dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.
- (9) Kakak – kakak saya H.Moh.Najamudin dan Hj.Handayani yang senantiasa memberikan dukungan dan do'anya.

- (10) Pimpinan dan jajaran staf di lingkungan kantor Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan Tulisan ini.
- (11) Pimpinan dan jajaran staf di lingkungan kantor PNPM kec. Kayangan Kab. Lombok Utara yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan Tulisan ini.
- (12) Pimpinan dan jajaran staf di lingkungan kantor Desa se-Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan Tulisan ini.
- (13) Teman – teman Guru dan staf Tata Usaha SMAN 1 Kayangan yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan studi ini.
- (14) Segenap pihak yang belum kami sebutkan, yang juga telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembaca dan semua pihak yang memiliki kepentingan. Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Mataram, 14 Pebruari 2012

Hormat Penulis

Moh.Hakam Yamin

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pernyataan	
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Istilah (<i>Glossary</i>)	xvii
Daftar lampiran	xx
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	10
1. Penelitian Terdahulu	10
2. Konsep Kebijakan Publik	14
3. Konsep Implementasi Kebijakan	17
4. Pengertian Kemiskinan.....	19
5. Negara Kesejahteraan Lawan Kemiskinan	25

6. Pembangunan dan sasaranya	27
7. Perilaku Produktif Masyarakat.	31
B. Kerangka Berpikir.....	33
C. Definisi Operasional	35

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Desan Penelitian	37
B. Sumber data dan Informasi	37
C. Instrumen Penelitian.....	38
D. Prosedur Pengumpulan Data	39
E. Metode Analisis Data	41

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Kayangan.	43
1. Batas Giografis Kecamatan Kayangan	43
2. Potensi Kecamatan.....	45
3. Demografi Kecamatan Kayangan	47
4. Sumber daya Penduduk Kecamatan Kayangan.....	48
B. Konsep Normatif PNPM di Kecamatan Kayangan.	55
1. Visi, Misi dan Tujuan PNPM.....	55
2. Kerja Normatif PNPM.....	56
C. Konsep Aktualisasi Kerja PNPM di Kecamatan Kayangan.	59
1. Proses Penentuan Kegiatan PNPM di Kecamatan Kayangan.....	59
2. Jenis kegiatan dan Aktualisasi Dana PNPM di Kec.Kayangan	62

3. Pelaku dan peranannya dalam program PNPM di kecamatan - Kayangan	67
4. Implementasi Program PNPM di Kecamatan Kayangan.....	77
a. Bentuk Implementasi Program PNPM di Kecamatan Kayangan.	77
b. Peranan Aparatur dan Masyarakat dalam Implementasi program PNPM di Kecamatan Kayangan.....	86
c. Implikasi Program PNPM dalam Menciptakan Perilaku produktif Masyarakat di Kecamatan Kayangan.....	90
D. Pembahasan.....	113
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah dan presentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB	-
Tahun 2000 - 2019	5
Tabel 3.1. Matrik Instrument Penelitian	38
Tabel 4.1. Luas Wilayah Kecamatan Kayangan dirinci menurut Desa	-
Tahun 2010.	44
Tabel 4.2. Pembagian Wilayah Administrasi Kec. Kayangan dirinci menurut - Desa Tahun 2010	45
Tabel 4.3 Luas wilayah Kecamatan . Kayangan Berdasarkan penggunaan - Tahun 2011	46
Tabel 4.4. Jumlah penduduk Kecamatan Kayangan menurut jenis kelamin - Dan Desa Tahun 2010.	48
Tabel 4.5. Jumlah penduduk Kecamatan Kayangan berdasarkan tingkat pendi- dikan.	49
Tabel 4.6. Jenis Kegiatan dan Jumlah Dana PNPM di Kec. Kayangan Tahun 2008	63
Tabel 4.7. Jenis Kegiatan dan Jumlah Dana PNPM di Kec. Kayangan Tahun 2009	65
Tabel 4.8. Jenis Kegiatan dan Jumlah Dana PNPM di Kec. Kayangan Tahun 2010	67
Tabel 4.9 Jenis Kegiatan dan Jumlah Dana PNPM di Kec. Kayangan Tahun 2011	68

Tabel 4.10. Jenis program PNPM di Kecamatan Kayangan, di masing – masing- Desa kurun waktu 2008 s/d 2011	78
Tabel 4.11. Responden Penerima Program PNPM di Desa Kayangan	91
Tabel 4.12. Responden Penerima Program PNPM di Desa Sesait	95
Tabel 4.13. Responden Penerima Program PNPM di Desa Pendua	98
Tabel 4.14. Responden Penerima Program PNPM di Desa Santong.	99
Tabel 4. 15. Responden Penerima Program PNPM di Desa Selengen	102
Tabel 4.16. Responden Penerima Program PNPM di Desa Salut	104
Tabel 4.17. Responden Penerima Program PNPM di Desa Banten Damae	107
Tabel 4.18. Responden Penerima Program PNPM di Desa Gumantar.....	109

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1. Empat Faktor yang berpengaruh Atas Implementasi Kebijakan Publik.....	- 19
Gambar 2.2. Lingkaran Setan Kemiskinan (<i>The Vicious Circle of Forverty</i>)	23
Gambar 2.3. Kerangka Berpikir Penelitian	34
Gambar 4.1. Peta Wilayah Kecamatan Kayangan.....	43
Gambar 4.3. Skema Kerja PNPM.....	58

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISTILAH (GLOSSARY)

IDT	Inpres Desa Tertinggal
BAPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
TAKESRA	Tabungan Kesejahteraan Rakyat.
KUKESRA	Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat
BKKBN	Badan Koordiansi Keluarga Berencana
P 4K	Program Peningkatan Pendapatan Petani
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
NTB	Nusa Tenggara Barat
DEPDAGRI	Departemen Dalam Negeri
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
BPS	Badan Pusat Statistik
KLU	Kabupaten Lombok Utara
P2KP	Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
GKM	Garis Kemiskinan
GKBM	Garis Kemiskinan Bukan makanan
BAPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
UUD'45	Undang Undang Dasar 1945
GBHN	Garis Besar Haluan Negara
GNP	Gross Nasional Product

APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
PMD	Pemerintah Masyarakat Desa
RI	Republik Indonesia
PNPM-MP	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Pedesaan
PNPM – GSC	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Generasi Sehat Cerdas
UPK	Unit Pelaksana Kegiatan
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MAD	Musyawaran Antar Desa
MUSDES	Musyawarah Desa
MCK	Mandi Cuci Kakus
SPP	Simpan Pinjam Perempuan
PD – BPR	Perusahaan Daerah – Badan Perkreditan Rakyat
LKP	Lumbung Kredit Pedesaan
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
TPK	Team Pengelola Kegiatan
TPU	Team Penulis Usulan
KPMD	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
SPC	Surat Penetapan Camat

PJOK	Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
TV	Tim Verifikasi
GSC	Generasi Sehat Cerdas
GTT	Guru Tidak Tetap
KB	Keluarga Berencana
IRT	Ibu Rumah Tangga
PMT	Pemberian Makanan Tambahan
KUK	Kredit Usaha Kecil

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Ijin Belajar dari Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara.**
2. **Ijin Penelitian dari Bapeda Kab. Lombok Utara.**
3. **Contoh Pedoman wawancara dan Angket**
4. **Matrik Wawancara dengan responden.**
5. **Gambar pelaksanaan PNPM di Kec. Kayangan.**

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bernegara senantiasa mempunyai cita-cita untuk menciptakan masyarakatnya yang sejahtera. Republik Indonesia sebagai salah satu Negara pun secara jelas mencantumkan cita - citanya dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, inilah yang menjadi titik tolak kesuksesan pemerintahan dalam kehidupan bernegara. Permasalahannya adalah bagaimana efektivitas dan keberpihakan negara terhadap masyarakat miskin (tidak sejahtera), sehingga masyarakat tersebut dapat mensejajarkan dirinya dengan masyarakat lain (masyarakat sejahtera). Maka peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin mutlak diperlukan, bukan dijadikan beban dalam menjalankan pembangunan ekonomi dan sosial (Yustika, 2005).

Pada masa pemerintahan orde baru, juga mempunyai perhatian yang tinggi dalam penciptaan kesejahteraan pada masyarakat. Riany dan Hak (2007) mengidentifikasi kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dari BAPPENAS, Program Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra) dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra) dari BKKBN, Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) dari Departemen Pertanian dan program pelatihan dan pengenalan teknologi tepat guna dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Seyogyanya, setiap era pemerintahan belajar dari pemerintahan terdahulu, sehingga setiap kebijakan dan program pengentasan kemiskinan tidak mulai dari awal, sementara batas pemerintahan hanya mempunyai kisaran satu sampai lima tahun. Ditegaskan demikian, karena setiap kebijakan perlu perencanaan, pengenalan atau sosialisasi pada masyarakat, pelaksanaan dan evaluasi, di mana seluruh proses tersebut membutuhkan waktu dan biaya.

Berpikir positif atas setiap era pemerintahan, termasuk era reformasi dipastikan telah melakukan penelaahan secara mendalam, maka dimunculkan program peningkatan masyarakat melalui konsep pemberdayaan yang dinamai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Munculnya program ini, disinyalir sebagai perbaikan konsep *top to down* yang diterapkan pada era orde baru menjadi konsep peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan konsep *bottom-up*.

Secara spesifik program PNPM bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja keluarga miskin secara mandiri, berarti ada kegiatan ekonomi produktif. Program PNPM dapat dinyatakan meliputi aspek yang luas, baik bantuan fisik (sarana prasarana pada daerah), pemberian pelatihan dan kegiatan lainnya yang dapat memunculkan hasil nyata berupa kegiatan ekonomi masyarakat terkait.

Program PNPM diselaraskan dengan desentralisasi, di mana informasi dan aspek pendukung lainnya muncul dari masyarakat ke pengambil keputusan (organisasi publik yang terlibat). Dukungan program ini sangat luas dari pemerintah, baik dari keuangan, bantuan bimbingan manajemen, bantuan pendampingan dan lainnya, sehingga dana yang digulirkan dapat dinyatakan cukup besar. Secara

nasional digulirkan sebesar Rp.200 trilyun atau 20 persen dari total APBN (PNPM NTB, www.antaramataram.com., Maret, 2011).

Kerja yang dijalankan dalam program PNPM adalah atas dasar pemberdayaan masyarakat, dalam makna berangkat dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat (DEPDAGRI RI, 2008). Konteks kerja ini oleh pemerintah pencetus PNPM dijadikan sebagai potensi yang berbeda dengan program pengentasan kemiskinan lainnya sebagai pemerkuat efektivitasnya.

Proses pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya adalah pemberian kewenangan dan kapasitas pada masyarakat (Soetomo, 2011). Adanya konteks ini, maka masyarakat miskin dalam program PNPM sebagai penentu kegiatan sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada. Pemberdayaan dimaknai juga sebagai kemampuan dalam mempengaruhi, sehingga ada konteks perilaku yang muncul dalam pemberdayaan tersebut. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku produktif, di mana ada pengetahuan, sikap dan perilaku untuk menciptakan atau mendapatkan kapastian aliran kas untuk keluarganya secara mandiri dan terus menerus, bukan dalam konteks belas kasihan (*charity*).

Khusus untuk Provinsi NTB yang telah mendapat predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan PNPM mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.132 milyar pada tahun 2009, meningkat menjadi Rp.246 milyar pada tahun 2010, dengan jumlah kecamatan penerima sebanyak 65 kecamatan. Dana tersebut dialokasikan untuk tiga program, yaitu PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM infrastruktur sosial ekonomi (PNPM NTB, www.antaramataram.com., Maret, 2011).

Kebijakan peningkatan kesejahteraan atau pengentasan kemiskinan melalui PNPM pada era reformasi telah mendapatkan perhatian yang tinggi.

Namun demikian, Fakta menunjukkan permasalahan kemiskinan masih membelenggu masyarakat pedesaan di Provinsi NTB. Hal ini disebabkan kemiskinan sebagai aspek yang kompleks, Prayitno dan Lincoln (1999), menyatakan :

1. Kemiskinan tersebut multi-dimensional, disebabkan karena kebutuhan manusia beraneka ragam. Implikasi dari kemiskinan dapat dilihat dari kekurangan gizi, air dan perumahan.
2. Aspek-aspek kemiskinan saling berkaitan, sehingga salah satu dari aspek mengalami kenaikan, maka aspek lainnya akan mengalami kenaikan pula dan sebaliknya.
3. Kemiskinan adalah untuk subyeknya (manusia), jadi bukan kota atau pedesaan atau wilayahnya.

Program pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat akan dapat berhasil, jika masyarakat tersebut telah memberdayakan kegiatan ekonomi produktifnya, jadi lebih dahulu pada perubahan atau penciptaan perilaku produktif. Konsep pembuatan perubahan ini telah diarahkan pada konsep pembangunan desa (masyarakat miskin) sejak lama, dapat dilihat dari pernyataan Suradji (1979), bahwa pembangunan masyarakat desa sebagai pusat kemiskinan hendaknya mengarah pada penciptaan perubahan, secara spesifik perubahan perilaku (perilaku dalam bertani yang baik dan lainnya).

Hal di atas perlu menjadi perhatian, karena fakta empiris kemiskinan di Provinsi NTB tergolong masih tinggi, berikut persentase penduduk miskinnya.

Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB Tahun 2000 - 2019

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN(JIWA)	PERSENTASE (%)
2000	1.070.430	28,13
2001	1.175.500	30,43
2002	1.145.081	27,75
2003	1.054.740	26,34
2004	1.031.605	25,26
2005	1.136.524	25,92
2006	1.156.144	27,17
2007	1.118.452	24,99
2008	1.080.613	23,81
2009	1.050.948	22,78
Rata-rata	1.102.004	26,26

Sumber: BPS NTB, 2010.

Penduduk miskin di NTB secara terus menerus mengalami penurunan meskipun tidak signifikan, kecuali tahun 2005 dan 2006 sebagai implikasi dari tingkat inflasi yang meningkat. Pada tahun 2009 persentase penduduk miskin sebesar 22,78 persen. Pengukuran tingkat kemiskinan ini masih dalam konteks kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (makan dan bukan makanan; termasuk di dalamnya kesehatan dan pendidikan).

Jumlah penduduk miskin akan mengalami perubahan yang signifikan jika terjadi perubahan harga (inflasi), berarti tingkat pendapatannya tidak sejalan dengan perubahan ekonomi regional ataupun nasional. Fakta dibuktikan pada tahun 2005 dan 2006, saat tingkat inflasi mengalami peningkatan pada kisaran 15,00 persen, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Hal tersebut disebabkan nilai pendapatan masyarakat secara nominal mengalami penurunan nilai riil, sementara peningkatannya dapat juga lebih rendah dari peningkatan inflasi. Dalam kondisi ekonomi regional dan nasional yang dicirikan dengan inflasi kondisi umum

yang terjadi adalah kesempatan kerja mengalami pengurangan, bahkan banyak perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja.

Kondisi Provinsi NTB secara umum tergambar lebih tinggi intensitas permasalahannya di Kabupaten Lombok Utara. Dinyatakan demikian, karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lombok Utara sebesar 59,30, lebih rendah dari rata-rata Provinsi NTB sebesar 63,70 (BPS NTB, 2010). Pengukuran IPM dilakukan pada tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan, jadi termasuk pada pengukuran kemiskinan makanan dan non makanan.

Fakta empiris kabupaten Lombok Utara sebagai bagian dari Provinsi NTB yang masih berkuat dalam menghadapi kemiskinan, maka berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan. Secara spesifik program yang dijalankan pada pemerintahan sekarang ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diharapkan mampu meletakkan pondasi yang kokoh bagi penciptaan perubahan perilaku masyarakat, sehingga akhirnya terbentuk masyarakat yang tanggap terhadap perubahan lingkungannya dan melakukan kegiatan – kegiatan yang bermanfaat, produktif untuk kelangsungan hidupnya.

Masyarakat Kabupaten Lombok Utama (KLU) umumnya bekerja pada sektor pertanian, dengan persentase sebesar 39,50 persen, baik sebagai petani pemilik, petani penggarap ataupun buruh tani (BPS KLU, 2010). Masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian, umumnya berpendidikan rendah, sehingga kemiskinan di KLU bersifat kompleks. Berjalannya waktu, luas lahan pertanian akan mengalami penyusutan akibat penggunaan untuk kepentingan lain, terlebih posisinya sebagai

kabupaten baru guna pembangunan sarana dan prasarana, akan menyebabkan terjadinya tuntutan pergeseran potensi pelaku ekonomi di KLU.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat diharapkan mempunyai program dan kebijakan mutakhir, bersifat spesifik di setiap daerah sesuai dengan prinsip kerjanya "*bottom-up*", sehingga akar permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan di setiap daerah dapat terpecahkan dengan baik, termasuk fakta yang ada di KLU. Dengan konsep pemikiran ini, maka penelitian fokus pada pengkajian konsep program dan kebijakan yang direncanakan dan implementasi faktualnya di KLU. Kajian selanjutnya adalah menemukan perubahan perilaku yang dihasilkan dari program PNPM sesuai dengan arah dari setiap pembangunan yang melakukan perbaikan, baik secara fisik dan non fisik.

Penciptaan perilaku produktif masyarakat penerima kebijakan PNPM sebagai perhatian dalam penelitian ini, karena akan secara otomatis dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dibandingkan dengan periode sebelum ada penerapan PNPM di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Sesuai dengan tujuan umum kebijakan PNPM untuk menciptakan kesempatan kerja atau mempunyai kegiatan ekonomi produktif, sehingga tidak teridentifikasi menjadi keluarga miskin.

B. Perumusan Masalah

Pokok perhatian atau tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana PNPM sebagai program pengentasan kemiskinan pada era reformasi, yang didukung dengan era otonomi daerah yang lebih dekat dengan akar permasalahan dalam setiap rumusan kebijakan pembangunannya. Kebijakan PNPM

sesuai dengan konsepnya *bottom-up*, maka seyogyanya setiap kecamatan mempunyai ciri khusus, sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada.

Kerja normatif dan aktual dari PNPM akan dijelaskan dan selanjutnya dilakukan kajian atas penciptaan perilaku produktif masyarakat penerimanya. Lebih jelasnya pokok permasalahan yang diajukan adalah :

1. Bagaimana implementasi program PNPM di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara?
2. Bagaimanakah upaya penciptaan perilaku produktif masyarakat penerima PNPM di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara?

Fokus penelitian adalah pada penciptaan perilaku produktif pada masyarakat penerima PNPM, karena dapat diduga bahwa kemiskinan disebabkan oleh tidak adanya pemberdayaan dan akibatnya tidak dapat memunculkan perilaku produktifnya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dirumuskan sesuai dengan permasalahan yang diajukan, adalah :

1. Mendeskripsikan implementasi program PNPM di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.
2. Menganalisis penciptaan perilaku produktif masyarakat penerima PNPM di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis untuk memperkaya khazanah terapan ilmu administrasi publik, dan untuk mengembangkan pengetahuan, perumusan kebijakan yang berorientasi masyarakat, terutama dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat.
2. Secara praktis dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pemerintah dalam menerapkan PNPM, di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara terutama dalam menganalisa potensi dan hambatan dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Secara akademis digunakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata dua pada Program Magister Bidang Administrasi di Universitas Terbuka.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu

Kusumo (2008) melakukan penelitian tentang penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Penelitian ini mempunyai fokus pada strategi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Alor yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Pengentasan Kemiskinan tingkat Kabupaten Alor. Permasalahan yang diajukan adalah implementasi pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Alor, tetapi fakta yang ditemukan kemiskinan di daerah tersebut tidak mengalami penurunan yang berarti.

Penelitian ini tidak merumuskan kesimpulan dari akar permasalahan yang diajukan, tetapi lebih pada menguraikan fakta kemiskinan secara normatif (kesulitan dalam akses pembiayaan dan permodalan) dan menerangkan kriteria kemiskinan di Kecamatan Mutiara. Telaah atas strategi dan program kerja untuk kemiskinan itu sendiri tidak tampak dalam kesimpulan yang dirumuskan.

Telaah yang dilakukan oleh Kusumo (2008) tidak menyentuh pada alternatif kebijakan dan program kerja yang harus diterapkan, sebagai hasil dari evaluasi atas kebijakan dan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Alor. Hal ini yang menjadi pemicu peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, walaupun pada obyek dan subyek kajian yang berbeda. Hasil yang diharapkan adalah telaah atas program dan kebijakan secara normatif dan implementasi. Perlu juga

ditegaskan, hal ini yang memberikan dasar pemikiran pada pembentukan perilaku produktif, karena kemiskinan sebagai suatu yang kompleks. Pada ukuran saat ini masih miskin, tetapi yang penting adalah kecenderungan adanya kegiatan ekonomi produktif sebagai perubahan perilaku yang memberikan kepastian perolehan pendapatan. Perolehan pendapatan tersebut akan dapat meningkat sejalan dengan kemampuan pembelajarannya atas pengelolaan kegiatan ekonomi produktifnya.

Gustina (2008) melakukan penelitian tentang penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Medan Maimun. Fokus tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi P2KP terhadap penurunan keluarga miskin. Perhatian juga diberikan pada faktor manfaat dan hambatan dari P2KP di Kecamatan Medan. Alat analisis yang digunakan adalah korelasi *product moment*. Simpulan yang diperoleh adalah tingkat efektivitas implementasi P2KP terhadap penurunan kemiskinan tergolong rendah, dilihat dari determinasinya hanya sebesar 4,0368 persen ($4,0368 \text{ persen} = 0,004038$, jadi kisarannya antara -1 sampai 1).

Rancangan penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, terutama pada desain analisis data, karena penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian kualitatif (*natural research*). Penelitian kualitatif akan dapat memberikan gambaran aktual atas dasar hasil observasi dan wawancara, sehingga dapat dilakukan deskripsi kondisi aktual dari program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, implementasi dan pembentukan perilaku produktif di daerah yang mendapatkan PNPM. Kondisi ini akan dapat terwujud tergantung pada kemampuan peneliti dalam menemukan dan menelaah fakta yang ada di lokasi penelitian.

Disamping dua penelitian di atas yang dilakukan pada era reformasi, perlu juga ditampilkan riset mengenai program pengentasan kemiskinan pada era orde baru. Rianny dan Hak (2007) melakukan penelitian tentang pengentasan kemiskinan lintas departemen. Simpulan dalam penelitian ini cukup banyak, terkait dengan ragam program pengentasan kemiskinan yang mendapatkan kajian. Khusus untuk program IDT mendapatkan simpulan kajian sebagai berikut :

- a. "Dalam program IDT dana yang diberikan pada masyarakat tersalur dengan baik dan digunakan untuk mendanai usaha masing-masing penerima dana IDT. Pokmas sebagai konsep program IDT terbentuk dan berjalan pada tahun awal, tetapi dengan tidak adanya kerja yang terus menerus dari pihak pemerintah menyebabkan para penerima kehilangan arah dalam mengelola Pokmas. Dana pinjaman setidaknya telah dikembalikan, walaupun hanya satu atau beberapa kali setoran sesuai dengan awiq-awiq Pokmas. Apabila kondisi ini berjalan dengan baik, maka dalam satu kali putaran penyetoran oleh penerima akan dapat terkumpul dana Rp.60.000.000.
- b. Kondisi di atas bukan merupakan hal yang mustahil, karena fakta yang ada masyarakat telah terbiasa menggunakan dana pinjaman perbankan untuk membiayai usahanya. Mengacu pada hasil yang dicapai di daerah lain, ada yang sampai pada tahap terbentuknya lumbung keuangan desa atau simpan pinjam di Karangawen Gunung Kidul".

Adanya perubahan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat diterima, karena teori mengenai kemiskinan juga telah menegaskan bahwa kemiskinan merupakan aspek yang kompleks. Kemiskinan tidak bersifat statis, bahkan kriterianya juga mengalami perubahan. Pada setiap daerah mempunyai permasalahan yang spesifik, sehingga perlu pengkajian secara spesifik.

Penelitian di atas senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mubyarto (2003) tentang penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Ditegaskan bahwa tidak seluruh kebijakan pemerintah periode sebelumnya (orde baru) buruk. Hal ini

dibuktikan pada daerah yang secara benar melakukan kegiatan IDT. Dibuktikan dengan hasil risetnya sebagai berikut :

”Dana hibah program IDT di Karangawen, Gunung Kidul, telah meningkatkan pendapatan penduduk miskin sebesar 97,00% selama 8 tahun (1994-2002). Meskipun dana IDT diberikan sebagai hibah pemerintah pusat kepada 123.000 pokmas di seluruh Indonesia, tetapi di Karangawen otomatis dijadikan model simpan pinjam yang kini telah berkembang 126,00%. Bukti dari lapangan ini menunjukkan bahwa rakyat/penduduk miskin tidak pernah memperlakukan dana IDT sebagai program belas kasihan (*charity*) tetapi benar-benar sebagai dana program pemberdayaan ekonomi rakyat yang mampu mengembangkan masyarakat desa yang mandiri dan percaya diri”

Dua penelitian di atas perlu ditampilkan, karena PNPM sebagai program pengentasan kemiskinan era reformasi mendedikasikan diri sebagai kerja yang berbeda dengan program lainnya, termasuk pada era pemerintahan sebelumnya. Fakta ditemukan bahwa program IDT juga mempunyai konsep kerja *bottom up*, terbukti dengan pembentukan kelompok dan usaha dari usulan masyarakat penerima dibantu oleh pemerintah.

Sekilas ditampilkan program IDT sebagai program pengentasan kemiskinan pada periode orde baru. Program IDT, mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a.”Mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan jumlah desa tertinggal.
- b. Mengkoordinasi berbagai program pengentasan yang telah ada yang sifatnya sektoral.
- c. Memperkuat mekanisme perencanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan.
- d. Mempercepat proses transformasi sosial ekonomi penduduk miskin ke arah yang lebih maju” (BAPPENAS, 1994).

Adapun sasaran kerja program IDT adalah :

- a.Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b.Pengembangan permodalan.
- c.Pengembangan peluang kerja dan berusaha.

d. Penguatan kelembagaan kelompok penduduk miskin.

Secara tegas pada salah satu dari pendekatannya dengan menggunakan partisipasi masyarakat, bahkan diungkapkan konsep desentralisasi, berikut uraian lebih jelasnya :

- a. "Keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas sektor dan lintas daerah dan meletakkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari proses pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.
- b. Kegotongroyongan, yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan, yang lebih kuat membantu lemah, sehingga menciptakan kesejahteraan yang merata.
- c. Keswadayaan, yaitu menitikberatkan pada usaha yang berdasarkan kemandirian.
- d. Partisipatif, yaitu melibatkan warga masyarakat, khususnya kelompok sasaran, dalam mengambil keputusan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasilnya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat sendiri.
- e. Terdesentralisasi, yaitu menurunkan wewenang pembuatan keputusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada aparat pemerintah yang terdekat dengan penduduk miskin" (BAPPENAS, 1994).

Penelitian yang akan dilakukan memberikan penjelasan normatif program dan kebijakan PNPM, implementasinya serta kemampuannya dalam menciptakan perilaku produktif. Hal ini dilakukan untuk memberikan makna yang luas dari suatu program pengentasan kemiskinan, karena pemecahan kemiskinan bukan sebagai kerja jangka pendek dan spradis, tetapi hasilnya dapat dikaji pada jangka waktu pendek dan panjang.

2. Konsep Kebijakan Publik

Pemerintahan pada suatu orde atau rezim dikenali dari kebijakan-kebijakan yang dapat menyentuh akar permasalahan yang dihadapi masyarakat atau konteks

jangka panjang dalam rangka mempersiapkan penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebijakan didefinisikan sebagai "serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulannya guna mencapai tujuan tertentu (Friedrick dalam Kismartini, dkk., 2010). Dalam definisi ini terlihat subyek yang dapat merumuskan kebijakan, aspek yang dijalankan dan implementasinya.

Anderson dalam Kismartini, dkk (2010) mendefinisikan kebijakan sebagai "serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah". Kebijakan akan lebih mengarahkan pada kerja dalam mewujudkan suatu tujuan tertentu.

Kebijakan dapat mempunyai beragam bentuk, karena organisasi profit oriented juga menerapkan kebijakan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, subyek dan permasalahan yang akan dipecahkan terkait dengan aspek yang berhubungan dengan masyarakat, maka dikenal sebagai ranah kebijakan publik (Kismartini, dkk., 2010). Kebijakan bukan hanya berhubungan dengan tindakan yang akan dilakukan, tetapi juga sebagai tidak melakukan suatu tindakan.

Kebijakan dihubungkan juga dengan program, terlihat pada definisi kebijakan publik yang diberikan oleh Edwards III dan Sharkansky dalam Kismartini, dkk (2010), yaitu "suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan". Kebijakan tidak dapat lepas dari pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan, dalam riset ini adalah pengentasan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan melalui perilaku produktif masyarakat.

Dalam rangka mempermudah kajian mengenai kebijakan publik, perlu diketahui model-model kebijakan publik. Henry dalam Kismartini, dkk (2010) memberikan identifikasi dan uraian sebagai berikut :

a. Model menurut hasil dan dampak :

- 1) Model rasional; kebijakan yang mengarah pada pilihan yang efisien dalam pencapaian tujuan. Relevansi data dan informasi menjadi kunci dari kerja perumusan kebijakan.
- 2) Model incremental; kebijakan yang lebih mengarah pada tawar menawar politis, sehingga pencapaian tujuan terkadang bias dan lebih pada dampak politis.
- 3) Model mix scanning; kebijakan yang dirancang dengan kombinasi dari model rasional dan incremental.
- 4) Model Carbage Can; penentuan tujuan yang sederhana, di mana aktualisasinya atas dasar alternatif-alternatif.
- 5) Model institusional; kebijakan yang tergantung pada struktur organisasi pemerintah.
- 6) Model elite-massa; kaitan dari masyarakat, pemerintah dan elite sebagai perumus kebijakan.
- 7) Model kelompok; kebijakan yang dirumuskan dari komponen kepentingan pada kelompok tertentu.

- 8) Model sistem-politik; pandangan bahwa kebijakan terdiri atas *input*, *withinput*, *output*, *feedback* dan *environmental*.
- b. Model proses; kajian atas kebijakan yang lebih mengedepankan proses pewujudannya. Para ahli mempunyai pandangan dan memberikan namanya, yang jelas hal ini dapat digambarkan kebijakan sebagai suatu aspek yang dimulai dari usulan sampai tahap akhir berupa pencapaian tujuan. Dapat ditampilkan model berikut :
- 1) Model Charles O. Jones; terdiri atas komponen pendefinisian (*definition*), pengumpulan (*agregation*), pengorganisasian (*organization*), mempengaruhi pembuat keputusan (*representation*), agenda pembuat keputusan (*agenda setting*), *formulation*, *legitimation*, *budgetting*, *implementation*, *evaluation* dan *termination*.
 - 2) Model Garry D Brewer; terdiri atas tahapan *initation*, *estimation*, *selection*, *implementation*, *evaluation* dan *termination*.

Uraian kebijakan publik, terkait model hanya memberikan gambaran bagaimana kebijakan publik dirumuskan. Aspek penting dalam penelitian ini adalah kerja yang diarahkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan yang dicanangkan dalam PNPM.

3. Konsep Implementasi Kebijakan

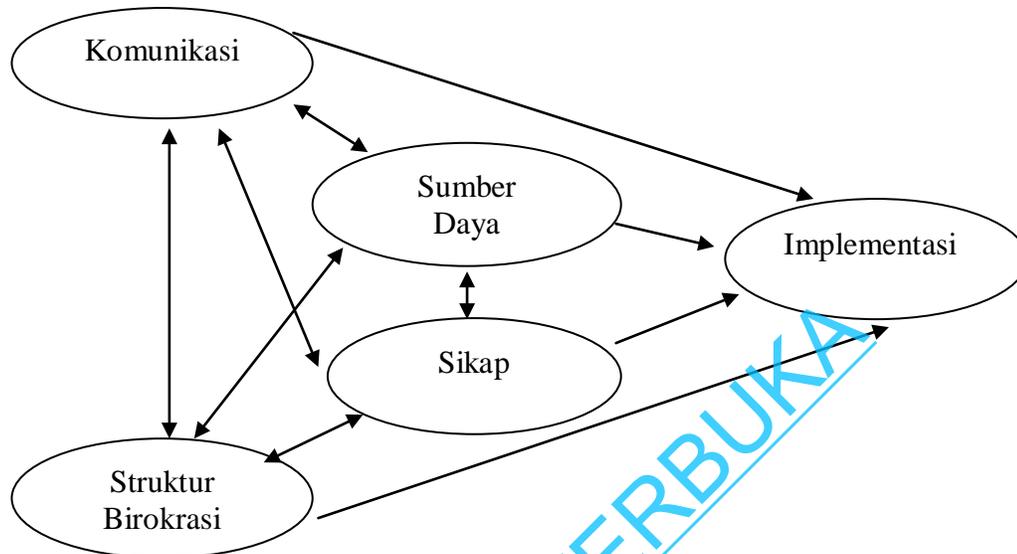
Konsep implementasi dalam sub pada prinsipnya adalah pelaksanaan dari kebijakan publik. Wahab (1997) memberikan arti implementasi dari sudut pandang bahasa sebagai menimbulkan dampak atau akibat sesuatu. Maknanya lebih

mengarah pada tindakan aktual yang tergambar hasilnya. Implementasi dapat juga dinyatakan sebagai tahap kerja memaknai kebijakan atau program dalam tindakan nyata. Misalnya kebijakan pengentasan kemiskinan PNPM, terdapat jelas rumusan kebijakannya, tetapi dapat saja mempunyai makna yang berbeda karena dilaksanakan dengan cara berbeda oleh pelaku kegiatan.

PNPM sebagai suatu hasil kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dengan cara pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu akan dapat berhasil dalam merealisasikan tujuannya, jika dilakukan dengan implementasi yang tepat. Konteks ini yang menyebabkan kajian ini memberikan penegasan mengenai implementasi kebijakan, dalam teori Edward III (1980) yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah "proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud".

Dalam implementasi suatu kebijakan terdapat empat komponen penting yang ada dalam teori Edward (1980), yaitu *komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi*. Empat faktor tersebut dalam mempengaruhi implementasi kebijakan publik saling berhubungan atau saling menentukan, sehingga satu sama lain dapat memperkuat dalam meningkatkan intensitas implementasi kebijakan publik. Keberadaan sumber daya dan pembentukan sikap dari subyek sasaran ataupun sikap dari pelaku aparatur negara perlu dikomunikasikan dalam makna persyaratan sikap yang dibutuhkan, termasuk juga persyaratan struktur birokrasi yang dibutuhkan untuk

mewujudkan implementasi kebijakan yang tepat. Konteks ini sesuai dengan gambar berikut.



Gambar 2. 1. Empat Faktor yang Berpengaruh atas Implementasi Kebijakan Publik
Sumber : Subarsono (2005 : 91)

Sumber daya yang diarahkan untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan harus bersesuaian, dalam makna tidak kekurangan dan berlebihan, di mana konsep efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya menjadi aspek yang utama. Dalam organisasi publik, di era otonomi daerah ini diharapkan struktur organisasi dapat bersifat memberikan dukungan atas implementasi kebijakan, bukan birokrasi yang rumit dan kompleks.

4. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan pada setiap negara, baik negara maju ataupun berkembang dipastikan, tetapi yang berbeda adalah kriteria dan jumlahnya. Kemiskinan juga dapat dinyatakan bukan sebagai suatu hal yang statis, tetapi terus bergerak sejalan dengan

perubahan intensitas kebutuhan untuk hidup layak. Pada regional yang sama, tetapi domisili yang berbeda, kota dan desa menghadapi permasalahan kemiskinan yang berbeda, bahkan indikator yang ditetapkan juga berbeda (BPS NTB, 2009).

BPS NTB (2009) mengeluarkan batas pengeluaran atau pendapatan minimal miskin untuk daerah perkotaan sebesar Rp.213.450 per orang per bulan dan daerah pedesaan sebesar Rp.164.526 per orang per bulan. Batas pengeluaran atau pendapatan tersebut dikenal dengan garis kemiskinan, diklasifikasikan lebih lanjut dengan golongan, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Pada setiap tahun akan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan harga di setiap wilayah.

Garis kemiskinan makanan dihitung dengan akumulasi kebutuhan per individu untuk dapat hidup layak dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar atau makanan (*basic needs*) yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per individu per hari, yang diwakili 52 jenis makanan dan minuman (umbi-umbian, padi-padian, sayuran, ikan, daging, telur dan lainnya). Adapun garis kemiskinan bukan makanan dihitung dengan kebutuhan hidup non makanan, berupa sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (BPS NTB, 2009). Perbedaan harga di perkotaan dan pedesaan yang menyebabkan nilai secara rupiah mengalami perbedaan, termasuk juga pada lintas regional di Indonesia.

Kemiskinan terkait dengan ketidakmampuan dari individu untuk hidup dengan layak dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, makanan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Garis batas kemiskinan makanan dan non makanan merupakan pendapatan atau pengeluaran yang dijadikan tolak ukur untuk menyatakan

individu miskin atau tidak, jika melebihi garis kemiskinan, maka kriteria miskin tidak diberikan atau keluarga tersebut tergolong hidup layak.

Berhubungan dengan kemiskinan, aspek yang menjadi permasalahannya adalah persentase jumlah pada suatu daerah, kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan (BPS NTB, 2009). Selama ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan (nasional ataupun regional) adalah memperkecil persentase jumlah kemiskinan. Aspek penting lain yang perlu diinformasikan adalah kesenjangan antara pendapatan atau pengeluaran dengan garis batas kemiskinan dikenal dengan kedalaman kemiskinan yang selanjutnya diukur dengan indeks kedalaman kemiskinan. Adapun sebaran pendapatan atau pengeluaran pada keluarga miskin itu sendiri dikenal dengan keparahan kemiskinan.

Kemiskinan dapat diidentifikasi dalam tiga aspek, sekaligus dapat dijadikan kajian faktor penyebabnya (Chalid, 2008) :

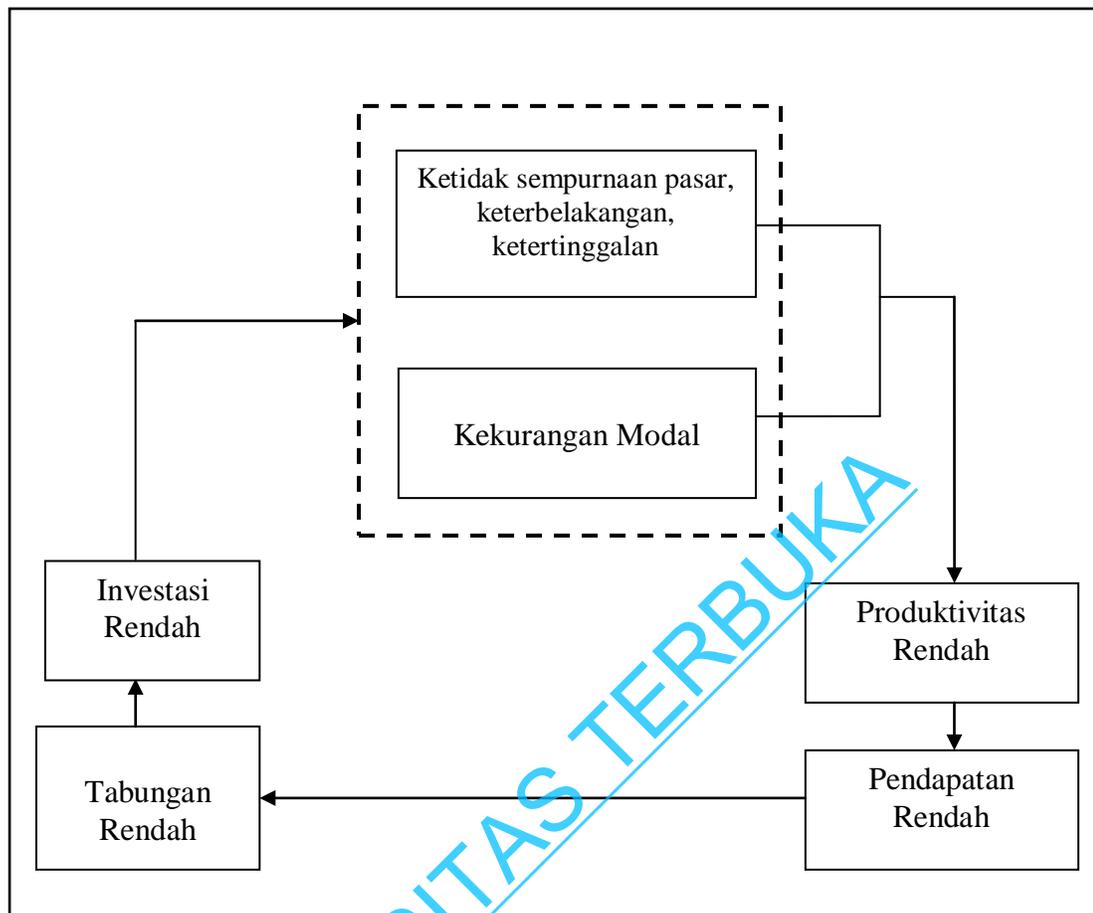
- a. Kemiskinan alamiah; kemiskinan yang timbul akibat sumber daya yang langka jumlahnya.
- b. Kemiskinan struktural; kemiskinan yang diderita karena struktur sosial, di mana masyarakat sulit menggunakan sumber daya yang ada.
- c. Kemiskinan kultural; kemiskinan sebagai implikasi budaya atau cara hidup yang menjadi tuntunannya.

Kemiskinan mudah untuk diidentifikasi, karena hanya cukup menghitung pendapatan per keluarga dan dilakukan perhitungan lebih lanjut dengan jumlah anggota keluarganya serta dibandingkan dengan garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Akan tetapi, jika membicarakan upaya pengentasannya, maka

akan muncul permasalahan yang kompleks. Fakta membuktikan, kemiskinan di Indonesia, spesifik di Provinsi NTB mengakar, sehingga menjadi pekerjaan berat pemerintah dalam mengatasinya.

Konsep kemiskinan dapat juga dirujuk dari indeks pembangunan manusia, karena yang dihitung adalah tiga kebutuhan dasar manusia (ekonomi, pendidikan dan kesehatan). Berdasarkan hasil perhitungan IPM per regional secara nasional, Kabupaten Lombok Utara berada pada peringkat 444 (BAPPEDA, 2007). Peringkat ini relatif tidak bergerak, bahkan karena indikator IPM tersebut saling berkaitan satu sama lain. Apabila ekonomi menurun, dipastikan kesehatan dan pendidikan menurun, sehingga pada gilirannya akan merosotkan kembali kondisi ekonominya atau dengan pernyataan lain kedalaman kemiskinannya akan semakin tinggi.

Chalid (2008) dalam menjelaskan kemiskinan sebagai sebab dan akibat, yang diistilahkan sebagai *the vicious circle of poverty*. Dalam konsep ini kemiskinan dipandang sebagai implikasi dari rendahnya kepemilikan faktor produksi dan kesempatan, sebagai akibat dari struktur ekonomi yang didesain oleh penguasa. Bagaimana *the vicious circle of poverty* menjelaskan kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 2. Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Foverty*)

Sumber : Kuncoro dalam Hak dan Riany (2007)

Konsep pendekatan dalam skema di atas dapat dilakukan secara mikro ataupun secara makro. Kemiskinan diawali dengan kondisi keterbelakangan, kekurangan, ketertinggalan dan dapat juga terjadi karena sistem yang dibentuk oleh pemerintah atau secara hukum pasar telah terbentuk. Kekurangan modal dalam arti luas melengkapi keterpurukan dari keluarga miskin (mikro atau makro).

Adanya berbagai hal di atas menyebabkan ketidakmampuan dari keluarga miskin untuk bekerja dengan produktivitas yang tinggi. Dipastikan pada kondisi tersebut pendapatannya sangat rendah, bahkan tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan dasarnya. Keluarga atau masyarakat miskin tidak akan mampu menabung, jika ada hanya dalam jumlah yang sangat terbatas. Tabungan rendah, maka jumlah investasi pun akan rendah, sehingga kriteria kekurangan modal dan keterpurukan tingkat pengetahuan (berwujud pada keterbelakangan dan ketertinggalan) semakin tinggi. Kondisi seterusnya yang terjadi adalah tingkat produksi yang jauh lebih rendah.

Hal di atas sesuai dengan pernyataan Prayitno dan Lincoln (1999), bahwa penurunan salah satu dari aspek kemiskinan akan menyebabkan penurunan pada aspek lainnya. Kemiskinan pada periode sekarang ini akan menjadi penghambat dalam mengentaskan kemiskinan pada periode yang akan datang, dalam makna program kerja yang dijalankan berhubungan dengan manusia, di mana manusia miskin akan sulit digerakkan, karena rendah pendidikan, rendah kepemilikan faktor produksi dan lainnya.

Prayitno dan Lincoln (1999) mengidentifikasi faktor penyebab kemiskinan, sebagai berikut :

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri.
- b. Tidak mampu untuk memperoleh asset dengan kemampuan sendiri.
- c. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah (tidak tamat sekolah dasar).
- d. Tidak mempunyai skill.

Pengentasan kemiskinan pada dasarnya adalah menghapus faktor penyebab, dalam penelitian ini lebih difokuskan pada penciptaan perilaku produktif. Pada masyarakat yang sedang miskin dan sebagai subyeknya adalah individu yang telah berkeluarga (khususnya kepala keluarga), pemberian pendidikan akan

mengalami kesulitan, untuk itu sadar diri miskin dan kemauan berbenah diri menjadi hal penting untuk diciptakan terlebih dahulu.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia memberikan indikasi kegagalan dalam pengelolaan negara dan pengingkaran dari tujuan kemerdekaan itu sendiri. Hal ini jelas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan, lawan dari kemiskinan itu sendiri.

5. Negara Kesejahteraan "Lawan" Kemiskinan

Pada uraian terakhir dijelaskan musuh negara adalah kemiskinan, lepas dari penjajahan, rezim pemerintahan pada dasarnya upaya melepaskan diri dari kemiskinan. Apabila kemiskinan pada suatu negara masih dalam tingkat persentase yang besar dan indikator kemiskinan lainnya masih tinggi, pada dasarnya belum lepas dari permasalahan dasar yang membelenggunya.

Dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia pada dasarnya menjalankan ekonomi Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dengan penciptaan kesejahteraan sosial (Syafi'i, 2008). Dengan demikian seluruh gerak perekonomian yang dijalankan harus mengacu pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, bukan kepentingan golongan tertentu guna mengejar indikator ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi. Konsep kesejahteraan sosial dengan implementasi pemerataan ekonomi mutlak menjadi tujuan utama.

Almuhami (2005) dalam Syafi'i (2008) mengidentifikasi perekonomian yang mengarah pada penciptaan kesejahteraan, sebagai berikut :

- a. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik.
- b. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata
- c. Mengurangi kemiskinan
- d. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan, kesehatan) bagi masyarakat
- e. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga.

Konsep kerja di atas harus mempunyai dasar yang jelas dan bersifat terus menerus dalam rangka mengentaskan kemiskinan atau penciptaan kesejahteraan masyarakat dengan kualitas yang lebih tinggi. Berbagai bentuk kebijakan yang sifatnya parsial dan hanya untuk menutupi gejala sosial masyarakat tidak akan dapat menciptakan kesejahteraan yang bersifat mengakar dari pembentukan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Konsep-konsep yang diajukan oleh Almuhami (2005) dalam Syafi'i (2008) bukan bersifat belas kasihan, tetapi suatu rancangan yang sifatnya menggerakkan perilaku masyarakat menuju penciptaan kesejahteraan.

Kesejahteraan dimaknai sebagai suatu kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik. Kebutuhan dasar dapat meliputi aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan (Spicker, 1995). Republik Indonesia dalam konsep perekonomian "apapun namanya" mutlak mempunyai kewajiban menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Makna negara kesejahteraan dalam sub judul ini bukan pembicaraan bentuk perekonomian negara "*welfare state*", tetap mengacu pada negara mempunyai peranan dalam penciptaan kesejahteraan, Negara menjadi fokus perhatian, karena

negara yang berhak mengelola sumber daya negara, bahkan hal ini jelas tercantum dalam UUD 1945, dengan tujuan akhir penciptaan kesejahteraan.

6. Pembangunan dan Sasarannya

Kesejahteraan pada uraian sebelumnya dihubungkan dengan gerak perekonomian yang dijalankan oleh pemerintah, sebagai lawan dari kondisi kemiskinan. Konsep perekonomian mendapatkan perhatian, karena seringkali indikator perekonomian bertolak belakang dengan pengentasan kemiskinan itu sendiri, bahkan gap yang terjadi semakin tinggi. Misalnya, penggunaan indikator berupa pertumbuhan ekonomi yang sampai saat ini masih digunakan sebagai pengukur keberhasilan perekonomian pada suatu periode.

Penciptaan kesejahteraan atau pengentasan kemiskinan yang membelenggu masyarakat harus muncul dari pergerakan atau perubahan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, tentu melalui berbagai stimulus dan rancangan kerja yang dikelola oleh negara. Konteks bagaimana stimulus tersebut bekerja dan bagaimana perubahan tersebut dimaknai lebih lanjut dengan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah dan sasaran yang akan diwujudkan.

Pembangunan "*development*" mempunyai arti kata kemajuan atau perkembangan, oleh Waterson dalam Bandewidjojo (1983) dimaknai sebagai perubahan atau pertumbuhan. Dalam kajian nasional (GBHN), pembangunan dimaknai sejalan dengan pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan juga dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya dikritisi, sehingga lebih

tepat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan kualitas yang lebih tinggi (dalam memaknai pertumbuhan).

Dalam perspektif penggunaan bahasa Indonesia "pembangunan", berarti terus menerus membentuk atau terus menerus menggugah kesadaran". Kesadaran yang dimaksud menuju perbaikan atau kondisi yang lebih baik, lebih tekun, lebih bergairah, lebih bekerja keras dan indikator lainnya agar terjadi perubahan sosial. Perubahan tersebut bukan saja arti jiwa, tetapi juga dalam bentuk fisik, terkait dengan prasarana pemenuhan kebutuhan dengan lebih baik, seperti bangunan gedung sekolah yang lebih baik dan lainnya (Bandewidjojo, 1983).

Penulis sengaja mencatumkan makna pembangunan dengan dasar literatur yang telah lama (80-an), sekedar memberikan perbandingan dengan makna yang diberikan para ahli saat ini. Pembangunan yang mempunyai makna perubahan tidak lepas dari kegiatan pengentasan kemiskinan. Hal ini ditegaskan oleh Kartasasmita (1996) dalam memberikan definisi pembangunan, yaitu "usaha meningkatkan harkat dan marabat masyarakat dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan". Gerak awal yang dijalankan adalah memberikan partisipasi pada masyarakat agar terlibat dalam proses pembangunan, bukan muncul sebagai subyek semata.

Todaro (2000) dalam Syafi'i (2008) mendefinisikan kepemimpinan sebagai "proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Di samping untuk peningkatan suatu pendapatan dan output pembangunan menyangkut perubahan radikal dalam struktur kelembagaan, struktur sosial, administrasi, perubahan sikap, adat serta kepercayaan.

Sejalan dengan pengertian pembangunan di atas, maka dalam proses pembangunan harus memperhatikan enam unsur pembangunan (Hartowo, dkk., :2001) yaitu :

- a. Produksi nasional bruto dan atau pendapatan nasional
- b. Pendapatan per kapita
- c. Pemberantasan kemiskinan
- d. Pemerataan pendapatan
- e. Pemberantasan pengangguran
- f. Berdiri di atas kaki sendiri atau percaya diri

Berdasarkan berbagai proses yang ada di atas dapat dinyatakan banyak variabel yang saling berhubungan. Intinya adalah pemberantasan kemiskinan, karena pemberantasan kemiskinan pada dasarnya mempunyai makna peningkatan GNP secara nasional dan peningkatan pemerataan, sehingga pendapatan per kapita masyarakat tinggi dan tidak ada *gap* yang tinggi. Secara otomatis dengan terentaskannya kemiskinan, maka telah menunjukkan masyarakat dapat hidup mandiri melalui kegiatan ekonomi produktif yang dimilikinya.

Konsep pembangunan yang diajukan oleh Todaro (2000) dalam Syafi'i (2008) relatif relevan dengan penelitian ini, yaitu merujuk pada perubahan yang dijalankan oleh pemerintah dan kelembagaan yang dimiliki, sehingga seluruhnya bergerak pada upaya perubahan sikap. Perubahan sikap ini sejalan dengan perubahan atau penciptaan kondisi yang lebih pada perilaku masyarakat, secara spesifik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi adalah perilaku produktif.

Sasaran penting dalam pembangunan pada intinya adalah perubahan perilaku produktif masyarakat, sehingga tidak terperangkap dalam kriteria miskin. Batasan kriteria miskin yang dibuat oleh lembaga negara harus jelas mengukur batas hidup layak dari aspek makanan dan bukan makanan. Lembaga negara mempunyai peran obyektif dalam menentukan pengukuran dan memberikan informasi kondisi riil masyarakat. Fakta yang sering ditemukan adalah catatan yang dikeluarkan mengenai kemiskinan tidak sesuai dengan fakta yang ada, persentase kemiskinan masyarakat mengalami penurunan, tetapi fakta yang dirasakan oleh masyarakat kehidupan ekonomi semakin sulit akibat dari harga yang meningkat dan lapangan pekerjaan yang terbatas.

Perubahan perilaku masyarakat di atas sudah tentu sebagai kerja yang harus dijalankan oleh masyarakat "subyek dan obyek pembangunan" melalui stimulus atau gerak pembangunan yang dijalankan oleh negara. Dalam era otonomi daerah, pembangunan dalam konteks mengentaskan kemiskinan masyarakat akan semakin dekat sifatnya, dalam makna pemerintah daerah lebih tahu mengenai permasalahan kemiskinan, termasuk implementasi yang lebih cepat, karena lebih sederhananya alur informasi dan birokrasi (Syakroni dan Syahrin, 2009).

Implementasi otonomi daerah dalam pembangunan termasuk pelibatan pihak swasta harus mempunyai perspektif baru (Kuncoro, 2004), sebagai berikut :

- a. Kesempatan kerja; perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi penduduk daerah.
- b. Basis pembangunan; pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru.
- c. Aset-aset lokasi; keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan.

- d. Sumber daya pengetahuan; pengetahuan dan inovasi sebagai penggerak ekonomi.

Perusahaan yang mengembangkan usaha pada daerah otonom perlu diarahkan untuk melakukan kajian ulang atas bisnis yang dijalankan dengan berdasarkan pada potensi masyarakat. Pada daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, jelas hal ini sangat sulit, karena pada dasarnya telah mempunyai kondisi alamiah yang rendah potensi. Dalam taraf awal, pemberian kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar telah dapat dinyatakan sangat baik, karena fakta yang ada di lapangan, bahwa potensi masyarakat yang ada di daerah seringkali tidak terserap, karena kualifikasinya yang rendah.

Daerah otonom yang penduduknya masih banyak mempunyai kriteria miskin (kasus seperti Provinsi NTB dengan penduduk miskin lebih dari 20,00 persen) akan sulit merealisasikan pola pikir Kuncoro (2004). Masyarakat miskin dipastikan rendah inovasi, rendah potensi dan berbagai bentuk keterpurukan lainnya, sehingga dinyatakan bahwa pengentasan kemiskinan sebagai suatu yang kompleks, karena muncul sebagai sebab dan akibat.

7. Perilaku Produktif Masyarakat

Dalam penelitian ini konsep kerja yang diarahkan tidak bersifat capaian yang sangat luar biasa, karena pada dasarnya pencegahan kemiskinan melalui penciptaan kegiatan ekonomi produktif secara berkala akan mampu mewujudkan cita-cita besar. Masyarakat cukup mempunyai kegiatan ekonomi produktif, maka dengan sendirinya berupa untuk meningkatkan potensi diri dan keluarganya. Apabila hal ini telah

mampu berjalan, maka secara otomatis kegiatan pemerintah dalam pembangunan periode selanjutnya lebih mudah.

Pembangunan masyarakat miskin di Provinsi NTB, khususnya di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai proses awal, maka sasarannya bersifat lebih sederhana, yaitu kesadaran dirinya sebagai keluarga miskin dan sadar mengarahkan perilakunya dalam kegiatan produktif. Mujahiddin (2008) memberikan ciri dari perilaku produktif, sebagai berikut :

- a. Keterampilan mengambil keputusan dan mengambil risiko yang moderat dan bukan atas dasar kebetulan belaka.
- b. Bersifat energik, khususnya dalam bentuk kegiatan inovatif.
- c. Tanggung jawab individual
- d. Mengetahui hasil-hasil dari berbagai keputusan yang diambilnya.
- e. Mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa yang akan datang
- f. Memiliki kemampuan berorganisasi.

Perilaku produktif, layaknya perilaku secara umum dipengaruhi oleh dua aspek besar, yaitu faktor internal dan lingkungan. Dalam fungsi dinyatakan oleh Gibson, dkk (1997) sebagai *behaviour = f(internal, eksternal)*. Faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah melalui program PNPM, selanjutnya bagaimana faktor internalnya dikelola, sehingga dapat tergerak dalam mewujudkan perubahan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi produktif.

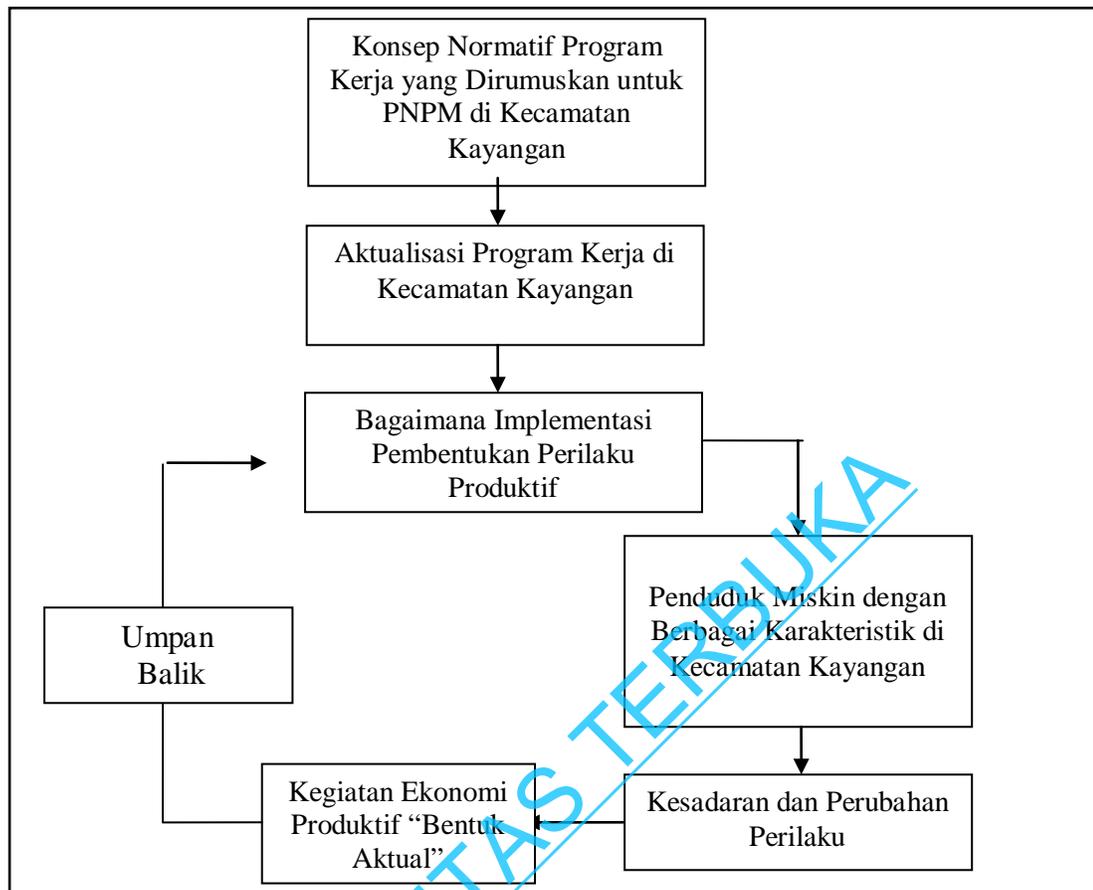
Konsep perilaku produktif di atas dapat dinyatakan sebagai konsep yang cukup kompleks dalam keluarga miskin, sehingga perlu dioperasionalkan kembali sesuai dengan kondisi masyarakat. Perilaku produktif dimaknai sebagai kegiatan sadar dari masyarakat untuk menggunakan atau menyesuaikan potensi diri dan keluarga dengan sumber daya yang dimiliki untuk dapat menciptakan aliran kas

masuk secara rutin, baik sebagai pekerja atau menciptakan pekerjaan agar dapat hidup layak, baik dalam aspek makanan dan bukan makanan.

Pemerintah melalui PNPM diharapkan mempunyai kegiatan yang jelas dan mengakar dalam memutuskan rantai kemiskinan masyarakat. Intinya adalah kemampuan dalam menciptakan aliran kas secara terus menerus, bukan akibat dari aliran kas yang tercipta dari proyek pada karya atau sejenisnya yang sifatnya insidental atau hanya pada periode tertentu. Arah penelitian ini adalah melakukan kajian yang mendalam atas aktualisasi atau implementasi dari konsep yang dibangun pada program PNPM, selanjutnya kajian pada kemampuan dalam penciptaan perilaku produktif masyarakat. Masyarakat atau individu yang dientaskan dari kemiskinan bukan dengan konsep *charity* atau belas kasihan, tetapi bagaimana memunculkan kepercayaan diri untuk dapat berdiri sendiri dalam memecahkan permasalahannya, tentu PNPM sebagai stimulus dan membantu dalam memecahkan akar masalah dari rantai kemiskinan yang ada.

B. Kerangka Berpikir

Uraian terakhir di atas telah memberikan isyarat aspek penting yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu melakukan penelahaan mendalam pada konsep kerja yang dijalankan secara normatif dari program PNPM, aktualisasi kerja di lapangan dan perannya dalam menciptakan perilaku produktif masyarakat Kecamatan Kayangan. Pola kerja dalam penelitian ini adalah pada sisi apa dan bagaimana PNPM memutuskan lingkaran kemiskinan yang ada di Kecamatan Kayangan. Berikut kerangka berpikir penelitian ini.



Gambar 2.3. Kerangka Berpikir Penelitian "Kerja PNPM dalam menciptakan Perilaku Produktif di Kecamatan Kayangan.

Sumber : Dokumen diolah Peneliti.

Subyek penelitian telah diarahkan dalam konsep berpikir ini, karena PNPM menyatakan program yang dijalankan berbasis bottom up, sehingga pada setiap wilayah akan bersifat spesifik. Potensi masyarakat berbeda, begitu juga dengan budayanya, sehingga ada desain khusus dalam terapannya untuk mengentaskan kemiskinan atau bentuk sasaran lain dari PNPM tersebut.

Kerja yang dijalankan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sebagai sasaran dari pembangunan bukan bersifat insidental, tetapi terus menerus,

sehingga masyarakat mencapai kriteria sejahtera dan selanjutnya sebagai pembentuk ekonomi nasional yang maju. Hal di atas menjadikan adanya kegiatan umpan balik dari kerja yang dijalankan. Konsep ini pada dasarnya bukan pemerintahan yang dibiayai oleh masyarakat, tetapi bagaimana kerja pemerintah yang dibiayai oleh masyarakat kembali terimplementasi bagi masyarakat, bukan stagnan dalam kegiatan pemerintahan semata untuk pembiayaan aparatur negara dalam berbagai istilah yang tercantum dalam APBD.

C. Definisi Operasional

Hanya ada dua variabel besar dalam penelitian ini, yaitu PNPM sebagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam memecahkan masalah kemiskinan dan perilaku produktif sebagai sasaran kerja yang dikehendaki dalam riset ini. Makna dari dua variabel besar tersebut sebagai berikut :

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat merupakan kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, lebih didekati dalam konseptual yang dibangun dan implementasi kerja di lapangan (Kecamatan Kayangan). Dari dua aspek ini akan diupayakan oleh peneliti menemukan lingkaran kemiskinan apa yang dipotong, sehingga masyarakat terentaskan dari masalahnya.
2. Perilaku produktif merupakan bentuk perhatian dari peneliti atas aspek tindakan aktual yang dipilih oleh masyarakat (keluarga) yang mendapatkan PNPM di Kecamatan Kayangan sebagai suatu hasil dari stimulus yang diberikan pemerintah, di mana sifatnya mengarah pada pembentukan aliran

kas yang terus menerus, bukan sebagai akibat dari kerja insidental. Konteks ini tidak bersifat kaku, dapat berwujud dalam kerjanya sebagai tenaga kerja atau menciptakan kegiatan ekonomi produktif. Konteks ini memberikan jaminan ada sumber aliran kas, selanjutnya dapat menjadi dasar untuk mengarahkan kegiatannya lebih lanjut di masa akan datang guna peningkatan pendapatan. Tegasnya, kemiskinan tidak dapat dientaskan secara insidental, tetapi memerlukan suatu proses.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif. Nazir (2003) memaknainya sebagai "suatu studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat". Dalam penelitian akan dilakukan uraian temuan secara sistematis yang mendasarkan diri pada fakta.

Sugiyono (2004) mendefinisikan penelitian deskriptif dari sisi kaitan antar variabel, dinyatakan sebagai penelitian atas suatu variabel secara mandiri, tanpa dilakukan analisis pembuatan model. Penelitian ini fokus pada bagaimana program dan kebijakan yang ada secara normatif pada PNPM, selanjutnya bagaimana implementasinya serta diarahkan pada terjadi atau tidaknya pembentukan perilaku produktif.

B. Sumber data dan Informan

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Kayangan kecamatan, yang memiliki delapan (8) desa. Informan atau nara sumber dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah di kecamatan, desa, dan masyarakat penerima langsung dan tidak langsung program PNPM, juga pegawai yang bertugas dalam mengelola PNPM baik yang di tingkat kecamatan maupun yang bertugas di tingkat desa. Untuk memperoleh informasi maka wawancara mendalam akan menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Informan lain dalam penelitian ini adalah aparatur negara di Kantor Kecamatan, terdiri dari Camat dan staf kecamatan lainnya yang terlibat dalam kegiatan PNPM, Petugas PNPM di tingkat kecamatan dan desa, dan aparatur pemerintah di tingkat desa mulai dari Kepala desa dan staf desa lainnya.

Responden dari masyarakat penerima PNPM di ambil dua program PNPM yaitu, program PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MP), dan program PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM GSC). Teknik dalam pengambilan sampel untuk setiap program dilakukan secara acak.

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Kayangan, terdiri atas delapan desa, yaitu Desa Kayangan, Selengen, Santong, Sesait , Banten Damai, Gumantar, Salut dan Pendua. Lokasi ini akan mendapatkan kajian dalam penelitian ini, karena sebagai wilayah yang mendapatkan PNPM.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kuantitatif dicirikan adanya variabel laten dan indikator yang jelas. Adapun dalam penelitian kualitatif, terlebih sifatnya eksploratif, maka indikator variabel ini akan bersifat luas tergantung pada temuan. Dalam penelitian ini instrumen yang di pergunakan untuk merndapatkan data dan informasi adalah dokumen-dokumen , pedoman wawancara dan observasi. Untuk mempermudah dalam penelitian di lapangan maka disusun desain instrumen penelitian dengan menggunakan indikator – indikator sebagaimana yang di dijelaskan dalam matrik sebagai berikut :

Tabel 3. 1. Matrix Instrumen Penelitian.

VARIABEL	VARIABEL LATEN	INDIKATOR
PNPM	Konsep Normatif	- Visi
		- Misi
		- Tujuan
	Aktualisasi	- Rencana kerja
		- Pilihan kegiatan
		- Implementasi
		- Aktualisasi dana
Perilaku Produktif	Kesadaran	- Hasil kegiatan
		- Sadar untuk berubah
		- Sadar untuk berkegiatan
	Aktualisasi perilaku	- Peningkatan potensi
		- Bentuk aliran kas
		- Sumber aliran kas
		- Kegiatan ekonomi

Berbagai indikator tersebut dapat mengalami perluasan makna sesuai dengan temuan di lapangan. Penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh kemampuan dalam merekam informasi dari keikutsertaannya di dalam subyek penelitian. Konteks ini yang memberikan penegasan, walaupun kuesioner disusun atas dasar instrumen tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan informasi lain yang dimunculkan oleh informan, bahkan dapat dilakukan penggalian informasi pada setiap ada kecenderungan informasi penting yang berhubungan dengan program PNPM dan implementasinya atas penciptaan perilaku produktif.

D. Prosedur Pengumpulan Data

PNPM sebagai suatu kebijakan dengan bentuk temuan dalam penelitian ini berupa kerja normatifnya diperoleh dengan menggunakan data primer dan sekunder yang disediakan oleh lembaga terkait yang melakukan pengelolaan PNPM di

Kecamatan Kayangan. Keberadaannya di Kantor Kecamatan Kayangan, termasuk personal yang dilibatkan dalam kerja PNPM tersebut.

Kajian selanjutnya lebih bersifat temuan di lapangan. Untuk keperluan ini dilakukan observasi dan wawancara serta *cross check* dengan berbagai alat pengumpulan data tersebut. Dalam hal ini, diupayakan untuk mendapatkan informasi yang luas melalui keterlibatan peneliti yang lebih lama di masyarakat yang mendapatkan kebijakan PNPM. Konsep ini sesuai dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, pengecekan sejawat dan pengecekan anggota (Maleong, 2000).

Informasi dapat juga diperoleh dari LSM yang memberikan perhatian pada kajian ini, sebagai bentuk pengecekan sejawat. Konsep membandingkan setiap temuan tetap dilakukan. Hal terpenting adalah penggalan informasi dari masyarakat dengan cara tanya jawab mengenai stimulus yang diberikan pemerintah melalui program PNPM dan kegiatan ekonomi produktif, baik meliputi kesadaran dan kerja aktual dari sumber aliran kas untuk keluarganya.

Dalam melakukan pengumpulan data di atas, tidak hanya mengandalkan kemampuan peneliti dalam melakukan pencatatan atas informasi yang diperoleh, tetapi juga dilakukan perekaman data, baik dengan alat perekam suara atau dengan menggunakan perekaman gambar atau moment yang memberikan informasi adanya perilaku produktif yang tercermin dari kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

E. Metode Analisis Data

Desain penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif, temuannya bersifat natural, tanpa melakukan perubahan makna dan redaksi dari sumber informasi, baik yang bersumber dari lembaga ataupun masyarakat. Penelitian kualitatif dinyatakan sebagai penelitian natural atau apa adanya, karena tidak dilakukan kajian menggunakan pendekatan statistik atau sejenisnya (Nasution, 2000)1.

Analisis data bersifat menguraikan temuan, dengan langkah sebagai berikut kerjanya :

1. Pengumpulan data.

Pada tahap ini yang dikumpulkan berupa data tentang berbagai kerja normatif yang dijalankan pada kebijakan PNPM, yang menjadi anutan personal, pemerintah di Kecamatan Kayangan. Aspek ini meliputi, visi, misi, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, perencanaan kerja, program, anggaran, aktualisasi, implementasi, implikasi dan evaluasi yang secara normatif dijalankan.

2. Transkrip data .

Pada tahap ini data – data yang peneliti peroleh melalui kegiatan wawancara, pengamatan langsung, dokumentasi, dll, dari berbagai sumber, seperti kebijakan PNPM, visi, misi, tujuan jangka panjang, dan jangka pendek Program PNPM, perencanaan kerja PNPM, program PNPM, anggaran PNPM, aktualisasi PNPM , di susun dan ditata dalam bentuk transkrip data.

3. Mereduksi data.

Selanjutnya data – data yang sudah dikumpulkan dari berbagai peristiwa dan kejadian yang peneliti temukan pada saat peneliti survei di lapangan dibuatkan rangkuman inti atau abstraksinya.

4. Kategorisasi data.

Untuk mempermudah langkah analisis selanjutnya, maka pada langkah ini peneliti menyusun kembali data dan informasi yang di peroleh dalam bentuk kategori berdasarkan kriteria – kriteria atau ciri tertentu.

5. Triangulasi.

Agar memperoleh data yang sahih, valid peneliti melakukan *cross check* kembali tentang data faktual yang sudah di peroleh dari berbagai hal yang ada di Kecamatan Kayangan yang diimplementasi pada kerja nyata di delapan desa., langkah ini dilakukan dengan maksud menjamin kualitas data yang diperoleh.

6. Penyimpulan akhir.

Berdasarkan temuan, dan analisis faktual dibuat kajian atau kesimpulan atas wujud stimulus, respon masyarakat atau personal dari berbagai hal terhadap implementasi aktual PNPM di Kecamatan Kayangan pada kerja nyatanya di delapan desa. Terutama kajian dalam rangka membentuk kesadaran, peningkatan potensi diri dan aspek lainnya yang berhubungan dengan realisasi kerja ekonomi produktif. Aspek-aspek tersebut untuk memberikan penilaian kerja PNPM dalam membentuk perilaku produktif masyarakat Kecamatan Kayangan.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Kayangan

1. Batas Giografi.

Kecamatan Kayangan sebagai salah satu dari lima kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara merupakan Kecamatan yang usianya masih relatif muda yaitu baru sepuluh tahun, dulunya merupakan pemekaran dari Kecamatan Gangga. Terbentuknya Kecamatan Kayangan didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Nomor 81 Tahun 1999, tertanggal 24 April 1999, Tentang Pembentukan 27 Kecamatan Pembantu di Propinsi Nusa Tenggara barat, dan Salah satunya adalah Kecamatan Pembantu Kayangan Lombok Barat.



**Gambar 4.1. Peta Wilayah Kecama
(Sumber : Kantor Kecamatan Kayangan).**

Kecamatan Kayangan memiliki batas – batas wilayah, yaitu disebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bayan, disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Narmada, dan disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gangga.

Kecamatan Kayangan terdiri dari delapan desa dan memiliki luas wilayah 112,90 Km².

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kecamatan Kayangan dirinci menurut Desa Tahun 2010.

NO	DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)	PERSENTASE
1	Kayangan	11,40	10,10
2	Sesait	17,10	7,79
3	Santong	8,80	15,15
4	Gumantar	38,60	17,27
5	Selengen	19,50	34,19
6	Banten Damae	3,46	3,06
7	Pendua	5,14	4,55
8	Salut	8,90	7,88
	JUMLAH	112,90	100

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Utara 2010.

Dari delapan desa di wilayah kecamatan Kayangan, desa Gumantar adalah desa yang memiliki wilayah yang paling luas yaitu 38,60 Km², dan desa yang luas wilayahnya paling sedikit adalah desa Banten Damae yaitu memiliki luas 3,46 Km².

Secara Adminstrasi pemerintahan Kecamatan Kayangan terdiri dari delapan (8) Desa, Sembilan puluh (90) dusun dan dua ratus delapan puluh delapan (288) RT. Jelasnya mengenai wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Kayangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Kayangan dirinci menurut Desa Tahun 2010.

NO	DESA	JLH DUSUN	JLH RW	JLH RT
1	Kayangan	12	-	35
2	Sesait	23	-	60
3	Santong	12	-	41
4	Gumantar	10	-	35
5	Selengen	12	-	41
6	Banten Damae	7	-	27
7	Pendua	5	-	13
8	Salut	9	-	36
	JUMLAH	90		288

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Utara 2010.

Dari delapan desa di wilayah Kecamatan Kayangan, desa Sesait adalah desa yang memiliki jumlah dusun dan RT yang paling banyak dan desa Pendua yang paling sedikit.

2. Potensi Kecamatan Kayangan

Kecamatan Kayangan secara umum berada pada ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut, terdiri atas tanah berbukit dan tanah datar yang secara umum digunakan untuk lahan perkebunan dan pertanian. Topografi dan kondisi iklim sangat potensial untuk perkebunan, terutama kelapa, coklat, mente, mangga, dan sejenisnya, tetapi secara umum masyarakat mengusahakan tanaman kelapa.

Terkait dengan hal tersebut, Camat Kecamatan Kayangan menegaskan bahwa:

“Wilayah kami mempunyai potensi yang sangat besar, terutama potensi alam untuk pengembangan perkebunan; dapat kita lihat bahwa sepanjang mata memandang ada perkebunan kelapa, mente dan lainnya, semua ini baru muncul beberapa tahun terakhir, karena dulunya berupa lahan kritis. Potensi sektor perkebunan pada dasarnya tidak berhenti pada hasil panen, tetapi dapat dilakukan pengelolaan

lebih lanjut menjadi kegiatan industri rumah tangga atau bahkan dalam skala yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat di Kecamatan Tanjung telah banyak yang sukses melalui bisnis kopra. Produk kelapa jika diolah lebih lanjut mempunyai ragam hasil, seperti minyak goreng dalam kapasitas kerja industri rumah tangga, dipastikan tidak memerlukan tambahan biaya, karena kayu untuk melakukan pengolahan lebih sangat berlimpah, bahkan cukup memanfaatkan serabut kelapa". (wawancara tanggal 4 Nopember 2011).

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa potensi perkebunan di wilayah Kecamatan Kayangan sangat potensial terutama kelapa, bayak yang masyarakat yang bisa dilakukan tidak terbatas hanya memanfaatkan hasil perkebunannya saja , namun bisa diolah menjadi produk lain yang bernilai ekonomi tinggi.

Fakta empiris potensi sumber daya alam di Kecamatan Kayangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan di Kecamatan Kayangan Tahun 2011.

NO.	KEGUNAAN LAHAN	LUAS	PERSENTASE (%)
1	Perkebunan	14.069,00	71,49
2	Sawah	3.934,00	19,99
3	Pekarangan	1.026,00	5,21
4	Lainnya	650,00	3,30
	Total	19.679,00	100,00

Sumber : Kecamatan Kayangan, 2011.

Total luas wilayah di Kecamatan Kayangan adalah 19.679 ha atau 196,79 km², dengan proporsi sebesar 71,49 persen atau seluas 14.069 ha berupa lahan perkebunan. Berdasarkan penggunaan lahan lebih dominan untuk perkebunan, maka jelas potensi kecamatan tersebut berada pada sektor perkebunan.

Komoditas kelapa dapat diandalkan sebagai pendukung ekonomi keluarga, karena dalam satu tahun dapat dilakukan panen sebanyak empat kali, terlebih jika dilakukan kegiatan lanjutan untuk meningkatkan nilai jual hasil perkebunannya.

Berkenaan dengan hal tersebut Kepala Desa Salut memberikan penegasan bahwa:

”Rata-rata hasil panen kelapa per hektar sebesar 65 ton. Potensi yang besar selama ini hanya dijual langsung oleh para petani, lebih banyak dijual pada para pengepul yang berasal dari luar Kecamatan Kayangan, termasuk para pengusaha kopra, bahkan ada pengusaha yang langsung membawa kelapa ke -Pulau Jawa.”(wawancara tanggal 8 Nopember 2011).

Seiring dengan adanya pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Lombok Utara, diharapkan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia akan lebih fokus. Peran penting dari pemerintah adalah menggerakkan potensi sumber daya yang ada sekarang ini agar kehidupan masyarakat yang lebih baik dapat terjadi.

3. Demografi Kecamatan Kayangan

Kecamatan Kayangan sebagai salah satu kecamatan termuda di Kabupaten Lombok Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 37.413 orang yang tersebar di delapan desa, terdiri dari 18.334 orang jenis kelamin laki – laki, dan 19.079 orang perempuan, dan

Gambaran jelas tentang sebaran penduduk di masing masing desa di Kecamatan Kayangan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Kecamatan Kayangan menurut jenis Kelamin dan Desa tahun 2010.

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kayangan	2.576	2.584	5.160
2	Sesait	3.949	4.009	7.958
3	Santong	2.771	2.951	5.662
4	Gumantar	2.645	2.760	5.405
5	Selengen	2.530	2.657	5.187
6	Banten Damae	1.334	1.447	2.781
7	Pendua	1.001	1.040	2.041
8	Salut	1.588	1.631	3.219
	Jumlah	18.334	19.079	37.413

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Utara 2010.

Berdasarkan data diatas dapat di jelaskan bahwa, sebaran penduduk wilayah Kecamatan Kayangan paling banyak di Desa Sesait yaitu sejumlah 7.958 jiwa, sebaran penduduk terbanyak kedua adalah desa Santong sebanyak 5.662 jiwa, sedang sebaran penduduk yang terkecil di desa Pendua yaitu Sejumlah 2.041 jiwa.

4. Sumber Daya Penduduk di Kecamatan Kayangan

Keberadaan sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam segala aspek, karena akan menentukan tingkat kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Keterbatasan sumber daya dalam artian keterampilan dan pengetahuan yang rendah akan menjadi salah satu indikator penyebab terpuruknya roda pembangunan wilayah. Untuk itu pendidikan Keterampilan dan pengetahuan menjadi suatu hal yang sangat penting. Tingkat pendidikan sumber daya (penduduk) di Kecamatan Kayangan sangat bervariasi, mulai dari tidak pernah sekolah sampai dengan tamat perguruan tinggi. Tentang variasi tingkat pendidikan penduduk di wilayah Kecamatan Kayangan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Kecamatan Kayangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	PERSENTASE (%)
1	Tidak/belum Sekolah	27.956	69,54
2	Tingkat SD	6.323	15,73
3	Tingkat SLTP	3.587	8,92
4	Tingkat SLTA	2.026	5,04
5	Tingkat Akademi / Perguruan Tinggi	311	0,08
	Jumlah	40.203	100,00

Sumber : Kecamatan Kayangan.

Total jumlah penduduk Kecamatan Kayangan sebanyak 40.203 jiwa, dominan berpendidikan tidak tamat SD (dengan proporsi sebesar 69,54 persen). Penduduk yang berpendidikan sarjana hanya sebanyak 0,08 persen yang diharapkan mampu membiaskan pembelajaran bagi masyarakat dalam kegiatan ekonomi atau kegiatan lain yang mengarah penciptaan kehidupan ekonomi yang sejahtera.

Tentang hal diatas, Kaur Pembangunan Kecamatan Kayangan memberikan informasi :

“...konteks tersebut relatif sulit, karena penduduk yang berpendidikan sarjana umumnya bekerja di luar Kecamatan Kayangan, sehingga - aktivitas sosial ekonominya relatif tidak terlihat di domisili atau desa masing-masing”. (wawancara tanggal 8 Nopember 2011),

Selanjutnya Camat Kecamatan Kayangan menegaskan mengenai aspek ini sebagai berikut:

“Kemiskinan identik dengan kurangnya pengetahuan, keterampilan dan pemilikan sumber daya yang terbatas. Masyarakat di Kecamatan Kayangan secara umum mempunyai lahan, baik dalam bentuk pekarangan atau kebun. Masyarakat yang mempunyai lahan terbatas akan bekerja sebagai penggarap atau buruh serabutan, misalnya buruh tani, buruh panjat kelapa dan lainnya...Tapi apabila saya perhatikan

berdasarkan hasil survey di beberapa tempat di Jawa, dengan adanya keterampilan tertentu, usaha ternak ayam, puyuh, itik dilakukan pada lahan yang sempit, kisaran satu are...sementara masyarakat di sini kondisi itu sangat dimiliki....”(wawancara tanggal 4 Nopember 2011)

Informasi di atas menunjukkan bahwa setidaknya ada potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat, berbeda kondisinya dengan masyarakat yang ada di kota. Pembentukan aliran kas untuk mendukung perekonomian keluarga sangat dimungkinkan, baik dari pengelolaan hasil sumber daya alam atau pemanfaatan lahan yang dimiliki, walaupun hanya sebatas lahan pekarangan. Pengentasan kemiskinan yang sifatnya berkelanjutan hanya dapat terwujud dari terciptanya perilaku produktif dan kegiatan ekonomi aktual dari masyarakat, bukan sebatas bantuan modal tanpa ada kegiatan ekonomi yang akan dikerjakan.

Informasi umum yang diperoleh dari camat di atas perlu dilakukan *cross check*, baik melalui observasi dan wawancara dengan para aparatur desa dan penduduk. Kepala Desa Salut, memberikan informasi mengenai potensi dan kondisi masyarakatnya secara umum:

“Maaf pak, *sampun pelungguh keliling desa tiang* (sudah keliling di desa kami) ...bisa dilihat setiap rumah punya pekarangan, bahkan ada masyarakat yang berumah di kebunya...artinya banyak hal yang dapat dikembangkan...kalau dilihat dari kondisi rumah...ya ada rumah batu, banyak rumah bedek, ini memberikan gambaran kemiskinan penduduk kami...mudahan dapat dengan cepat berubah, terutama setelah adanya kegiatan pemerintah berupa program PNPM. Kalau dikriteriakan rumah sehat dan rumah tidak sehat hampir berimbang...tinggal masyarakat mau belajarperilaku masyarakat kami terlalu cepat puas,...ada hasil bumi, dapat makan urusan selesai...berbeda dengan masyarakat di kota, harus kerja keras dan banyak kebutuhan...jadi banyak ragam pekerjaan yang dapat muncul”.

(wawancara tanggal 8 Nopember 2011)

Berdasarkan observasi yang dilakukan, setiap rumah yang ada di Desa Salut mempunyai pekarangan, ini menunjukkan ada kemungkinan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi. Masalah pasar tidak menjadi penghambat, karena pemasaran hasil perkebunan, peternakan dan lainnya dapat dilakukan tidak sebatas di desa, atau kecamatan setempat.

Kepala Desa Selengan dalam wawancaranya mengenai potensi dan kondisi masyarakat menegaskan :

“Di desa kami ada orang-orang sukses...berpendidikan sarjana. Sebenarnya cukup menjadi contoh..., karena semula bukan berasal dari keluarga kaya....kemauan berubah menjadi aspek penting. Belajar dari teman-teman Bali yang datang transmigrasi dapat dinyatakan sukses, karena kerja kerasnya seperti, beternak, bertani dan lainnya. dijalankan....Semua penduduk punya rumah dan pekarangan, tidak ada sampai jadi gelandangan....”
(wawancara tanggal 10 Nopember 2011).

Informasi dari dua kepala desa di atas relatif sama, yaitu ada potensi untuk melakukan kegiatan ekonomi, setidaknya ada pekarangan untuk beternak dan sejenisnya. Hal penting yang diungkapkan adalah adanya warga yang berpendidikan sarjana dan sukses dalam bidang ekonomi, dijalankan melalui perjuangan, karena tidak berasal dari keluarga yang kaya atau memiliki kebun, sawah dan ternak yang berlimpah.

Selanjutnya Kepala Desa Kayangan memberikan informasinya bahwa:

“Kondisi di desa berbeda dengan kota, di desa ada produksi, kebun, sawah dan ragam lainnya. Antar penduduk bisa saling meminta, tidak membeli...*niki kemuda'an idup leq desa*.(ini bentuk kemudahan hidup di desa). Pertanian modern mungkin susah, karena masih banyak yang sifatnya tadah hujan...tetapi yang dapat menjadi potensi adalah pengolahan hasil perkebunan dan ternak. Ada juga warga kami menjadi pedagang....”.(wawancara tanggal 20 Nopember 2011).

Kepala desa lainnya yaitu, Kepala Desa Gumantar; Kepala Desa Banten Damae; Kepala Desa Sesait; Kepala Desa Pendua; Kepala Desa Santong; memberikan informasi yang sama, bahwa ada banyak potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat, sehingga tidak terpuruk dalam kehidupan ekonomi yang dikategorikan miskin.

Kondisi Kecamatan Kayangan secara umum, walaupun berada di ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut, tetapi air bawah tanah sangat potensial, bahkan ada banyak saluran sungai yang mempunyai debit air tinggi. Pengelolaan lebih lanjut adalah bagaimana memanfaatkan teknologi dengan investasi yang tidak terlalu besar.

Diharapkan juga dengan bantuan program PNPM, terutama pada bangunan fisik atau perlengkapan sarana prasarana yang lebih memudahkan masyarakat melakukan aktivitas akan dapat melakukan perubahan kehidupan ekonomi dan sosialnya.

Kembali dilakukan wawancara dengan Kasi PMD Kecamatan Kayangan mengenai potensi, kondisi masyarakat desa, secara spesifik mengenai pendidikan kepala desa :

“...pada dasarnya yang penting dalam hubungan dengan sumber daya manusia adalah kemauan untuk belajar, tentu sekolah formal tidak dapat dihindari...fakta pada zaman sekarang dapat melakukan pendidikan informal sangat terbuka.

Kondisi pembelajaran pada masyarakat kami yang masih rendah menjadi masalah sendiri dalam menjalankan setiap program kerja. Bukan berarti semua program gagal, terkadang tingkat capaian yang diharapkan masih perlu diusahakan dan sifat dari program kerja yang ada harus terus menerus...”.(wawancara tanggal 25 Nopember 2011).

Pendapat yang senada, tetapi dengan pernyataan yang lain disampaikan oleh

Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kayangan berikut informasinya:

“Hal yang dibutuhkan pada masyarakat yang mempunyai pendidikan pada umumnya rendah adalah kemauan untuk diarahkan...itu saja, karena dalam pelaksanaan program kerja kami selalu mengawasi dan berkoordinasi dengan aparatur desa. Bertanya apa yang perlu dijalankan, menjalankan apa yang telah diarahkan menjadi sangat penting....”.(wawancara tanggal 25 Nopember 2011).

Makna dari jabaran dua aparatur Kecamatan Kayangan di adalah setiap program kerja diharapkan dukungan dari masyarakat dengan cara melakukan kegiatan sesuai dengan arahan. Hal ini penting, karena aparatur yang lebih mengenal arah dari kegiatan, tentu setelah melakukan analisis atas kondisi faktual setiap desa dan masukan dari para aparatur desa atau pihak-pihak yang menguasai kondisi di desa terkait.

Aparatur kecamatan sebagai pemanjangan kebijakan dari pemerintah kabupaten mempunyai harapan agar masyarakat bekerjasama dengan cara mendengar, memperhatikan dan melakukan pengarahannya yang diharapkan pada setiap program pemerintah, termasuk pada program PNPM. Para aparatur negara di Kecamatan Kayangan menyadari bahwa wibawa apatur negara sedang mengalami penurunan, karena adanya berbagai perilaku yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Hal ini juga diakui oleh MenPan RI (2004) dengan pernyataan :

“Disadari bahwa kondisi sosial dewasa ini telah menunjukkan tuntutan terjadinya perubahan perilaku sosial, pada satu sisi menunjukkan kecenderungan kurang mematuhi peraturan, melawan aparat penegak hukum, tidak memperdulikan etika, kesopanan dan norma yang berlaku. Pada sisi lain, sebagian aparatur negara masih mencerminkan sikap arogan, kurang disiplin, kurang konsisten dalam tugas, kurang peduli dan menurunnya rasa tanggung jawab moral dan profesional pemerintah yang berakibat menurunnya kepercayaan kepada pemerintah”.(SE No.13. KEP/M.PAN/4/2002, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara).

Kondisi di atas terjadi pada semua lapisan masyarakat, satu sisi aparatur di Kecamatan Kayangan menghendaki perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah aparatur negara bekerja dengan optimal pada setiap program, termasuk pada program PNPM agar secara maksimal dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, berupa masalah kemiskinan.

Dalam wawancara dengan Sekcam Kayangan, memberikan pernyataan:

“Pada era sekarang ini, terkadang masyarakat enggan untuk menjalankan program pemerintah. Kami sebagai aparatur di sini tidak berkeinginan hal ini terjadi, kami berharap masyarakat mendapatkan manfaat dari program yang ada, terlebih program nasional PNPM, sehingga diharapkan informasi yang diberikan oleh para petugas dapat dijalankan dengan baik....program PNPM di Kecamatan Kayangan bukan satu tahun, tetapi cukup panjang sehingga diharapkan masyarakat yang berhubungan dengan program PNPM dapat memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh...sehingga ada dasar yang jelas untuk merubah kehidupan diri dan keluarga”.
(wawancara tanggal 29 Nopember 2011).

Uraian di atas perlu diberikan untuk mengetahui potensi, kondisi masyarakat dan sekilas perilaku masyarakat dalam menanggapi program negara. Informasi sekilas ini diharapkan tidak terjadi pada program PNPM, karena kerja dari program ini berasal dari masyarakat ke pemerintah (*bottom up*). Artinya, sebelum realisasi program PNPM pada dasarnya masyarakat telah mempunyai pengetahuan sebelumnya, sehingga realisasi kegiatan atau program secara umum telah begitu dikenal, termasuk tujuan dari program tersebut semata untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Konsep Normatif PNPM di Kecamatan Kayangan

1. Visi, Misi dan Tujuan PNPM

Visi PNPM pada setiap wilayah sasaran mengacu pada visi umum PNPM, yaitu “tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan” (Departemen Dalam Negeri, 2008). Adapun makna kesejahteraan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan kemandirian dalam makna mampu mengorganisir diri untuk mobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya dan mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Dalam konteks di atas pemerintah perlu sangat menyadari kemiskinan pada suatu wilayah terjadi, karena kemiskinan akibat dari kekurangan sumber daya, akibat struktural atau akibat budaya, sehingga dapat dilakukan identifikasi kebijakan yang lebih terarah.

Dalam rangka mewujudkan visi di atas dirumuskan misi PNPM sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
- e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan (Departemen Dalam Negeri, 2008).

Pemberdayaan masyarakat menjadi pilihan dalam mengatasi kemiskinan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut tujuan penting yang akan diwujudkan oleh PNPM adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah terwujudnya perilaku produktif masyarakat sebagai dasar untuk mengelola potensi yang dimiliki atau bekerja sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada, sehingga ada jaminan aliran kas masuk pada keluarga miskin. Terciptanya aliran kas sementara sebagai akibat kerja di proyek yang ada di desa sasaran sebagai implementasi dari PNPM dinyatakan bukan wujud dari pemilikan perilaku produktif, tetapi bagaimana belajar dari proyek tersebut dan selanjutnya muncul sebagai pekerjaannya pada periode lanjutan.

2. Kerja Normatif PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang masuk di setiap desa Kecamatan Kayangan dikenal dengan PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MP) dan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM GSC). Jenis PNPM ini masuk pada setiap desa dengan karakteristik potensi dan permasalahan mendasar yang melingkup masyarakat, sehingga terjadi program kerja yang tepat sasaran.

PNPM sebagai program berskala nasional dengan konsep program *bottom up*, langkah kerja awal yang dijalankan adalah kegiatan sosialisasi. Sosialisasi berbeda dengan program lain, karena dalam program PNPM melibatkan semua lapisan personal mulai dari tingkat pusat sampai pelaksana di pedesaan. Fasilitator PNPM

Kecamatan Kayangan, pada saat dilakukan wawancara, di Kantor Kecamatan

Kayangan memberikan keterangan mengenai sosialisasi PNPM, sebagai berikut:

“Saya memberikan informasi atas dasar konsep yang diharapkan pada kegiatan sosialisasi PNPM. Sosialisasi ditujukan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai PNPM. Diharapkan semua pihak yang terlibat (tim) dan masyarakat tahu mengenai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, pelaksanaan dan hasil yang diharapkan....

Sosialisasi ini dijalankan agar tim dan masyarakat yang mendapatkan program ini sejalan dan selalu sehat dalam memecahkan masalah”.
(wawancara tanggal 6 Desember 2011).

Pertanyaan dilanjutkan pada tahapan pelaksanaan yang dijalankan pada program PNPM, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam sosialisasi. Jawaban diberikan secara bersama dari beberapa sumber di atas:

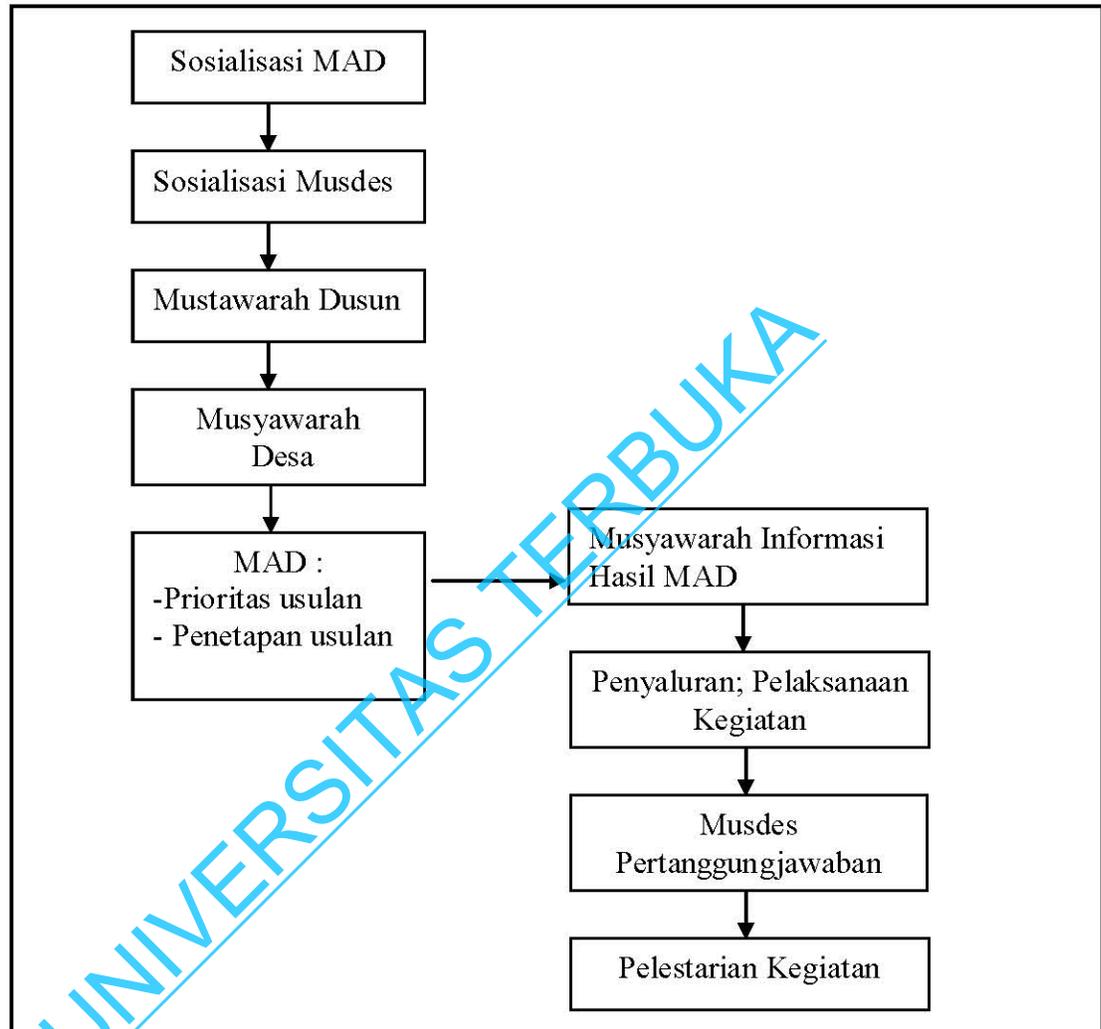
“Pada saat dilakukan sosialisasi terdiri atas tim kabupaten, tim Kecamatan, dan tim lapangan. Kerja sosialisasi (termasuk kami saat itu dan ini kerja normatif yang harus dijalankan sebagai dasar kerja di lapangan) menggunakan media secara langsung terjun ke masyarakat dengan cara mengumpulkan masyarakat dan tokoh di balai desa. Dalam rangka memudahkan dan koordinasi dilakukan juga pertemuan antara pihak masyarakat yang diwakili oleh aparatur desa dan tokoh di kecamatan, berarti pertemuan dilakukan dengan beberapa unsur yang ada di setiap desa”. (wawancara tanggal 6 Desember 2011).

Berdasarkan uraian di atas, kembali dipertanyakan mengenai keberhasilan sosialisasi PNPM yang dijalankan, fokus pada masyarakat desa yang akan menjadi orientasi dari kebijakan. Nara sumber memberikan jawaban singkat, bahwa :

“sosialisasi berhasil, karena gencarnya sosialisasi, bukan hanya melalui pertemuan atau kerja lapangan, tetapi juga seluruh aparatur desa kerja sampai bawah memperkenalkan PNPM pada masyarakat”.
(wawancara tanggal 6 Desember 2011).

Fokus pertanyaan dilanjutkan pada bagaimana suatu kegiatan muncul sebagai pilihan dalam program PNPM. Berhubungan dengan jawaban pertanyaan tersebut –

Oleh nara sumber petugas PNPM di tingkat Kecamatan memberikan rumusan skedul kerja PNPM sebagai berikut:



Gambar 4.3. Skema Kerja PNPM
Sumber : dokumen diolah peneliti

Skema di atas diberikan penjelasan atas dasar rekapitulasi informasi dari fasilitator kecamatan dan desa, sebagai berikut:

“Sosialisasi melalui musyawarah antar desa (MAD) dilakukan setelah para aparatur desa dan fasilitator yang bekerja untuk wilayah terkait telah melakukan sosialisasi pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Hasil sosialisasi pada tingkatan yang lebih tinggi digunakan sebagai

pedoman untuk menjalankan musyawarah yang sifatnya telah lebih dekat dengan operasional kegiatan.

Musyawarah antar desa memberikan kajian atas kondisi di kecamatan serta *mapping* potensi yang ada pada setiap desa di kecamatan. Konsep kerja yang lebih operasional dijadikan dasar untuk melakukan musyawarah desa dan selanjutnya setiap kepala dusun serta para pemuda dan pihak yang lain yang terlibat dalam kegiatan melakukan musyawarah dusun.

Pada kegiatan di atas pada dasarnya telah ditentukan kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan kapasitas dan penggalian potensi guna memecahkan permasalahan yang ada. Berbagai usulan kegiatan kembali di bawa pada kerja musyswarah desa. Pada tahap ini usulan kegiatan dari desa terkait dimatangkan, selanjutnya kembali dilakukan MAD untuk koordinasi.

Selanjutnya menunggu hasil (direalisasikan atau tidak atau wujud realisasi). Implikasi selanjutnya adalah penyaluran dana dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban dilaksanakan.

Hal penting dari seluruh kegiatan ini pada dasarnya ketepatan dalam pemilihan kegiatan serta menjaga dan mengembangkan nilai dari kegiatan yang ada” (wawancara tanggal 6 Desember 2011).

Peneliti melakukan *cross check* konsep kerja PNPM di atas berdasarkan buku pedoman. Temuan yang diperoleh skema kerja yang ada relatif sama, dengan cara memadukan skema tersebut dengan keterangan yang diberikan oleh para pelaku PNPM di Kecamatan Kayangan. Konteks ini dapat dinyatakan sebagai konsep normatif PNPM, selanjutnya akan dilakukan kajian atau penelusuran berbagai kegiatan di atas di masyarakat.

C. Konsep Aktualisasi Kerja PNPM di Kecamatan Kayangan-

1. Proses Penentuan Kegiatan PNPM di Kecamatan Kayangan

Pada dasarnya implikasi dari PNPM yang diharapkan adalah penggunaan keunggulan komparatif setiap desa dan masyarakat miskin. Hal ini akan dapat tercapai jika dapat dikenali potensi yang ada pada setiap desa, termasuk yang sifatnya personal serta pemilihan kegiatan yang tepat. Konsep individual dapat saja akhir dari

kegiatannya berupa perpaduan dari temuan individual menjadi akumulasi dalam konsep pemecahan masalah. Peneliti memahami informasi tersebut, karena awalnya peneliti menyatakan bahwa apakah PNPM memberikan program kegiatan bantuan yang sifatnya khas pada setiap keluarga miskin.

Penelusuran atas perumusan kegiatan pada PNPM di Kecamatan Kayangan dilakukan pada setiap desa. Informannya para pejabat desa, termasuk kepala lingkungan atau kepala dusun,. Kadus Salut Timur memberikan informasi sebagai berikut :

“Ya...kami pernah melakukan rapat, pada saat awal masuknya PNPM...nggih tahun 2008. Rapat di setiap dusun, terus kami sebagai kepala dusun menyampaikan apa yang menjadi keputusan rapat dusun pada desa.....hasil rapat saat itu ada dana simpan pinjam dan pasar desa. Benar kami membutuhkan itu, *adeq araq tipaq jual hasil napi si araq leq desa...*(supaya ada tempat menjual hasil). Ada lagi kegiatan lain dan usulan tersebut dipenuhi oleh pemerintah secara bertahap”. (wawancara tanggal 10 Desember 2011).

Pada hari yang sama dengan wawancara di atas dilakukan penelusuran ke Desa Selengen, sebagai informan adalah Kaur Kesra Desa Selengen dan memberikan informasi sebagai berikut:

“Kebetulan saat *nike...tiang* (itu...saya) yang mengkoordinir setiap kepala dusun untuk melakukan musyawarah di setiap dusun masing-masing. Hasilnya disampaikan pada musyawarah desa, terkait dengan fasilitas apa, kegiatan apa yang diperlukan untuk dapat menciptakan kondisi yang lebih baik dari sekarang....dan kami bawa keputusan itu ke tingkat kecamatan”.(wawancara tanggal 10 Desember 2011).

Dua informasi di atas memberikan pembuktian bahwa kegiatan yang diusulkan pada program PNPM berasal dari warga yang dirumuskan melalui rapat di setiap dusun. Rapat pada tingkat yang terendah untuk dapat menemukan kebutuhan yang

mendasar dalam kehidupan masyarakat, baik yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Di Desa Kayangan, wawancara dilakukan dengan Sekdes dan menyatakan bahwa :

“Dapat dikatakan semua warga mengenal PNPM, karena saat itu rapat dilakukan di setiap dusun, hasil musyawarah di masing-masing dusun dimusyawarahkan di tingkat desa, (saat itu saya hadir)...musyawarah tergolong cukup baik dan akhirnya berdasarkan kesepakatan dirumuskan dan diaktualisasikan program kegiatan drainase dan simpan pinjam....sekarang semua sudah berjalan dan berada pada tahap menjaga agar dapat berfungsi dengan baik”.
(wawancara pada tanggal 9 Desember 2011).

Di Desa Gumantar wawancara dilakukan dengan Kaur Pembangunan berikut informasinya :

“Rapat dilakukan di beberapa dusun, saat itu saya selaku Kaur Pembangunan melakukan pendampingan...hasil mufakat disampaikan di desa, selanjutnya jadi usulan dan dasar munculnya beberapa kegiatan...pelungguh dapat lihat perbaikan jalan dan lainnya...nanti pelungguh tanya masyarakat...*adegne pasti...nggih* (diminta bertanya pada masyarakat, supaya lebih pasti informasinya)”.
(wawancara pada tanggal 9 Desember 2011).

Di Desa Banten Damae wawancara dilakukan dengan Kaur Kesra didapatkan informasi antara lain :

“Kegiatan pemerintah dapat dinyatakan melibatkan semua personil termasuk program PNPM, pada kegiatan rapat di tingkat dusun untuk membahas rancangan usulan program PNPM, kami ditugaskan untuk ikut sebagai pendamping dusun dan sebagai penengah jalannya rapat”.
(wawancara tanggal 13 Desember 2011).

Informasi di atas sekilas menunjukkan bahwa kerja yang dijalankan untuk program PNPM melibatkan banyak pihak, proses prosedural dan berjalan dalam waktu yang lama, baik tahap persiapan ataupun pelaksanaannya. Di Desa Sesait

dilakukan wawancara dengan Kaur Umum, di Desa Pendua dengan Kaur Kesra dan di Desa Santong dengan Kaur Kesra. Wawancara yang dilakukan pada pertengahan Desember 2011 untuk mendapatkan informasi dilakukannya rapat atau musyawarah untuk mengusulkan kegiatan yang diperlukan oleh masyarakat. Hasil wawancara memberikan pembuktian bahwa rapat di tingkat dusun dilakukan di setiap desa yang ada di Kecamatan Kayangan.

2. Jenis Kegiatan dan Aktualisasi Dana PNPM di Kecamatan Kayangan

Temuan di atas memberikan pembuktian bahwa prosedur kerja PNPM dijalankan sesuai dengan prosedur normatif, dapat dinyatakan bahwa konsep normatif termasuk informasi dari fasilitator dapat dinyatakan benar atau tidak bias. Adanya prosedur ini diharapkan usulan kegiatan PNPM secara tepat mengatasi masalah esensial masyarakat serta dapat digunakan untuk menggali potensi yang ada, selanjutnya berimplikasi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Aktualisasi kegiatan PNPM di setiap desa akan diuraikan pada sub kajian selanjutnya, baik dari para aparatur desa, fasilitator dan masyarakat terutama yang berhubungan dengan implikasinya dalam memunculkan perilaku produktif. Program PNPM di Kecamatan Kayangan telah berjalan dari tahun 2008-2011 dan masih ada rencana sampai dengan tahun 2014. Dokumentasi yang peneliti peroleh di Unit Pelaksana Kegiatan PNPM tingkat Kecamatan, beberapa laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil wawancara dengan fasilitator diperoleh informasi sebagai berikut.

Tabel 4.6. Jenis Kegiatan dan Jumlah Dana PNPM di Kecamatan Kayangan Tahun 2008.

NO.	DESA	REALISASI KEGIATAN	DANA (RP)
1.	Santong	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	20.000.000
2.	Sesait	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	20.000.000
3.	Pendua	Pengerasan Jalan	175.969.800
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	26.000.000
4.	Gumantar	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	174.041.000
5.	Banten Damae	Pemb. Gedung TK.	168.333.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	20.000.000
6.	Salut	Pasar desa	168.334.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	20.000.000
7.	Selengen	Pemb. MCK.	151.149.300
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	29.000.000
8.	Kayangan	Saluran Drainase.	101.505.900
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	22.000.000
Total			950.000.000

Sumber : Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Kayangan.

Pada tahun 2008 total dana PNPM yang disalurkan di Kecamatan Kayangan sebesar Rp.950.000.000. Dapat dinyatakan dana yang tergolong besar, karena jumlah dana tersebut relatif setara dengan dana APBD yang dikelola Kecamatan Kayangan, baik untuk belanja aparatur ataupun belanja pembangunan (belanja langsung dan belanja tidak langsung). Kisaran dana yang dikelola Kecamatan Kayangan pada tahun pada tahun 2006 sebesar Rp.1.113.436.114,00, tahun 2007 sebesar Rp.1.158.450.840 dan tahun 2008 sebesar Rp.1.348.512.400.

Jenis kegiatan PNPM di Kecamatan Kayangan pada tahun 2008 dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu pembangunan fisik dan modal simpan pinjam. Bangunan fisik mempunyai lima orientasi, yaitu melancarkan saluran air, baik dalam konteks rumah tangga ataupun pertanian, kegiatan ekonomi berupa pasar, kemudahan transportasi berupa pengerasan jalan, kesehatan berupa bangunan MCK

dan pendidikan berupa bangunan TK. Bentuk kegiatan ini tidak secara langsung berpengaruh terhadap penciptaan aliran kas pada masyarakat, tetapi tergantung pada bagaimana masyarakat dalam memanfaatkannya.

Kemudahan dalam transportasi akan memberikan dukungan kemudahan bagi masyarakat untuk mendistribusikan hasil produksi ataupun melakukan aktivitas dari dan ke desa terkait. Masyarakat yang pekerjaannya sebagai petani dapat lebih mudah dalam memasarkan produknya atau dapat melakukan pemasaran sendiri secara langsung, karena ada pasar di Desa Salut atau pasar yang ada di desa lain. Kondisi jalan yang baik dan cukup lebar akan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat menggunakan alat transportasi yang lebih besar untuk mengangkut atau mendistribusikan hasil panen pertanian (padi dan sayuran) atau panen hasil perkebunan (kelapa, kopi dan lainnya). Konteks kajian ekonomi memberikan pembuktian bahwa nilai waktu dan tempat dari hasil produksi akan memberikan peningkatan nilai dari komoditas yang mampu disediakan sesuai dengan waktu dan tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jumlah alokasi dana yang cukup besar tersebut diharapkan akan sangat mempermudah pemerintah Kecamatan Kayangan dalam mempercepat penciptaan masyarakat yang lebih sejahtera. Hal ini sangat tergantung pada ketepatan jenis kegiatan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2009 jumlah dana PNPM yang dialokasikan tergolong cukup besar, dapat dinyatakan hampir dua kali lipat alokasi dari APBD Kabupaten Lombok Barat untuk Kecamatan Kayangan. Informasinya sebagai berikut :

Tabel 4.7. Jenis Kegiatan dan Jumlah Dana PNPM di Kecamatan Kayangan Tahun 2009.

NO.	DESA	REALISASI KEGIATAN	DANA (RP)
1.	Santong	Pengerasan jalan.	329.656.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	180.000.000
2.	Sesait	Pengerasan jalan.	304.617.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	41.000.000
3.	Pendua	Pengerasan Jalan	289.146.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	10.000.000
4.	Gumantar	Pengerasan jalan.	315.457.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	20.000.000
5.	Banten Damae	Pengerasan jalan.	331.356.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	23.000.000
6.	Salut	Perpipaan.	331.094.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	-
7.	Selengen	Pengerasan jalan.	320.755.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	40.000.000
8.	Kayangan	Penalutan	228.219.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	85.000.000
Total.			2.850.000.000

Sumber : Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Kayangan.

Pada tahun 2009 total dana yang dialokasikan sebesar Rp.2.850.000.000, kegiatan yang dijalankan relatif sama dengan periode 2008. Jumlah dana tersebut dominan untuk kegiatan yang bersifat fisik, berupa pengerasan jalan, penalutan dan perpipaan. Pemerintah melalui perumus kegiatan PNPM harus memastikan bahwa kegiatan ini memberikan nilai tambah pada kegiatan produktif masyarakat.

Kegiatan yang bersifat langsung dalam mengatasi modal masyarakat berupa dana untuk simpan pinjam, terbesar terjadi di Desa Santong yaitu Rp.180.000.000. Jumlah dana ini dapat dinyatakan besar untuk pembiayaan ekonomi mikro. Kesuksesan usaha simpan pinjam ini sangat terkait dengan ketepatan dalam

pengelolaan, sehingga terhindar dari kredit macet dan diharapkan mampu memunculkan lembaga keuangan desa. Jumlah dana untuk Simpan Pinjam Perempuan terbesar di desa santong lebih disebabkan karena Desa Santong memiliki pasar yang besar, sehingga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakatnya yang lebih banyak mengarah kepada usaha (dagang).

Alokasi dana untuk perbaikan , pengerasan jalan di masing – masing desa bervariasi, ini tergantung dari kondisi jalan dan usulan dari masing – masing desa, kisaran dana untuk perbaikan , pengerasan jalan adalah Rp. 289.146.000 samapi dengan Rp.331.094.000,-, terbesar di desa Banten Damae.

Akumulasi dana PNPM tahun 2008-2009 telah mencapai Rp.3.700.000.000, di mana dana tersebut murni mengalir di Kecamatan Kayangan. Aliran dana tersebut dalam aplikasinya di program PNPM terutama untuk bangunan fisik dijalankan dengan menggunakan potensi yang ada di desa, baik berupa tenaga kerja ataupun bahan-bahan yang dibutuhkan. Fakta yang terjadi akan dilakukan penggalian secara khusus pada aspek tersebut, termasuk optimalisasi aliran kas tanpa dilakukan pemotongan atau perilaku negatif lainnya yang menyebabkan biasanya nilai yang dihasilkan dalam program PNPM.

Pada tahun 2010 total dana yang disalurkan kembali sebesar Rp.2.850.000.000, sehingga akumulasi dana yang telah disalurkan sebesar Rp.6.550.000.000. Kegiatan yang dilakukan masih relatif sama, yaitu pembangunan fisik untuk memberikan peningkatan akses dari dan ke desa terkait, berikut di paparkan melalui table jenis kegiatan PNPM dan dana yang disalurkan di Kecamatan Kayangan pada tahun 2010.

Tabel 4.8. Jenis Kegiatan dan Jumlah Dana PNPM di Kecamatan Kayangan Tahun 2010.

NO.	DESA	REALISASI KEGIATAN	DANA (RP)
1.	Santong	Pengerasan jalan.	291.606.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	101.000.000
2.	Sesait	Pelatihan Menjahit.	61.870.000
		Pengerasan jalan & Damrah	212.897.000
3.	Pendua	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	68.000.000
		Pengerasan Jalan & pemb. Jembatan.	325.092.000
4.	Gumantar	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	79.000.000
		Peningkatan Jalan	313.343.000
5.	Sangiang	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	10.000.000
		Peningkatan Jalan	316.757.000
6.	Salut	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	44.000.000
		Penalutan	224.541.000
7.	Selengen	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	20.000.000
		Pos Yandu	331.428.000
8.	Kayangan	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	99.000.000
		Penalutan	176.466.000
Total			2.850.000.000

Sumber : Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Kayangan.

Apabila diperhatikan program kegiatan PNPM memberikan pembuktian bahwa Kecamatan Kayangan relatif tidak belum optimal dengan program pembangunan, baik pembangunan fisik ataupun non fisik. Masyarakat belum mendapatkan pelayanan perbankan yang memadai, dari perusahaan daerah (PD. BPR-LKP) Kabupaten Lombok Barat.

Makna lebih lanjutnya adalah apabila kegiatan pembangunan fisik dan non fisik berjalan dengan baik serta merata di setiap daerah, maka dipastikan tidak diperlukan kegiatan yang sifatnya spesifik, termasuk program PNPM untuk mengatasi masalah kemiskinan atau keterlambatan pengembangan masyarakat.

Pada tahun 2011 kegiatan pembangunan fisik di Kecamatan Kayangan belum tuntas. Hal ini dibuktikan dari kegiatan dan dana yang disalurkan untuk program PNPM tahun 2011, sebagai berikut.

Tabel 4.9. Jenis Kegiatan dan Jumlah Dana PNPM di Kecamatan Kayangan Tahun 2011.

NO.	DESA	REALISASI KEGIATAN	DANA (RP)
1.	Santong	Pengerasan Jalan	294.291.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	18.000.000
2.	Sesait	Pengerasan Jalan	332.446.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	50.000.000
3.	Pendua	Pengerasan Jalan	330.441.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	37.000.000
4.	Gumantar	Pengerasan jalan.	328.271.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	40.000.000
5.	Banten Damae	Pengerasan Jalan	330306.000
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	50.000.000
6.	Salut	perpipaan.	331.245.000
7.	Selengen	Pengerasan Jalan	327.775.000
8.	Kayangan	pos yandu	323.283.500
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	57.000.000
Total			2.850.058.500

Sumber : Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Kayangan.

Akumulasi dana yang telah direalisasikan untuk program PNPM di Kecamatan Kayangan sebesar Rp.9.400.058.500. Fasilitas fisik dan sarana pendukung telah diberikan, diharapkan program PNPM dengan kerja fasilitator atau pendamping pada setiap desa dan kecamatan dapat menciptakan perubahan pada perilaku masyarakat, dalam kajian ini perilaku ekonomi yang diberikan istilah perilaku produktif.

3. Pelaku dan Peranannya dalam Program PNPM di Kecamatan Kayangan.

Dalam rangka mengetahui peran pelaku terhadap pelaksanaan PNPM di Kecamatan Kayangan maka perlu di cari informasi tentang pihak-pihak yang terlibat, termasuk peran dan tanggung jawab yang dimiliki.

Di tingkat desa pelaku pertama yang berperan adalah kepala desa, tugas yang diembannya dalam pelaksanaan PNPM adalah :

- a. Membina dan mengendalikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PNPM.
- b. Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM.
- c. Mewakili desa dalam pelaksanaan musyawarah antar desa (MAD)
- d. Mengkordinir pembangunan yang ada di desa.
- e. Turut menyelesaikan permasalahan dalam setiap program PNPM

Tugas yang diemban oleh kepala desa pada PNPM tergolong berat, terkait dengan hal tersebut dilakukan wawancara dengan Kades Salut, sebagai berikut :

“Begitu masuk PNPM di Kecamatan Kayangan....*muter tiang maraq gasing; muter awaq, muter otaq* (kata yang menunjukkan kesibukan yang luar biasa, baik fisik maupun pikiran). Bagaimana tidak kita berpikir tentang tanggung jawab ke atas, memperhatikan kehendak masyarakat...tapi karena untuk kemaslahatan masyarakat ya...kita senang melakukan. Kalau sekarang ini (tahun 201-2012), karena sudah terbiasa jadi kita anggap ringan, tapi waktu pertama kali wah...berat sekali”. (wawancara tanggal 4 Januari 2012).

Pada hari yang sama dilakukan juga wawancara dengan Kades Kayangan, berikut informasinya :

Napi base kades lain pineng... (apa yang di bilang Kades lain pusing...), begitu kalau ada program masuk di desa kita. Pekerjaan bertambah, apa yang kita dapat tidak ada....mohon perhatian pemerintah untuk menyisihkan buat kita yang tidak bergaji".(wawancara tanggal 4 Januari 2012).

Informasi yang disampaikan, bahwa pekerjaan yang diemban berat, seolah juga memberikan kepastian bahwa kepala desa lain merasakan beratnya pekerjaan tersebut. Satu aspek ditekankan diharapkan adanya imbalan dari pemerintah setiap adanya beban kerja lebih yang diberikan pada kepala desa. Dua informasi di atas setidaknya memberikan informasi bahwa benar kepala desa terlibat dalam kerja PNPM.

Pelaku kedua yang berperan dalam pelaksanaan PNPM di Desan adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Layaknya legislatif di desa perannya adalah melakukan pengawasan atas setiap tahapan dari kegiatan PNPM. Lembaga ini juga diharapkan memberikan kontribusi atas efektifnya kegiatan PNPM serta memberikan sumbangan dalam pelestarian kegiatan, untuk kegiatan fisik merawatnya supaya dapat bermanfaat sesuai dengan umur ekonomi dan lembaga perkreditan agar dapat tumbuh menjadi lembaga keuangan.

Berhubungan dengan peran BPD, peneliti juga mewawancarai dengan Kepala BPD Desa Salut, berikut informasinya :

"Kami sebagai orang tua hanya memberikan pengawasan, selama berjalan dengan baik kami diam saja. Awal nasehat yang tiang berikan pada anak-anak kita...bekerja yang jujur itu saja...sekarang kan itu yang mahal dan sulit". (wawancara tanggal 6 Januari 2012).

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa BPD berperan sebagai pegawai dan sekaligus sebagai penasehat dalam pelaksanaan PNPM di desa.

Mempertegas kembali tentang peran BPD, Kembali dilakukan wawancara dengan anggota BPD Desa Salut :

“Kita percaya kepada yang muda - muda dalam bekerja...kita hanya memberikan dukungan sepenuhnya...semoga hasil tercapai. Berbagai pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana”.
(wawancara tanggal 6 Januari 2012).

Pelaku ketiga yang berperan dalam pelaksanaan PNPM di desa adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim ini diharapkan menjadi tulang punggung kegiatan PNPM di desa. Personal yang ada mendapatkan insentif dari pemerintah. TPK ini mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan semua program kegiatan PNPM. TPK ini mempunyai inisiatif dalam setiap pertemuan dengan semua pihak di desa, jika ada permasalahan yang dihadapi, termasuk perubahan kegiatan PNPM.

Pelaku keempat di tingkat desa adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Tim ini layaknya organisasi formal yang mengerjakan suatu proyek, terdiri atas ketua, bendahara, sekretaris dan anggota. Seluruhnya berasal dari masyarakat desa setempat yang mempunyai peran mengkoordinasikan kegiatan dan mengelola administrasi PNPM.

Selanjutnya bagaimana TPK ini terbentuk dan berkerja, Kaur Pembangunan Desa Kayangan, memberikan informasinya sebagai berikut :

“TPK dibentuk pada awal sebelum bantuan dan program kerja PNPM dimulai, artinya desa telah membentuknya sebelum realisasi kegiatan. TPK inilah yang mengelola kegiatan musyawarah dusun, musyawarah desa, bahkan mereka yang merumuskan kegiatan dalam usulan kerja,

pelaporan dan lainnya atas capaian pelaksanaan kegiatan PNPM...”.
(wawancara tanggal 10 Januari 2012).

Pelaku selanjutnya yang juga berperan adalah Tim Penulis Usulan (TPU), personilnya juga berasal dari desa bersangkutan. Dapat dinyatakan bahwa TPU adalah tim intelektual desa, karena pekerjaannya berhubungan dengan menyiapkan, menyusun, gagasan – gagasan, usulan - usulan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa. Tim Penulis Usulan bekerjasama atau melakukan koordinasi dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kedua kelompok kerja ini bekerja dari awal (perencanaan) sampai tahap pemeliharaan kegiatan PNPM, personal yang berada pada kedua tim tersebut berasal dari desa, yaitu orang-orang yang dipilih oleh desa.

Pelaku selanjutnya adalah Tim Pemantau desa, berfungsi untuk memantau pelaksanaan kegiatan PNPM di desa. Selanjutnya adalah Tim Pemelihara Tim ini , memiliki fungsi untuk memelihara hasil – hasil kegiatan PNPM di desa. Pelaku berikutnya adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), KPMD ini merupakan warga desa yang terpilih dan mempunyai fungsi sebagai fasilitator masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan kegiatan PNPM.

Pelaku terakhir yang berperan dalam pelaksanaan PNPM di desa adalah Kelompok Masyarakat. Kelompok Masyarakat inilah yang pada hakekatnya berperan sebagai pelaku utama dalam program PNPM.

Selain di tingkat desa juga terdapat pelaku PNPM di tingkat Kecamatan. Adapun pelaku pertama di tingkat kecamatan adalah Camat. Camat mempunyai peranan penting dalam mengesahkan usulan kegiatan yang terbentuk dalam MAD,

yang dikenal dengan Surat Penetapan Camat (SPC). Peran camat pada dasarnya adalah sebagai wakil dari pemerintah kabupaten dalam program PNPM, mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan PNPM pada desa-desa yang berada di wilayah kecamatan, memepertegas tentang peran Camat di lakukan wawancara dengan camat Kayangan wawancara tanggal 11 Januari 2012, Beliau memberikan informasi terkait dengan tugas yang diembannya sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan PNPM di wilayah kecamatan
- b. Menjadi pengkoordinasi seluruh kegiatan PNPM yang ada di setiap desa
- c. Memfasilitasi MAD
- d. Tugas yang diemban juga berhubungan dengan sosialisasi, mengarahkan pelaksanaan dan memelihara hasil yang telah dicapai
(wawancara tanggal 11 Januari 2012)

Pelaku kedua di tingkat kecamatan adalah dikenal dengan nama Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK), personal yang menjabatnya adalah aparatur kecamatan, yang mempunyai hubungan kerja dengan pemerintah desa. Jabatan tersebut adalah Kasi Pemerintahan desa (PMD), yang langsung menjadi PjOK program PNPM. Jabatan tersebut diberikan pada kasi PMD yang mempunyai hubungan kerja agar tidak perlu belajar lagi mengenai kondisi, potensi, permasalahan yang ada di desa, sehingga dapat memberikan informasi pada pihak lain mengenai aspek-aspek yang perlu dilakukan pada setiap desa.

Camat Kecamatan Kayangan pada wawancara tanggal 11 Januari 2012, memberikan penjelasan tentang tugas penting Kasi PMD sebagai PjOK program PNPM sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan semua pihak mengenai pelaksanaan PNPM di setiap desa.
- b. Juga berperan aktif mulai dari kegiatan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.

- c. Rutin melakukan pertemuan dengan fasilitator pedesaan dan pihak lain mengenai PNPM
- d. Membuat laporan bulanan kegiatan PNPM
- e. Melaksanakan pengawasan dan administrasi.
(wawancara tanggal 11 Januari 2012)

Informasi di atas perlu dilakukan *cross check* dengan pihak pemangku jabatan tersebut. . Pejabat kasi PMD membenarkan hal tersebut, bahkan dinyatakan bahwa seorang pimpinan harus tahu fungsi yang diemban bawahan guna dilakukan pengawasan yang benar. Memperjelas maksud dari kasi PMD di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Kasi PMD Kecamatan Kayangan, pada tanggal 16 Januari 2012 berikut pendapatnya :

“Sebagai kasi PMD, dalam pelaksanaan PNPM dipastikan ada hubungan dengan kerja pemerintah desa, terlebih setelah ada PNPM. Aparatur Kecamatan Kayangan mempunyai keterlibatan dalam kerja PNPM, terlebih semua kecamatan di KLU mendapatkan program PNPM...khusus yang bapak kaji di sini diberikan nama PNPM mandiri pedesaan, PNPM GSC. Peran saya sebagai Kasi PMD dalam PNPM adalah sebagai PjOK, berkoordinasi dengan fasilitator kecamatan dan pedesaan dalam proses kerja, capaian dan lainnya”. (Wawancara tanggal 16 Januari 2012).

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan *cross check* dengan Pejabat lainnya, yaitu Kasi Kesos pada dasarnya memberikan jawaban yang sama dengan pejabat lainnya.

“Semua pihak dilibatkan, tetapi secara spesifik adalah Kasi PMD, tentu bapak camat mempunyai porsi yang sangat besar, karena membawahi dan sekaligus sebagai koordinator delapan kepala desa. Keberhasilan pada dasarnya tergantung pada kesadaran masyarakat, mau berubah atau tidak....ada kesempatan jika dapat memanfaatkannya dengan baik”.(Wawancara tanggal 16 Januari 2012).

Pelaku ketiga adalah Tim Verifikasi (TV). Tim Verifikasi adalah gabungan dari personal yang mempunyai keahlian, keterampilan dan pengalaman dalam bidang-

bidang yang menjadi usulan kegiatan PNPM. Fungsi mutlak ada agar masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai pedoman atau arahan yang jelas, misalnya dalam mengelola usaha simpan pinjam, baik berhubungan dengan administrasi ataupun operasional kegiatan.

Tim Verifikasi PNPM di Kecamatan Kayangan, seluruhnya berasal dari individu yang telah berpengalaman dalam bidang konstruksi, proyek dan usaha simpan pinjam. Tim Verifikasi juga memberikan rekomendasi setuju atau tidak dalam konteks kelayakan usulan kegiatan yang dijalankan atau setidaknya memberikan masukan bagaimana proyek dijalankan agar memperoleh hasil atau manfaat yang maksimal

Pelaku keempat dalam pelaksanaan PNPM di tingkat kecamatan adalah UPK (Unit pengelola kegiatan), layaknya UPK di pedesaan, tetapi UPK di kecamatan melaksanakan kegiatan pada tingkat kecamatan sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan PNPM antar desa.

Pelaku berikutnya dalam pelaksanaan PNPM di tingkat kecamatan adalah Fasilitator Kecamatan, Tim Fasilitator kecamatan ini berperan sebagai pendamping masyarakat dalam mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan PNPM.

Pelaku berikutnya dalam pelaksanaan PNPM di tingkat kecamatan adalah Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). Badan ini di bentuk secara sukaarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa, Badan ini memiliki peran untuk melindungi dan melestarikan hasil – hasil program yang telah dilaksanakan.

Terdapat banyak pihak yang terlibat pada program PNPM, termasuk unit fungsi yang ada, mulai dari tingkat pedesaan, kecamatan sampai tingkat kabupaten.

Kompleksitas fihak yang terlibat diharapkan menjadi jaminan pelaksanaan PNPM, terutama tahap pemeliharaan dan pengembangan menjadi lebih baik, terarah, bernilai guna, sehingga tidak muncul sebagai program yang sifatnya insidental.

Keterlibatan semua unsur dalam pelaksanaan PNPM di Kecamatan Kayangan juga di perkuat dengan informasi yang didapat dari beberapa informan antara lain sebagai berikut :

Camat kayangan dalam wawancara memberikan informasi sebagai berikut :

“... selanjutnya pelaksanaan dan pemeliharaan hasil PNPM menjadi tanggung jawab penuh pemerintah desa dan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan jauh dari awal (pra PNPM), terlebih telah masuk tahap pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan evaluasi seluruhnya harus mengikuti prosedur. Desa tidak boleh melakukan kegiatan dengan kerjanya sendiri, karena seluruh dana, hasil dan evaluasi harus dilaporkan. Pedoman dalam menulis laporan juga mengikuti prosedur yang telah ditetapkan...seluruhnya prosedural” (wawancara tanggal 11 Januari 2012).

Pada waktu yang sama dilakukan wawancara dengan Sekcam :

“Semua kita harus peduli pada program PNPM, maksud saya aparatur di kecamatan termasuk saya. Walaupun tidak ada kerja saya dalam struktur, tetapi pada waktu tertentu sebagai wakil camat saya sangat memahami program PNPM dan bentuk kegiatan, sedang proses dan lain – lainnya ada di desa”. (wawancara tanggal 11 Januari 2012).

Pada hari tersebut juga penulis meluangkan waktu sepenuhnya di Kecamatan kayangan, untuk memberikan kepastian bahwa hasil pengamatan tentang keterlibatan aparatur dan peranya dalam pelaksanaan PNPM.

Dari uraian di atas dapat di lihat bahwa peran pelaku PNPM dari tingkat desa sampai dengan di tingkat Kecamatan di Kecamatan Kayangan memberikan gambaran bahwa, pelaksanaan program PNPM melibatkan semua pihak melalui

peran masing-masing, sehingga memberikan kontribusi untuk berhasilnya seluruh kegiatan yang telah menjadi usulan.

4. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Kayangan.

a. Bentuk Implementasi Program PNPM di kecamatan Kayangan.

Implementasi program PNPM di Kecamatan Kayangan kurun waktu 2008 sampai dengan tahun 2012 memiliki dua bentuk yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM GSC).

Paket program PNPM MP yang di jalankan di masyarakat adalah berkaitan dengan pengadaan, perbaikan sarana prasarana dasar yang memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat seperti ; penalutaan, pembuatan drainase, perpipaan, pembukaan jalan, pengerasan jalan, pembangunan pasar, pembangunan dam, pembangunan jembatan, pembangunan MCK, pelatihan keterampilan dan Pemberian permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Sedang paket yang dikembangkan PNPM GSC adalah pembangunan pos yandu, pembangunan gedung sekolah, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak, Pemberian Insentif bagi guru, pemberian transport untuk Ibu hamil, Pemberian beasiswa untuk siswa.

Berikut table bentuk implementasi program PNPM di Kecamatan Kayangan :

Tabel 4.10. Jenis Program PNPM di Kec. Kayangan pada masing – masing desa kurun waktu 2008 s/d 2011.

NO	DESA	Realisasi Program PNPM di kec. Kayangan			
		2008	2009	2010	2011
1	Santong	a. SPP.	a. SPP. b. Pengerasan Jalan.	a. SPP. b. Pengerasan Jalan.	a. SPP. b. Pengerasan Jalan.
2	Sesait	a. SPP	a. SPP b. Pengerasan Jalan.	a. SPP b. Pengerasan Jalan. c. Pelatihan Menjahit. d. Pemb. Dam	a. SPP b. Pengerasan Jalan.
3	Pendua	a. SPP b. Pengerasan Jalan.	a. SPP b. Pengerasan Jalan.	a. SPP b. Pengerasan Jalan c. Pemb. Jmbatan.	a. SPP b. Pengerasan Jalan.
4	Gumantar	a. SPP	a. SPP b. Pengerasan Jalan.	a. SPP b. Pemb. Jalan	a. SPP b. Pengerasan Jalan.
5	Banten Damae	a. SPP. b. Pemb. Gedung TK	a. SPP. b. Pengerasan Jalan.	a. SPP. b. Pemb. Jalan	a. SPP. b. Pengerasan Jalan.
6	Salut	a. SPP b. Pemb. Pasar.	a. SPP b. Perpipaan	a. SPP b. Penalutan.	a. Perpipaan b. -
7	Selengen	a. SPP b. Pemb. MCK	a. Pengerasan Jalan. b. Penalutan	a. SPP b. Pemb. Pos - Yandu.	a. Pengerasan Jalan.
8	Kayangan	a. SPP b. Pemb. saluran drainase.	a. Pengerasan jalan b. Penalutan	a. SPP b. penalutan.	a. SPP b. Pemb. Pos Yandu.

Sumber : Kantor UPK PNPM Kecamatan Kayangan.

Pada table diatas didapatkan bahwa bentuk implementasi program kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2011, untuk masing – masing desa ada yang sama dan ada juga yang berbeda.

Untuk tahun 2008, semua desa (8) mengusulkan paket program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), satu desa (Pendua), memprogramkan pengerasan jalan, satu desa (Banten damae) memprogramkan pembangunan Gedung TK, satu desa (Salut) memprogramkan pembangunan Pasar, satu desa (Selengen) yang memprogramkan pembangunan MCK, dan satu desa (kayangan) yang memprogramkan pembangunan drainase (saluran air / irigasi).

Untuk tahun 2009, kedelapan desa di kecamatan Kayangan masih memprogramkan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), ada enam (6) desa disamping memprogramkan SPP juga memprogramkan pengerasan jalan, keenam desa yang dimaksud adalah ; desa Santong, desa Sesait, desa Pendua, desa Gumantar, desa banten Damae, desa Selengen, sedang desa Salut disamping program SPP, juga memprogramkan Perpipaian, dan desa Kayangan Penalutan.,

Untuk tahun 2010, kedelapan desa di kecamatan Kayangan masih memprogramkan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), desa santong disamping SPP juga masih memprogramkan pengerasan jalan, desa Sesait disamping program SPP, juga memprogramkan pelatihan menjahit, pengerasan jalan juga pembangunan damrah, desa Pendua disamping program SPP, juga memprogramkan pengerasan jalan, dan pembangunan jembatan, desa Gumantar di tambah dengan program peningkatan jalan, desa Salut menambah program Penalutan, desa Selengen disamping program SPP juga memprogramkan pembangunan Pos Yandu, dan desa Kayangan masih memprogramkan program yang sama dengan tahun sebelumnya.

Sedang untuk tahun 2011, bentuk implementasi program di kecamatan Kayangan di masing masing desa dapat di jelaskan sebagai berikut, ada tujuh (7)

desa yang masih memprogramkan SPP, hanya desa salut saja yang tidak memprogramkan SPP, ada enam desa (6) yang masih memprogramkan pengerasan jalan, dua desa yang tidak memprogramkan pengerasan jalan yaitu desa salut dan desa Kayangan, kedua desa ini masing - masing memprogramkan perpipaian (desa salut), dan pembangunan Pos Yandu (desa Kayangan).

Adanya perbedaan bentuk implementasi program PNPM untuk masing desa , ini disebabkan karena sesuai dengan kebutuhan didesa masing - masing. Terkait dengan hal ini Sekdes Salut, memberikan informasi mengenai bentuk implementasi PNPM di desanya sebagai berikut:

“... bentuk kegiatan PNPM masuk di Desa kami berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan bantuan sarana fisik berupa pasar desa, perpipaian, penyalutan, ...program ini sesuai kebutuhan desa kami. Jalan yang bagus diharapkan digunakan untuk mobilitas jual beli, perpipaian memberikan bantuan mendapatkan air bersih serta usaha simpan pinjam bagaimana dijalankan dengan niat yang baik untuk membantu permodalan usaha” (wawancara tanggal 13 Januari 2012).

Informasi diatas menunjukkan bahwa bentuk implementasi program PNPM di desa Salut seperti : Simpan Pinjam Perempuan (SPP), pembangunan pasar desa, Perpipaian Penyalutan, Penyalutan dan pengerasan jalan, tujuannya adalah agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk kegiatan - kegiatan produktif.

Selanjutnya Kaur Pembangunan Desa Salut, memberikan informasi sebagai berikut:

“Menurut saya, Desa Salut mendapatkan bantuan program PNPM, karena termasuk desa yang mempunyai penduduk miskin, pendidikan rendah dan aspek lain yang masih rendahSaya memastikan itu yang menjadi kriteria desa kami mendapatkan PNPM...dalam pelaksanaannya Saya melihat ada perpipaian....semoga masyarakat dapat lebih mudah dalam memperoleh air...seluruh program yang diusulkan berdasarkan

masuk banyak pihak...dana yang masuk cukup besar, bapak lihat ada jalan yang bagus, kalau dulu sangat jelek....

Kondisi jalan yang bagus, ada simpan pinjam untuk perempuan diharapkan ada kegiatan ekonomi masyarakat...banyak hal bisa dikerjakan....”(wawancara tanggal 13 Januari 2012).

Mempertegas informasi diatas Kaur Kesra Desa Salut , memberikan informasi tentang bentuk implementasi PNPM sebagai berikut:

“Dana yang masuk besar ...ada untuk fisik, pipa untuk saluran air, simpan pinjam di setiap dusun...saya yakin besar.

Satu hal yang saya yakini dari program ini...masyarakat dibantu pemilikan modal itu yang utama..., sehingga saya yakin dengan adanya bantuan tersebut orang akan bisa hidup layak...

....Peternak saja dapat lebih mudah membawa rumput, hasil panen dapat lebih mudah di bawa oleh pembeli dan lainnya” (wawancara tanggal 13 Januari 2012).

Informasi di atas sekilas memberikan pembuktian bahwa bentuk implementasi program PNPM berupa SPP, perpipaan, pengerasan jalan, semua program tersebut dapat memberikan kemudahan pada masyarakat dalam menjalankan aktifitas, seperti kemudahan masyarakat dalam kegiatan beternak, bertani dan lainnya. Kemudahan tersebut diharapkan juga menimbulkan ide atau semangat munculnya sikap – sikap perilaku produktif masyarakat lainya.

Selanjutnya Kades Selengen memberikan informasi mengenai bentuk implementasi PNPM:

“Program PNPM pilihan desa kami adalah pembangunan MCK, pengerasan jalan, dan usaha simpan pinjam perempuan... , setidaknya dengan fasilitas jalan yang bagus akan memudahkan anak ke sekolah, ada uang untuk menyekolahkan anak dari usaha orang tua”. (wawancara tanggal 16 Januari 2012).

Informasi yang disampaikan oleh Kades Selengen menjelaskan bahwa program PNPM di desanya berupa pembangunan MCK, pengerasan jalan dan usaha sipan pinjam perempuan (SPP), program ini di usulkan agar fasilitas jalan lebih baik Sehingga aktifitas masyarakat lebih baik dan memudahkan anak – anak ke sekolah.

Selanjutnya Kaur Kesra Desa Selengen memberikan informasi sebagai berikut:

“Program PNPM cukup banyak di Desa Selengen, seluruhnya hasil pertemuan warga di setiap dusun, pengerasan jalan yang bagus untuk kemudahan beraktivitas , ada simpan pinjam buat usaha...kalau masyarakat yang sudah ada usahanya, program ini sangat menyenangkan...”.

(wawancara tanggal 16 Januari 2012).

Informasi di atas menyatakan bahwa bentuk program PNPM merupakan usulan warga berupa pengerasan jalan, dan SPP, semua program itu sangat memberikan kemudahan masyarakat dalam beraktivitas dalam artian mobilisasi kesehariannya dan juga aktivitas ekonominya.

Sealanjutnya kaur Pembangunan Desa Selengen memberikan penjelasan bahwa :

“Kegiatan yang berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat adalah usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP)...tujuannya fokus untuk membina para perempuan (ibu) agar mempunyai kegiatan usaha....Program PNPM lainnya ada, seperti pengadaan sarana prasarana yang bukan hanya untuk periode sekarang, tetapi mempersiapkan anak-anak dan ibu yang sehat (posyandu)...”.

(wawancara tanggal 16 Januari 2012).

Informasi di atas menegaskan bahwa bentuk implementasi PNPM berupa SPP, program ini berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan kegiatan usaha,

selain itu juga bentuknya adalah membangun sarana prasarana yang berfungsi untuk mempersiapkan anak dan ibu yang sehat, dengan membangun pos yandu.

Dilain kesempatan peneliti mewawancarai Kaur Kesra Desa Kayangan berikut informasinya :

“Sebagai aparaturnya desa saya sangat bersyukur dengan adanya PNPM ...ada drainase, bagaimanapun pertanian dapat manfaatnya, jalan yang bagus dan lebar mempermudah saya membawa hasil panen dari dan ke rumah...ada posyandu, sehingga kesehatan anak dan ibu lebih dapat dikontrol...”. (wawancara tanggal 17 Januari 2012)

Informasi di atas memberikan penegasan bahwa program PNPM yang sedang dijalankan adalah drainase, pengerasan jalan, pembanguana pos yandu, semua program itu sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas.

Penggalian informasi dilanjutkan di desa Gumantar, untuk mencari bentuk implementasi PNPM dari wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa Gumantar , diperoleh informasi sebagai berikut :

“Karena fasilitas jalan yang ada di desa kami masih minim dan kurang bagus, maka perhatian diberikan pada aspek tersebut (perbaikan jalan)... Masyarakat kami memberikan usulan untuk perbaikan jalan, agar mudah ke kebun, sawah atau kegiatan ekonomi lainnya...dapat juga membuka ojek atau cidomo, jika jalan telah baik..saya rasa ini peluang...”. (wawancara tanggal 17 Januari 2012).

Informasi di atas memberikan masukan bahwa program PNPM yang sedang berjalan adalah perbaikan jalan , program ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengolah kebun dan sawahnya serta memudahkan mobilisasi hasil kebun dan sawahnya. Masyarakat juga memanfaatkan perbaikan sarana jalan seperti membuka usaha ojek, atau cidomo, peluang kegiatan ekonomi menjadi lebih besar.

Di wilayah pemerintahan Desa Sesait dilakukan wawancara dengan Kaur Pembangunannya berikut hasilnya :

“Melalui program PNPM khususnya SPP dapat dilakukan peminjaman modal untuk kegiatan tertentu yang dapat memberikan masukan bagi keluarga. Program SPP dibuat dengan pemikiran seperti itu, agar kaum perempuan dapat membantu keluarga dalam menghasilkan pendapatan. Hal yang saya perhatikan, banyak ibu rumah tangga yang mempunyai kemampuan membuat jajanan pasar (rengginang, kue basah) atau melakukan pengolahan kelapa menjadi minyak goreng. Pinjaman SPP dapat digunakan untuk memodali usaha tersebut. Ada ibu rumah tangga yang telah melakukannya sekarang ini, dengan adanya pengerasan jalan dapat mereka melakukan penjualan dengan mudah di pasar...Hal lain yang saya lihat terutama untuk para pemudi atau pemuda yang tertarik pada bidang modes, diberikan keterampilan menjahit. Dalam hal ini ada beberapa pemudi yang telah menjalankan usaha sebagai penjahit, karena memang ada dasar keterampilan dan ketertarikan, tinggal bagaimana menekuninya...”
(wawancara tanggal 20 Januari 2012)

Berdasarkan informasi diatas, usaha simpan pinjam di desa sesait yang menjadi programnya di harapkan dapat membantu ibu rumah tangga lebih kreatif dalam menghasilkan pendapatan, dengan berkreasi membuat produk yang bisa di jual, selanjutnya dengan adanya pelatihan menjahit juga di harapkan para pemuda dan pemudi dapat berkembang dalam menjalankan usahanya.

Usulan kegiatan pelatihan menjahit hanya terjadi di Desa Sesait, seharusnya juga menjadi usulan masyarakat desa lain dalam bentuk lain sesuai dengan potensi dan ketertarikan masyarakat. Kegiatan pelatihan bukan hanya bertumpu di masyarakat setempat, tetapi juga dapat dilakukan di tempat lain, agar dapat belajar dari perjuangan dan kerasnya hidup di daerah lain. Hal ini ditegaskan, karena pada kehidupan sosial ekonomi Kecamatan Kayangan, masih relatif mudah dengan hasil alamnya.

Di Desa Pendua berdasarkan observasi dan informasi dari aparat desa, bentuk kegiatan yang menjadi usulannya adalah pengerasan jalan (perbaikan dan pelebaran jalan), pembuatan jembatan dan usaha simpan pinjam. Keberadaan jembatan mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi, karena menghubungkan masyarakat desa dengan desa lain serta untuk kemudahan dalam memasarkan hasil produksi yang dimiliki. Kaur Kesra Desa Pendua menyatakan:

“Kondisi jalan yang rusak, jembatan penghubung dan masalah modal usaha (SPP), menjadi usulan dalam PNPM yang ada di desa Pendua. Seluruhnya usulan warga, sebenarnya masih banyak yang akan kami minta, tetapi harus yang sifatnya mendasar dulu. (wawancara tanggal 23 Januari 2012).

Informasi di atas relatif telah berulang, pemanfaatan simpan pinjam perempuan lebih dominan oleh perempuan yang awalnya telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif.

Bentuk implementasi PNPM di Desa Santong adalah pengerasan jalan dan simpan pinjam perempuan (SPP). Informasi tersebut diperoleh dari Sekdes Santong berikut hasil wawancaranya:

“Banyak bentuk kegiatan PNPM sebagai usulan masyarakat, bukan sebatas pengerasan jalan dan simpan pinjam, tetapi juga ada beasiswa, bantuan ibu hamil dan bantuan insentif untuk guru tidak tetap, pemberian makanan tambahan...sasaran kegiatan adalah keluarga atau individu dengan pendidikan yang rendah, kurang mampu,dan belum mempunyai pekerjaan tetap...”.(wawancara tanggal 23 Januari 2012).

Dari informasi diatas dapat dijelaskan bahwa selain bentuk implementasi program SPP, sarana prasarana juga ada bentuk lain yaitu pemberian beasiswa, bantuan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, program ini sasarannya adalah keluarga kurang mampu , siswa dari keluarga kurang mampu,dan ibu ibu hamil.

b. Peran Aparatur dan Masyarakat dalam Implementasi PNPM di Kecamatan Kayangan.

Peran aparatur dan masyarakat sangat jelas dalam implementasi kegiatan PNPM di masyarakat, hal ini terlihat jelas pada setiap aplikasi PNPM di masing-masing desa. Hasil wawancara kami dengan Sekdes Salut di dapatkan informasi sebagai berikut :

“Pemerintah desa juga mempunyai keterlibatan yang tinggi dalam pelaksanaan program PNPM, bukan dalam makna aparaturnya saja, tetapi juga makna masyarakatnya. Masyarakat penerima, pemuda, tokoh masyarakat mempunyai fungsi, terlebih jika desa memasukkannya dalam unit kerja, maka dipastikan akan terlibat dalam pelaksanaan PNPM”.
(wawancara tanggal 13 januari 2012)

Informasi di atas menunjukkan bahwa dalam implementasi program PNPM melibatkan banyak pihak dalam pemerintah desa . Seluruh aparatur desa untuk setiap program selalu dilibatkan agar dapat memberikan kontribusi maksimal pada masyarakat. Program PNPM sifatnya nasional memberikan kepastian bahwa seluruh personal di pemerintahan desa terlibat, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Selanjutnya Kaur Kesra Desa Salut memberikan informasi tentang peran masyarakat terhadap implementasi PNPM, berikut hasil wawancaranya :

“PNPM sebagai andalan pemerintahan SBY dalam mengentaskan kemiskinan....kalau saya perhatikan banyak dana yang dialokasikan. Program ini berbeda dengan program lain yang pernah masuk di Desa Salut...banyak pihak yang terlibat...macam namanya, dan saya lihat masih ada sampai sekarang dari tahun 2008. Adanya banyak pihak yang terlibat...walaupun saya tidak tahu persis program ini, saya memberikan keyakinan bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan program yang ada.

Bapak Kepala Desa saya lihat sibuk terutama pada awal program, berhubungan dengan desa lainnya dan sering ke kantor camat...".
(wawancara tanggal 13 januari 2012).

Informasi diatas memberikan bukti bahwa dalam pelaksanaan PNPM di Desa Salut melibatkan banyak pihak mulai dari kepala desa, masyarakat desa dan beberapa pihak lainnya.

Selanjutnya Kades desa Selengen memberikan informasi tentang keterlibatan berbagai pihak dalam implimentasi PNPM di desanya, berikut hasil wawancaranya:

"...program ini melalui proses yang panjang.... menjadi usulan dari masyarakat atas rapat dusun....proses ini sangat panjang dan seksama, melibatkan banyak pihak, unsur desa, masyarakat, kecamatan dan petugas PNPM sendiri ". (wawancara tanggal 16 Januari 2012).

Informasi ini memebrikan bukti bahwa keterlibatan aparatur desa dan masyarakat desa begitu dominan, termasuk petugas PNPM yang bertugas di desa tersebut.

Memperkuat pendapat diatas dilakukan juga wawancara dengan Kaur Kesra desa selengen berikut hasil waancaranya :

"...Kerja pemerintah sangat besar dalam memperhatikan masyarakat, salah satunya melalui program PNPM...kami semua terlibat, mulai dari awal sampai sekarang ini...Pembelajaran penting dalam program PNPM terletak pada saat pengerjaan pengerasan jalan. Ada warga yang bekerja sebagai penyedia material pengerasan jalan...".
(wawancara tanggal 16 Januari 2012).

Informasi yang diberikan dapat merupakan bukti bahwa keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam implementasi PNPM dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sangat jelas sekali.

Hal yang senada juga disampaikan kaur Pembangunan desa Selengen tentang keterlibatan aparatur dan masyarakat desanya dalam kegiatan PNPM berikut hasil wawancaranya :

“ Banyak program bantuan yang masuk di desa kami...dulu kita kenal namanya IDT. Program PNPM ini jauh lebih banyak melibatkan kita sebagai pelayan masyarakat dan kerja yang beragam. Masyarakat melakukan pertemuan untuk menentukan jenis kegiatan atau bantuan yang masuk ke desa. Ada pedoman dalam mengajukan usulan (batuan dari fasilitator)...”
(wawancara tanggal 16 januari 2012).

Hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti bahwa keterlibatan masyarakat dalam implementasi program PNPM begitu jelas, mulai dari tahap sampai dengan pelaksanaan dengan didampingi aparatur desa dan petugas PNPM di desa tersebut.

Penggalan informasi kami lakukan di desa Kayangan, dengan mewawancarai kaur umum desa Kayangan, berikut informasi :

“Kerja maksimal telah dilakukan oleh semua pihak pada program PNPM yang ada di Desa Kayangan. Saya memastikan kerja tersebut sesuai dengan pedoman kerja, karena bukan hanya orang Desa Kayangan yang bekerja, ada juga fasilitator PNPM. Pengawasan kerja dari awal sampai realisasi proyek dijalankan dengan baik, termasuk inpeksi dari bapak camat. Bapak kepala desa juga melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi pelaksanaan proyek dengan desa lainnya...”.(wawancara 17 januari 2012).

Informasi diatas dapat dijadikan bukti bahwa keterlibatan semua pihak mulai dari kepala desa, camat dan petugas PNPM sangat jelas sekali dan dilakukan dengan maksimal pada setiap kegiatan PNPM.

Selanjutnya penggalian informasi dilanjutkan di desa Gumantar, Sekdes desa Gumantar memberikan informasi sebagai berikut :

“Pada saat sosialisasi sampai realisasi proyek PNPM saya ikuti...kami aparat desa sebagai pengawas, pengkoordinir sesuai juga dengan perintah yang diberikan oleh bapak kepala desa. Ada dua kegiatan utama yang dijadikan usulan desa kami , yaitu perbaikan jalan dan simpan pinjam perempuan...seluruhnya dijalankan dengan proses yang sesuai, karena ada pengawasan dari semua pihak, masyarakat, petugas, pemerintah camat dan lainnya...”
(wawancara tanggal 17 januari 2012).

Informasi ini memberikan gambaran bagaimana keterlibatan aparatur desa dalam pelaksanaan PNPM didesa Gumantar mulai dari tahap sosialisasi, dan tahap pelaksanaan kegiatan PNPM. Pendapat senada juga disampaikan oleh Kaur Kesra desa Gumantar, berikut informasinya :

“Pada saat sosialisasi ditegaskan bahwa yang menjadi penentu kegiatan PNPM adalah masyarakat, disesuaikan dengan arahan fasilitator agar kegiatan tersebut dapat secara nyata mengatasi masalah yang ada... ”
(wawancara tanggal 17 Januari 2012).

Selanjutnya penggalian informasi dilakukan didesa Banten Damae, Informasi yang didapat dari Sekdes Banten Damae adalah sebagai berikut :

“Program PNPM telah dijalankan dalam kurun waktu 2008, mulai dari kerja sosialisasi...sekarang sebagian proyek telah tuntas, berarti berada pada tahap pemeliharaan...seluruh program atas dasar usulan masyarakat, berkonsultasi dengan tim dari PNPM...kepala desa dan camat juga memberikan bantuan dalam kerja PNPM...”
(wawancara tanggal 20 januari 2012).

Informasi ini mempertegas tentang keterlibatan seluruh aparatur desa dan masyarakat dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan dan pemeliharaan.

Informasi tentang program kegiatan PNPM mulai dari konsep, pelaksanaan, pemeliharaan, dan implementasinya bagi masyarakat telah dijabarkan, baik pada tingkat pemerintahan Kecamatan, tingkat desa dan tingkat dusun. Ragam informasi diperoleh, seluruhnya menjurus pada pemanfaatan program dapat diperoleh masyarakat. Informasi lainnya adalah peran masyarakat untuk memanfaatkan peluang yang ada cukup tinggi dengan adanya perbaikan kondisi sarana prasarana.

c . Implikasi Program PNPM dalam Penciptaan Perilaku Produktif Masyarakat di Kecamatan Kayangan.

Implementasi Program PNPM di Kecamatan Kayangan telah berjalan kurang lebih empat tahun sejak pelaksanaan kegiatan aktual di mulai. Implementasi program PNPM telah dapat dipersepsikan oleh masyarakat terutama dalam penciptaan perilaku produktif, yaitu guna memecahkan permasalahan kemiskinan, baik pada saat ini atau pada masa yang akan datang. Penegasan ini diperlukan, karena ragam program PNPM tidak hanya berupa penciptaan ekonomi produktif saat ini, tetapi juga menyiapkan generasi yang sehat dan cerdas sebagai pondasi untuk menghindarkan masyarakat dari kemiskinan.

Berhubungan dengan hal di atas, dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mendapatkan langsung program PNPM di desa Kayangan, berikut daftar responden :

Tabel 4.11. Daftar Responden Penerima Program PNPM di Desa Kayangan.

NAMA	UMUR	JK	PEND.	PEKER-JAAN	JENIS BANTUAN
Maesarah	35	p	SMA	Dagang	S P P
Junisah	30	p	SMA	Dagang	S P P
Rodi	27	l	S1	GTT	Honor GTT
Qiswari	27	P	S1	GTT	Honor GTT
Anto	32	L	SMP	BRT	Penalutan
Rohaniah	32	P	SD	IRT	GSC (Ibu Hamil)
Muliatun	30	P	SD	GTT	Honor GTT
Kalinda	16	P	SMP	Pelajar	GSC (Beasiswa)
Arman	16	L	SMP	pelajar	GSC (Beasiswa)
Huriati	35	P	SMP	IRT	GSC (Beasiswa)

Sumber : Data primer

Seorang penerima program PNPM berinisial Msh (pedagang, warga Desa Kayangan), memberikan informasi sebagai berikut:

“Pada awal pelaksanaan kami dikumpulkan oleh petugas PNPM, termasuk dapat saya peroleh manfaatnya secara langsung, ada bantuan modal untuk memperbesar dagang saya (kios)...saya menjadi lebih rajin dalam bekerja, ada harapan karena kami lebih mudah berbelanja barang dan ada tanggung jawab untuk melakukan iuran. Dibilang ada peningkatan ya bisa, saluran air bagus, jalan bagus, ibu hamil dibantu dan saya sendiri ada pinjaman modal...saya menjadi optimis dalam melkukan usaha saya”.(wawancara tanggal 23 Januari 2012).

Dari informasi diatas dapat disimak bahwa, responden penerima PNPM tersebut memperoleh manfaat secara langsung, yaitu dapat memperbesar usahanya dan membuat hari – harinya menjadi lebih bersemangat, artinya terlihat ada proses pembentukan perilaku kearah yang lebih baik (positif).

Selanjutnya Jnh (Dagang), informasinya sebagai berikut:

“Saya sendiri beryukur ada PNPM, ada bantuan modal, jalan bagus, dan ada kemudahan lainnya. ...Insya Allah ada perbaikan, ada kesempatan, termasuk saya sendiri mau belajar membuat jajan kering untuk saya jual ke pasar...sedang saya pelajari cara membuatnya...”

Bantuan yang kami terima bukan hanya bantuan modal tetapi juga kondisi sarana prasarana yang semakin baik, sangat memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha sehingga saya semakin bersemangat dalam menjalankan usaha saya ”.
(wawancara tanggal 23 Januari 2012).

Informasi dari responden ini menunjukkan terjadi perubahan perilaku dari tadinya tidak mau belajar untuk membuat jajan, menjadi mau belajar membuat jajan, artinya penerima Program PNPM itu sudah menunjukkan ada perubahan perilaku ke arah yang positif.

Pada individu (keluarga) yang telah mempunyai kegiatan ekonomi, peran PNPM sangat memberikan manfaat, terlebih dengan adanya bantuan modal. Manfaat penting lain yang dirasakan adalah adanya sebagian masyarakat yang mendapatkan peran sebagai guru tidak tetap. Hal ini terjadi pada Rd dan Qsi sama-sama berpendidikan sarjana menjadi GTT. Informasi yang diberikan kedua responden relatif sama, berikut hasil wawancaranya :

“...Keberadaan program PNPM memberikan manfaat yang banyak bagi diri kami terutama kami lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas ... karena Alhamdulillah ada insentif dari PNPM ”.
(wawancara tanggal 23 Januari 2012).

Adanya program PNPM GSC juga sangat terasa pengaruhnya di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dapat menyiapkan generasi yang lebih cerdas yaitu dengan memberikan makanan tambahan, kesehatan ibu hamil lebih terkontrol , tempat belajar yang memadai.

Untuk membuktikan konsep ini kami melakukan wawancara dengan beberapa responden berikut hasilnya : Rnh (ibu rumah tangga Desa kayangan) memberikan informasi:

“Program PNPM sampun kami wikanang lengan beberapa taun niki...tiang kebagian program ibu hamil...sampun araq manfaat...ndeq tiang khawatir ... sampun te biayaq lengan kesehatan tiang kance anak tiang niki (keberadaan program PNPM telah diketahui dalam beberapa tahun terakhir...yang bersangkutan mendapatkan program GSC ibu hamil, sehingga ada jaminan pelayanan kesehatan ibu dan anak).

Mudah-mudahan PNPM niki terus araq..adegne molah batur si lain...mun tiang sampun melahirkan tiang mau keang alat KB spiral (yang bersangkutan mengharapkan program PNPM terus berlanjut agar ibu hamil lainnya mendapatkan pelayanan, adapun yang bersangkutan akan menggunakan KB-spiral untuk lanjutannya”.

(wawancara tanggal 23 Januari 2012).

Dari informasi di atas dapat di lihat bahwa responden penerima PNPM tersebut Nampak begairah, bersemangat dalam megurus kesehatan, kehamilanya dan anaknya karena ada bantuan dari Program PNPM GSC, ini artinya ada perilaku positif responden dalam upaya memelihara kesehatannya diri dan anaknya, ini akan berdampak terhadap kesehatan diri dan anaknya.

Konteks di atas pada dasarnya telah muncul perilaku positif dari responden, setidaknya dalam melakukan pengelolaan atas keluarganya.

At (buruh tani.) memberikan informasi sebagai berikut:

“Selama pembangunan jalan, drainase, pokoknya ada proyek di desa (proyek PNPM) saya selalu ikut menjadi buruh, kita dapat upah setiap hari. berbeda dengan buruh tani yang musiman...tapi kalau saya lihat manfaatnya bukan hanya pada saat ada proyek, tetapi juga besok-besok akan mudah bagi kita dalam beraktivitas....”.

(wawancara tanggal 23 Januari 2012).

Jawaban responden ini menggambarkan betapa bersemangatnya dalam menjalankan kehidupan manakala ada program PNPM, bagaimana tidak dengan adanya program PNPM responden dapat mengambil keuntungan yaitu mendapatkan upah dari keterlibatannya pada proyek PNPM.

Ada kemudahan yang diperoleh masyarakat dengan adanya program PNPM, termasuk kemudahan dalam mendapatkan pendidikan. Hrt (ibu rumah tangga) menyatakan:

“Kalau ada orang yang menyatakan tidak ada manfaat dari PNPM, saya pastikan orang itu tidak pandai bersyukur....saya sendiri dengan adanya PNPM anaknya saya mendapat beasiswa...jadi berbagai keperluan sekolahnya dapat dibiayai...”
(wawancara tanggal 23 Januari 2012)

Dari hasil wawancara diatas dapat di jelaskan bahwa responden memiliki keyakinan dan termotivasi untuk menyekolahkan anaknya karena beberapa kebutuhan dan biaya sekolah anaknya dapat tertanggulangi dengan adanya program PNPM.

Wawancara kembali kami lakukan dengan beberapa penduduk di Desa Kayangan yang bersentuhan langsung dengan program PNPM yang telah dilakukan, seluruh informan menyatakan bahwa, program PNPM mempunyai manfaat baik pada saat ini dan periode yang akan datang, setidaknya kemudahan dalam melakukan aktivitas dengan adanya kondisi sarana prasarana yang baik. Kondisi masyarakat yang sehat, pendidikan yang lebih baik dan kondisi lingkungan yang baik, seluruh potensi tersebut membangun semangat dan berdampak terhadap perubahan perilaku masyarakat kearah yang lebih baik (produktif).

Penciptaan perilaku produktif menjadi sangat penting, sehingga program PNPM memberikan manfaat yang tidak terhingga bagi perekonomian masyarakat, baik secara individual ataupun kelompok.

Pembentukan kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung dari pola pikir dan aktivitasnya, jika berkeinginan untuk berubah maka saat ini dapat menjadi momentum dalam menciptakan kegiatan ekonomi produktif. Kondisi jalan yang baik

dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Misalnya cukup dengan bermodal sepeda ontel untuk jual beli ayam kampung ke luar desa.

Pengamatan peneliti, harga berbagai komoditas di Desa Kayangan relatif murah, sehingga menjadi kesempatan untuk melakukan pembelian dan menjualnya di desa lain, misalnya sekitar Kecamatan Bayan dan Tanjung. Di sampaikan demikian, karena di Kecamatan Bayan terdapat banyak bisnis penginapan yang membutuhkan hasil bumi segar, termasuk unggas.

Selanjutnya untuk menggali lebih jauh tentang program PNPM dalam pembentukan perilaku produktif peneliti melakukan observasi dan sekaligus melakukan wawancara di Desa Sasait. Wawancara dilakukan pada kisaran tanggal 24-29 Januari, berikut identitas dari responden serta kegiatan yang diperoleh dari program PNPM.

Tabel 4.12. Daftar Responden Penerima Program PNPM di Desa Sasait.

NAMA	UMUR	JK	PEND.	PEKER-JAAN	JENIS BANTUAN
Muriati	28	P	SMA	Dagang	S PP
Karudi	30	L	SMA	IRT	Honor Kader
Taat	36	P	SMA	Kadus	Penalutan.
Aeniwati	30	P	SMA	Penjahit	Pelatihan Menjahit
Iniah	25	P	SMA	Dagang	S PP
Anjung R.	25	P	SMP	IRT	Transpot Ibu Hamil
Muliati	30	P	SMA	Dagang	S PP
Surniah	35	P	SMP	Dagang	S PP
Saminep	30	P	SD	Dagang	S PP
Riski W.	15	L	SMP	Siswa	Beasiswa

Sumber : Data primer

Sepuluh orang responden di atas memberikan informasi bahwa program PNPM sangat bermanfaat bagi diri dan keluarganya, berimbas secara langsung atau

tidak langsung pada aspek ekonominya. Responden yang dapat memunculkan kegiatan ekonomi dengan adanya program PNPM adalah Mi, Ai, Ih, Mi, Sh dan Sp., Sebelum ada program PNPM semuanya tidak mempunyai aktivitas ekonomi, hanya sebagai ibu rumah tangga. Tapi setelah adanya bantuan berupa program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM, maka mereka memulai untuk beraktivitas dengan berdagang kecil – kecilan, ini berarti mereka sudah mengalami perubahan perilaku yang tadinya hanya sebagai ibu rumah tangga kini menjadi ibu rumah tangga plus berwiraswasta kecil – kecilan.

Berikutnya Informasi diperoleh dari informan Taat (kadus), beliau yang semula hanya petani dapat memunculkan bisnis baru, yaitu leveransir bahan penalutan dan perbaikan jalan selama empat tahun terakhir. Adanya kesempatan dan dukungan modal yang dimiliki, selanjutnya menjadi pekerjaannya saat ini, artinya juga telah terjadi perubahan kearah yang lebih baik.

Informasi yang diperoleh dari sepuluh orang di atas relatif seragam, yaitu diperoleh manfaat langsung dari keberadaan program PNPM. Wawancara dilakukan kembali dengan Nrd (warga Desa Sesait), sebagai berikut:

“Saya baru pulang merantau dari Bali, di sana semua orang bekerja dengan keras, giat, pagi-pagi sudah ke sawah....setelah saya pulang sekarang ada perubahan di desa ini, jalan sudah bagus, kebetulan saya punya kebun...jadi sekarang mudah ke kebun dengan sepeda motor, dulu sulit harus jalan kaki, karena jalan menanjak dan berbatu... Mungkin sekarang saya akan tinggal di desa, mengolah kebun, isteri saya suruh buat minyak goreng dan pekerjaan lain...saya sendiri akan menjadi pengepul ayam untuk saya masukkan pada penjual ayam bakar di Tanjung...ini saya sedang membuat kandang, juga sambil beternak....di Bali banyak yang kita lihat saya coba jalankan disini....”(wawancara tanggal 25 Januari 2012).

Kondisi sarana prasarana yang telah baik di Desa Sesait ditambah dengan pengalaman di daerah lain serta keinginan untuk melakukan perubahan (*change*) menjadi kombinasi yang sangat penting untuk menciptakan perilaku produktif.

Responden tersebut bukan lagi sedang mengutarakan ide, karena faktanya sedang menyiapkan kadang untuk ternak sendiri dan untuk penampungan ayam kampung yang selanjutnya didistribusikan di Kecamatan Tanjung. Kesadaran untuk berubah dengan melihat peluang yang ada memberikan hasil yang baik untuk kehidupan ekonomi keluarganya, walaupun yang bersangkutan tidak mendapatkan bantuan langsung dari kegiatan PNPM.

Kegiatan program PNPM diharapkan menghasilkan perubahan perilaku, bukan semata-mata menyatakan manfaat PNPM, karena mendapatkan bantuan langsung. Dalam konteks ini Fasilitator dan pelaku implementasi PNPM lainnya diharapkan untuk memunculkan nilai tersebut, sehingga program PNPM ini mendapatkan implikasi positif secara berkelanjutan. Hal ini ditegaskan karena tidak ada jaminan program PNPM yang mendapatkan bantuan sarana prasarana, makanan tambahan, beasiswa dan honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan lainnya secara terus menerus memperoleh bantuan dari PNPM.

Selanjutnya peneliti mencari informasi di desa Pendua, dengan melakukan wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Pendua. Diambil sepuluh orang yang terlibat langsung sebagai penerima program PNPM, berikut paparannya melalui tabel:

Tabel 4.13. Daftar Responden Penerima Program PNPM di Desa Pendua.

NAMA	UMUR	JK	PEND.	PEKER- JAAN	JENIS BANTUAN
B. Rina	30	P	D3	IRT	S P P
Tina Erlina	24	P	S1	GTT	Honor GTT
Eva Suviana	14	P	SMP	IRT	Beasiswa
Rena Siska L.	14	P	SMP	Siswa	Beasiswa
Erlina	25	P	SD	IRT	Transport Ibu Hamil
Wiwin	14	P	SMP	Siswa	Beasiswa
Nurmisah	40	P	SD	IRT	S P P
Andri M.a	14	L	SMP	Siswa	Beasiswa
B.Apriana	22	P	SMP	IRT	(Honor Kader)
Marpiani	26	P	SD	IRT	PMT

Sumber : Data primer:

Dari Tabel di atas ditemukan empat orang yang mendapatkan bantuan program PNPM GSC, fakat pada pemberian beasiswa. Bantuan ini diharapkan menjadi motivasi anak untuk sekolah dan orang tua tidak terbebaskan dengan berbagai biaya. Informasi dari keempat responden dan sekaligus orang tuanya adalah bersyukur dengan adanya program PNPM. Konteks ini dapat menciptakan perubahan perilaku untuk kegiatan pendidikan keluarga, diharapkan generasi yang akan datang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk berkehidupan, khususnya aspek ekonomi yang lebih baik.

Orang tua anak-anak tersebut masih mempunyai sikap menerima, tidak malu dan menjadi motivasinya dalam menggerakkan potensi diri agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan pendidikan bagi anak. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan salah satu penerima bantuan sebagai berikut:

"...mun tiang adeqne jari pacunte begawaian..ndeq te smelte tuleng biaya sekolah anaq...ndaqne jari males te...adeqne jari lahan te beramal...mbiayaq anaq sekolah nike amal ibadah...ndeq te smel jari dengan umane le bawaq... (pemberian konsep bahwa bantuan yang

ada bukan membuat malas dalam bekerja, tetapi harus ada budaya malu sebagai penerima. Sekolah anak pada dasarnya adalah kewajiban orang tua, sehingga akan muncul sebagai amal ibadah, memberi lebih baik dari menerima)” (, wawancara tanggal 25 Januari 2012).

Beliau masih aktif dalam melakukan aktivitas ekonomi sebagai petani, baik di sawah dan kebun. Kerja keras dilakukan setiap hari dan memberikan pembelajaran pada anak-anaknya atas konsep tersebut.

Konsep kerja keras menjadi sangat penting bagi keluarga penerima program PNPM yang ada di desa. Konsep berpikir ini menjadi sangat penting untuk dikembangkan pada masyarakat PNPM, cepat berbenah dengan melakukan aktivitas guna menciptakan peluang pekerjaan yang dapat membantu keluarga lebih sejahtera.

Masyarakat Desa Santong mempunyai indikasi sesuai dengan konsep di atas. Hal ini dilihat dari munculnya ibu rumah tangga yang mempunyai kegiatan ekonomi produktif melalui bantuan modal PNPM. Identifikasi responden penerima PNPM di Desa Santong direkapitulasi sebagai berikut:

Tabel 4.14. Daftar Responden Penerima Program PNPM di Desa Santong.

NAMA	UMUR	JK	PEND.	PEKER-JAAN	JENIS BANTUAN
Rusmini	28	P	S1	IRT	(PMT)
Salmiah	30	P	SD	IRT	Beasiswa
Warniatun	32	P	SD	Dagang	S P P
Erlin	40	P	SD	Dagang	S P P
Nurhayati	38	P	SD	Dagang	S P P
Ristiana	32	P	SMA	Dagang	S P P
Asih	45	P	SD	Dagang	S P P
Hadijah	35	P	MTs	Dagang	S P P
Isah	45	P	SD	Dagang	S P P
Muhun	45	P	SD	Dagang	S P P

Sumber : Data primer

Dari data di atas di dapatkan dua responden yang mendapatkan faket PNPM GSC, berupa Pemberian Makanan Tambahan, dan Beasiswa, dan delapan mendapatkan faket PNPM Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Untuk menggali bagaimana respon masing – masing penerima program PNPM, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden , berikut hasil wawancaranya :

“... Ya saya punya anak kecil umur tiga tahun, kami sudah di berikan Makanan tambahan dari desa, katanya sih program PNPM, dan Alhamdulillah saya senang, anak saya nampak lebih sehat dan gesit...”. (wawancara tanggal 10 Pebruari 2012)

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Responden Sh, (IRT), yang mendapatkan paket Beasiswa, berikut informasinya :

“Anak saya sekarang selalu merasa senang ke sekolah, bagaimana tidak lewat program PNPM, ia dapat baju, tas, buku dan sepatu, saya sendiri bersyukur karena kebutuhan sekolah anak saya dapat dipenuhi, saya berpikir bagai mana seandainya kalau tidak ada program PNPM, atau programnya berhenti..., saya harus berbuat sesuatu untuk mengantisipasi hal tersebut.”. (wawancara tanggal 10 Pebruari 2012)

Dari informasi kedua responden di atas dapat di nyatakan bahwa keduanya memiliki semangat, dan motivasi, berbeda dengan sebelum adanya sentuhan Program PNPM, artinya ada perubahan perilaku, bahkan responden kedua membuat komitmen pada dirinya untuk melakukan persiapan manakala program PNPM dihentikan.

Bantuan program PNPM yang didukung dengan pendekatan (penyuluhan) yang diberikan oleh fasilitator memunculkan ibu rumah tangga dengan pendidikan umum SD berani mengambil sikap untuk melakukan aktivitas sebagai dagang. Kesempatan ini muncul dengan adanya pasar dan didukung dengan kondisi jalan antar desa yang telah baik, sehingga dapat melakukan dan meningkatkan aktivitasnya. wawancara peneliti lakukan kepada ketujuh responden yang berlatar

belakang pendidikan SD, jawaban mereka sama yaitu, ingin merubah kondisi ekonomi kearah lebih baik, kebetulan ada bantuan dari pemerintah (program PNPM), dan juga didukung dengan sarana prasarana yang tersedia (pasar, jalan yang baik). Jawaban mereka menunjukkan adanya aktivitas perubahan perilaku dari yang tadinya tidak ada aktivitas usaha menjadi aktivitas berdagang.

Penggunaan atau pemanfaatan program PNPM di masyarakat Desa Santong, bukan hanya oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung, baik berupa bantuan modal ataupun program GSC, Kebermanfaatan program PNPM juga dirasakan oleh wrga yang tidak menerima langsung. Wawancara dilakukan dengan Mdi (tukang bangunan) berikut informasinya :

“Saya tidak mendapatkan bantuan langsung dari PNPM, kemarin saya kerja di Desa Pendua, sekarang jembatannya sudah bagus, kami bisa dengan cepat menumpuh perjalanan, maklum saya ini tukang, terkadang orang membayar kerja kita harian kalau datang tepat, pulang tepat, orang yang kita kerjakan rumahnya senang, jadi dengan adanya Program PNPM ini memberikan manfaat buat saya, dan juga orang ”.
(wawancara tanggal 12 Pebruari 2012).

Informasi yang diperoleh di atas memberikan pembuktian bahwa warga yang tidak memperoleh program PNPM secara langsung juga memberikan penilaian bahwa program PNPM memberikan kemudahan dan keuntungan dalam menjalankan aktivitas, aktivitasnya menjadi lebih bermakna, gairah bekerja menjadi meningkat.

Penelusuran informasi kembali dilakukan di Desa Selengen, di Desa Selengen juga kami ambil beberapa responden yang akami seraf informasinya, berikut ini adalah daftar responden di Desa Selengen :

Tabel 4.15. Daftar Responden Penerima Program PNPM di Desa Selengen

NAMA	UMUR	JK	PEND.	PEKERJAAN	JENIS BANTUAN
Setiasip	40	P	SMP	IRT	S P P
Nurjanah	40	P	SD	IRT	Transpot Ibu Hamil
B.Herawati	39	P	SMA	IRT	S P P
B. Sunarianti	30	P	SI	GTT	Honor Kader
Rabiat	14	P	SMP	Siswa	Beasiswa
Ria Juli. A.	15	L	SMP	Siswa	Beasiswa
Ahmad Kardi	29	L	SI	GTT	Honor GTT
Sumeti	30	P	SD	Dagang	S P P
Karianep	32	P	SD	Dagang	S P P
Maesaroh	39	P	SD	Dagang	S P P

Sumber : Data primer; wawancara pada tanggal 13-15 Februari 2012.

Responden di atas ada yang telah mempunyai kegiatan ekonomi dan ada yang baru memulai setelah mendapatkan program PNPM, Rata rata responden di atas memberikan informasi yang sama, seluruhnya mempunyai persepsi yang positif terhadap kondisi ekonomi, sosial yang ada serta dalam membentuk perilaku produktifnya. Program PNPM telah mampu memberikan inovasi bagi penerima bantuan dalam menciptakan kegiatan yang dapat memberikan bantuan aliran kas masuk bagi keluarganya.

Berikut dilakukan wawancara dengan individu yang tidak mendapatkan program GSC dan tidak menggunakan fasilitas SPP dalam kegiatan ekonominya.

Rbb (dagang-kios,) berikut informasinya :

“Tiang jalanin ne kios lebih sepulu taun, untung ne bagus rureng niki beleq manfaat ne le tiang (saya telah menjalankan usaha dagang kios ini lebih dari sepuluh tahun, untung jalan ini sudah bagus besar manfaatnya buat saya ”. (wawancara tanggal 16 Februari 2012).

Pesan penting yang diberikan dari responden di atas adalah manfaat PNPM bukan hanya bersifat langsung pada individu, berupa bantuan kredit modal, bantuan

pendidikan dan kesehatan atau menjadi GTT. Bagi yang bersangkutan nilai positif yang diterima adalah kemudahan dalam melakukan mobilitas ekonomi dengan adanya kondisi jalan yang memadai.

Masyarakat perlu secara sadar untuk melakukan perubahan atas kondisi perilaku awalnya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.

Mrf (pedagang ayam) memberikan informasi, berikut informasinya :

“Sampung tiang dengar program PNPM niki...tiang percaya leq pemerintah pada melene minang ite senang, ndag te susah...Selama niki ndeg tiang uah milu rapat...tiang sibuk leq usahanya tiang niki, kelem wah lelah ite...jari tiang langsung tidur mesare...tiang laek keliling mete manug lelah ite ngadu sepeda...makin leq selapug desa sampun rorong bagus, araq kemudaa'an leq tiang....”

(saya telah mendengar adanya program PNPM ini, Tiang percaya pemerintah berkemauan untuk membuat kita senang, jangan merasa susah.... Selama ini saya tidak pernah ikut rapat....saya sibuk dengan usaha saya ini.... Malam saya sudah kecapean....jadi langsung tidur....saya dulu keliling cari ayam cape dengan sepeda....sekarang di semua desa sudah bagus jalannya, ada kemudahan buat saya....”
(wawancara tanggal 16 Febbrauari 2012).

Responden memberikan informasi bahwa program PNPM telah memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Informasi dari responden berikut perlu juga dijadikan sebagai alternatif dalam menyikapi program PNPM. Whd (dagang):

“Syukur ada program PNPM ... saya sendiri bersyukur dengan adanya jalan yang baik ... aktivitas pulang pergi saya dalam menjalankan ekonomi dagang di pasar lebih baik, setiap hari saya melakukan kegiatan berdagang di setiap pasar desa, dengan adanya perbaikan jalan di masing – masing desa sangat besar pengaruhnya terhadap kelancaran usaha saya, saya merasa terbantu, saya semakin semangat dalam menjalankan usaha saya”.

(wawancara tanggal 16 Februari 2012).

Dari hasil wawancara di atas, memberikan gambaran bahwa semua masyarakat mendapatkan manfaat dari adanya program PNPM, masyarakat menjadi lebih bergairah dalam melakukan aktivitas, ini menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dapat juga dikatakan bahwa dari hasil wawancara di atas bahwa hasil pembangunan yang ada hendaknya mendapatkan perhatian masyarakat untuk digunakan secara maksimal dan melakukan pemeliharaan agar nilai dan waktu manfaatnya tinggi.

Semua desa di Kecamatan Kayangan mendapatkan program PNPM dengan konsep mandiri pedesaan dan generasi sehat dan cerdas. Hal ini sebagai sebab adanya bantuan simpan pinjam, pembangunan sarana prasarana serta bantuan untuk pendidikan. Hal ini juga terjadi di Desa Salut, berikut di sampaikan sepuluh responden yang mendapatkan bantuan program PNPM langsung di Desa Salut:

Tabel 4.16. Daftar Responden Penerima Program PNPM di Desa Salut

NAMA	UMUR	JK	PEND.	PEKER-JAAN	JENIS BANTUAN
Jumadil	26	L	SMP	Tani	Perpipaan
Asti Hariani	27	P	D3	IRT	PMT)
Helmi. U	26	P	S1	GTT	Honor GTT
Kt. Mustiani	40	P	SMA	Tani	Honor Kader
Hartono	27	L	SMA	Tani	Perpipaan
Subhan	40	L	SMP	Tani	Perpipaan
Luh Suartini	48	P	SMP	Dagang	S P P
Kdk. Suratni	35	P	SD	Dagang	S P P
Surtini	30	P	SD	IRT	Transpot Ibu hamil
Sumaini	30	P	SD	IRT	Beasiswa

Sumber : Data primer; wawancara pada tanggal 18-20 Pebruari 2012.

Sepuluh responden di atas terlibat langsung dalam program PNPM, baik dalam pelaksanaan kerja proyek ataupun mendapatkan bantuan atas program yang ada. Seluruh responden memberikan persepsi yang positif serta memberikan nilai tambah atas aktivitas perilaku ekonomi dan sosialnya. Responden yang mendapatkan program langsung telah menyatakan pendapat yang sama, bahwa program PNPM memberikan pengaruh positif atas kegiatan yang selama ini dilakukan, dalam makna mampu memberikan nilai terhadap perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik (positif) yang berimbas kepada kegiatan ekonomi produktif.

Dalam memberikan penguatan atas program di atas berikut dilakukan wawancara pada masyarakat yang tidak terlibat langsung dengan proyek, baik selama pengerjaan proyek atau implikasi dari program yang ada. Sje (buruh bangunan):

“Selama ada program PNPM saya selalu bekerja di luar desa sebagai buruh bangunan, kadang sekali dalam satu bulan baru pulang kampung...Kalau saya lihat hasil pembangunan sudah merata di Kecamatan Kayangan, di Desa Salut ada saluran air pakai pipa, semuanya jelas memberikan manfaat untuk kesehatan dan kemudahan bagi masyarakat. Saya sendiri mempunyai pandangan, semua ini mempunyai manfaat, kalau jalan tidak baik sulit dalam transportasi tidak lancar. Ibu-ibu ada kegiatan melalui simpan pinjam ”.
(wawancara tanggal 18 Pebruari 2012).

Informasi di atas memberikan pandangan yang bernada positif atas program PNPM, terhadap pembentukan perilaku produktif masyarakat. Adapun masyarakat, berdasarkan observasi yang dilakukan, banyak mempunyai kegiatan usaha yang baru, baik sebagai pedagang, kegiatan usaha kue kering (jajanan tradisional), ada juga masyarakat yang mengolah lebih lanjut hasil kebun. Kondisi ini terjadi pada Inaq Musliha, Zaitun dan lainnya. Sesuai dengan informasi dari responden, pada dasarnya program PNPM mempunyai manfaat yang sangat banyak. Selanjutnya untuk lebih

meyakinkan peneliti kembali mewawancarai Htn (27 tahun, SMA) dan memberikan penegasan bahwa :

“Program PNPM jelas mempunyai tujuan atau sasaran agar bagi mana masyarakat dapat sejahtera,...tetapi bukan berarti pemerintah yang mengupayakan kerjanya, masyarakatlah yang harus menjalankannya....Banyak potensi yang ada di desa, terlebih setelah jalan bagus, jadi gampang memasarkan hasil produksi....saya sendiri selain jadi petani, saya memelihara sapi, itik dan unggas lainnya. Bapak bisa banyangkan harga anak ayam sekarang sudah mendekati Rp.20.000 per ekor, itik besar jantan saya sering jual pada hari raya harganya mencapai Rp.100.000 atau lebih..., jadi bagaimana mestinya kita memanfaatkan kondisi yang ada....Kerja keras kuncinya...berani mengambil keputusan....apalagi dengan semua warga punya halaman, kebun, walaupun tidak luas, merupakan potensi untuk dikembangkan....di sini masih rata-rata punya halaman, berbeda dengan kota.

Saya sendiri selama proyek perpipaan saya ikut jadi buruh, selama ada kesempatan ya...kita kerja”. (wawancara tanggal 18 Pebruari 2012).

Dengan adanya perubahan kondisi sarana prasarana menjadi lebih baik (jalan bagus), membuat responden terinspirasi dan termotivasi untuk memanfaatkan potensi yang ia miliki. Dengan adanya sarana jalan yang lebih baik dapat memperlancar kegiatannya dalam upaya memasarkan hasil produksi sawah, dan hasil produksi ternaknya. Informasi ini jelas memberikan gambaran bahwa bias dari program PNPM nampak yaitu, dengan telah terjadinya perubahan perilaku masyarakat kearah yang lebih baik (positif).

Peran program PNPM melalui kerja fasilitator dalam memberikan masukan atas kegiatan produktif masyarakat begitu penting untuk diwujudkan, dijalankan, dan selanjutnya masyarakat yang menjadi pemeran utama untuk melakukan aktualisasinya. Aktualisasi dapat berjalan dengan baik kuncinya adalah kemauan dan

kesadaran individu dalam memanfaatkan potensi yang ada, baik potensi diri ataupun potensi yang ada di masyarakat.

Sasaran dari program PNPM bukan untuk membuat masyarakat lapangan pekerjaan, terkait dengan selama pelaksanaan proyek sebagai wujud kegiatan insidental, maka untuk periode selanjutnya masyarakat diharapkan terbiasa dalam nuansa bekerja dengan menggunakan potensi diri dan masyarakat terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang produktif.

Pencarian informasi kembali dilakukan di Desa Banten Damae, khususnya dengan warga yang langsung mendapatkan program PNPM ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.17. Daftar Responden Penerima Program PNPM di Desa Banten Damae.

NAMA	UMUR	J K	PEND.	PEKER JAAN	JENIS BANTUAN
Endang	35	P	SMA	IRT	Honor Kader)
Megawati	39	P	SD	Dagang	S P P
Saebah	35	P	SMP	Dagang	S P P
Rahmin	37	P	SMP	IRT	Honor Kader
Juliana Rahmi	30	P	MTs	IRT	S P P
Yulia Hana P	10	P	SD	Siswa	Beasiswa
Seftini	26	P	SMA	IRT	Transpot Ibu Hamil
Teguh	14	L	SMP	Siswa	Beasiswa
Saparudin	22	L	S1	GTT	Honor GTT
Wisniwati	32	P	SMA	IRT	S P P

Sumber : Data primer; wawancara pada tanggal 20-25 Pebruari 2012.

Penilaian positif diberikan oleh responden, yang mendapatkan beasiswa, mereka optimis dalam menempuh pendidikan dan tidak takut akan *drop out*. Memperjelas keterangan di atas peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang penerima beasiswa yaitu Th.(siswa, 14 Thn), berikut informasinya :

“ saya sekolah di MTs di kelas delapan (8), selama sekolah saya mendapat bantuan dari pemerintah melalui desa (program PNPM), saya senang dan berjanji untuk tetap sekolah, saya tidak akan malas sekolah apa lagi berhenti, malu ... ”
(wawancara tanggal 20 Pebruari 2012).

Informasi ini menunjukkan bahwa akibat adanya bantuan besiswa dari program PNPM membuat siswa tersebut menjadi bersemangat dan optimis untuk belajar, sekolah. Pada diri anak tersebut ada semangat untuk menjalankan aktipitas sekolah. Dan pada diri anak tersebut sudah terbentuk semangat untuk berperilaku positif. Penyiapan generasi yang mempunyai potensi untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan sosialnya, dapat menjadi mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi masalah social masyarakat (kemiskinan).

Penggalian informasi selanjutnya peneliti laksanakan dengan mewawancarai Mgti (35 tahun), berikut informasinya :

“ Saya dapat informasi dari tetangga bahwa ada bantuan modal di desa khusus untuk perempuan ... Saya ikut daftar dan Alhamdulillah saya termasuk salah satu yang mendapatkan bantuan tersebut, ...kebetulan juga ada dana simpanan penjualan mente, maka dana bantuan saya gabung untuk membuka usaha kecil ...alhamdulillah ada kemajuan.”.
(wawancara tanggal 21 Pebruari 2012).

Keberadaan program PNPM melalui bantuan modal dan di tambah modal dari suami memberikannya pemikiran untuk berdagang di pasar. Hal ini memberikan pembuktian nyata bahwa ada kegiatan perilaku positif muncul berupa perilaku ekonomi produktif, tentu berawal dari kesadaran agar yang bersangkutan dapat membantu ekonomi keluarga dan keluar dari ketepurukan ekonomi (kemiskinan).

Hal penting yang diharapkan dalam hal ini adalah penciptaan perilaku, karena perilaku produktif ini mengarah pada penciptaan kegiatan ekonomi pada masyarakat.

Adanya kepastian aliran kas masuk, lambat laun akan semakin membesar, sehingga masyarakat secara umum terlepas dari kemiskinan.

Penggalian informasi dilanjutkan di desa terakhir, yaitu Desa Gumantar. Di desa ini program PNPM relatif tidak berbeda dengan desa lainnya. berikut di tampilkan responden Desa Gumantar sebagai berikut:

Tabel 4.18. Daftar Responden Penerima Program PNPM di Desa Gumantar.

NAMA	UMUR	JK	PEND	PEKER- JAAN	JENIS BANTUAN
Sukini	22	P	SMP	Dagang	S P P
Badrun	37	L	SMP	Tani	Honor Kader
Abdul Wahab	36	L	SMP	Tani	Honor Kader
Nikmah	22	P	SMP	IRT	Transpot Ibu Hamil
Ena Raudataun Aw.	14	P	SMP	Siswa	Beasiswa
Deltrawan Quro	15	L	SMP	Siswa	Beasiswa
Rumedi	35	L	S1	GTT	Honor GTT
Rus'an	22	L	S1	GTT	Honor GTT)
Suherni	25	P	SMP	IRT	PMT
Karnisah	25	P	SMP	Dagang	S P P

Sumber : Data primer; wawancara pada tanggal 24-28 Pebruari 2012.

Dari semua responden yang kami ambil semuanya menyatakan bahwa keberadaan program PNPM di desanya sangat positif dan sangat membantu pengembangan kehidupan ekonomi dan social masyarakat, mempertkuat keterangan ini kami melakukan wawancara dengan beberapa respoden berikut hasilnya :

Ski (22 tahun, dagang), Ia memeberikan informasi sebagai berikut :

“ ... isiq nyambung irup tiang laek, tiang jari buruh teni, pegawean niki sifatne musiman, lamun kenyengke musim mauk te bgawean, lamun kenyeken endek musim momot tiang, ...sukur tiang mauk bantuan lek PNPM , nane tiang endek te hawatir kerne arak usaha kodek-kodean tiang... (untuk menyambung hidup saya, dulu saya bekerja jadi buru tani, Pekerjaan itu sipatnya musiman, kalau sedang musim dapat kerja, kalau sedang tidak musim nganggur saya , jujur saja banyak nganggurnya, Sukur dapat bantuan dana dari PNPM.

(SPP), Sekarang saya tidak khawatir lagi seperti dulu karena ada usaha kecilan-kecilan saya....) ”.

(wawancara tanggal 24 Pebruari 2012).

Dari hasil wawancara di atas tergambar bahwa responden memiliki semangat untuk melakukan aktifitas ekonomi yaitu berjualan, semangat ini muncul sejak mendapatkan bantuan dana berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari program PNPM. Untuk memperkuat keterangan ini peneliti *cross check* dengan responden Knh (25 tahun, dagang), memberikan informasinya sebagai berikut :

“... Dulu saya pernah gagal dalam usaha dagang, karena kekurangan modal, sejak adanya bantuan modal dari PNPM, ... ya...masalah modal perlahan dapat teratasi, ... sekarang saya menjadi bersemangat dalam berusaha, karna kalau tidak begitu, saya tidak dapat mengembalikan cicilan pinjaman modal, doain pak yaa... biar lancar...”. (wawancara tanggal 24 Pebruari 2012).

Walaupun perjalanannya usahanya berjalan dengan perlahan, namun dari informasi yang di serap dapat di tangkap bahwa responden sudah terbangun motivasinya untuk berbuat, berusaha dengan lebih baik dan lebih gigih, ini berarti sudah nampak ada pembentukan perilaku positif pada responden.

Selanjutnya penelusuran dilanjutkan pada responden Brn (37 tahun Tani). Berikut informasinya :

“suka duka menjadi kader ada, tapi banyak dukanya,.... Salah satunya tidak bergaji,....karna sudah menjadi bagian pengabdian kami maka tetap laksanakan,.... Terkadang sering kami jalan untuk rapat,.... Mau ngojek ongkos tidak ada,....pernah saya mau berhenti.... Sekarang agak lebih baik, ada insentifnya, cukuplah untuk membiayai kegiatan, dan dapat memberikan semangat saya untuk berkerja ”.

(wawancara tanggal 25 Pebruari 2012)

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dengan adanya insentif dari PNPM untuk tenaga kader, membuat semangat kader bangkit untuk

melakukan aktivitas kerjanya, artinya ada perubahan perilaku kearah yang lebih baik.

Selanjutnya peneliti mencari menggali informasi dari responden Guru Tidak Tetap (GTT), yang mendapatkan Honor sebagai guru, berikut hasil wawacaranya :

“ Saya sudah tiga tahun mengajar sebagai guru honor, honor yang saya terima tergantung dari jumlah jam saya mengajar,... di bilang kurang yaa.... kurang, mau kita bilang apa, dan mau kerja apa, Dua tahun terakhir ini ada tambahan insentif dari adanya program PNPM yang masuk di desa kami.... Cukup memberikan gairah buat kami guru - guru honor...”.(wawancara tanggal 27 Pebruari 2012)

Menyimak informasi dari hasil wawancara di atas dapat memberikan gambaran bahwa adanya perubahan perilaku bagi guru honor yang mendapatkan insentif yang tadinya terkesan kurang bersemangat menjadi lebih bersemangat.

Pengentasan kemiskinan tidak hanya difokuskan pada keluarga yang ada sekarang, dalam makna pada individu yang telah tergolong umur produktif. Kemiskinan pada generasi sekarang sebagai implikasi kemiskinan orang tuanya, dapat saja lebih parah, karena faktor produksi yang ada sekarang telah mengalami pengurangan sebagai akibat bagi waris, sementara persaingan semakin kompetitif dalam mendapatkan pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi.

Kesadaran atas kondisi di atas, mengisyaratkan bahwa program PNPM juga hendaknya fokus pada penyiapan generasi berikutnya, melalui program PNPM GSC. Pendidikan anak usia sekolah ini perlu mendapatkan perhatian melalui pemberian beasiswa, dan pemeberian makanan tambahan yang sehat, sehingga tidak ada alasan bagi dirinya dan orang tuanya untuk *drop out*. Adanya generasi yang mempunyai

tingkat pendidikan lebih tinggi pada periode yang akan datang diharapkan sebagai potensi diri dalam menghadapi kehidupan sosial ekonomi.

Program PNPM diharapkan mampu mewujudkan aktivitas ekonomi produktif masyarakat, bukan sekedar menjadi buruh tani, tetapi kemampuan lain yang memberikan keberlangsungan pendapatan dan variasi ragam pembentuk aliran kas bagi keluarga. Responden di atas (Ski dan Knh) adalah contoh dua ibu rumah tangga yang berhasil membuat kegiatan ekonomi. Kedua ibu rumah tangga tersebut bergerak dalam membuat produk lanjutan dari hasil kebun, berupa minyak goreng, gula merah dan produk jajanan tradisional dengan bahan baku dari hasil produksi perkebunannya.

Contoh Perilaku perilaku produktif di atas sangat diperlukan, karena dapat memberikan nilai tambah atas hasil produksi perkebunan. Dalam perjalanan bisnis tersebut diharapkan kapasitasnya mengalami peningkatan, sehingga pengolahan lebih lanjut bukan hanya untuk hasil produksi perkebunan sendiri. Jenis industri rumah tangga ini pada dasarnya dapat dilakukan pada kapasitas yang besar, karena pasar masih sangat terbuka, baik dalam makna perilaku konsumen ataupun wilayah pemasaran. Dalam makna perilaku konsumen, bahwa konsumen mempunyai kecenderungan untuk mengkonsumsi produk yang terhindar dari pengawet dan zat kimia, sehingga jajanan tradisional yang dikemas dengan menarik akan mempunyai pasar tersendiri.

Keterampilan dalam melakukan kegiatan produksi, keterampilan dalam berbisnis serta menggali jiwa bisnis pada warga yang mendapatkan program PNPM menjadi kerja lanjutan dari pemerintah atau para fasilitator, jika waktu kerjanya masih ada di Kecamatan Kayangan. Hal penting yang ingin disampaikan adalah program

PNPM masih perlu dilanjutkan untuk wilayah Kecamatan Kayangan, sehingga bantuan sarana prasarana dan bantuan modal serta program GSC mempunyai makna terapan yang tinggi di masyarakat.

D. Pembahasan

Program PNPM telah dirumuskan dengan sistematika kerja yang jelas, menjadi anutan atau pedoman kerja semua pihak. Dalam penelitian ini menjadi anutan kerja pemerintah kecamatan, pemerintah desa, fasilitator dan masyarakat. Program PNPM dijalankan dengan konsep *bottom up*, seluruhnya telah dijalankan secara prakteknya.

Kebersamaan dalam menjalankan program PNPM antara masyarakat dan pemerintah diharapkan menjadi kunci kesuksesan untuk memunculkan pengenalan potensi diri dan lingkungan dalam penciptaan kegiatan ekonomi produktif. Dalam penelitian ini, fokus perhatian mulai dari perilaku produktif, dilanjutkan dengan adanya kegiatan yang nyata sebagai pembentuk aliran kas masuk, tentu juga konsep dalam menyiapkan masyarakat mengatasi faktor pencetus kemiskinan di saat ini dan kemudian hari. Berhubungan dengan hal terakhir ini, program diarahkan untuk menyiapkan masyarakat yang sehat dan cerdas, baik melalui penyiapan sarana prasarana, memperlancar kegiatan pembelajaran, aspek kesehatan dan pendidikan, bahkan pemberian keterampilan sesuai dengan usulan masyarakat.

Dana yang dialokasikan untuk Kecamatan Kayangan, khusus untuk membiayai perbaikan dan peningkatan kualitas sarana prasarana, seperti pasar, pendidikan, jalan raya, jembatan, perpipaan dan simpan pinjam perempuan pada

kurun waktu 2008-2011 dengan total sebesar Rp. 9.400.058.500. Dihubungkan dengan pembangunan sarana prasarana pada dasarnya sebagai wujud rendahnya kegiatan pembangunan di Kecamatan Kayangan, sehingga pilihan program masyarakat dalam pengentasan kemiskinan atau penciptaan kegiatan ekonomi produktif tidak langsung fokus pada sasaran, dalam makna peningkatan permodalan, keterampilan yang mendukung memunculkan kegiatan usaha dan jiwa usaha.

Masyarakat Kecamatan kayangan secara umum ada yang secara langsung mendapatkan program PNPM, baik dalam bentuk simpan pinjam ataupun bentuk program GSC, seperti beasiswa, honor GTT, bantuan ibu hamil dan Pemberian makanan tambahan bagi anak usia dini. Bagi masyarakat penerima PNPM di Kecamatan Kayangan seluruhnya memberikan persepsi positif, bahkan banyak masyarakat yang telah mampu menciptakan usaha, khususnya para perempuan yang sebelumnya hanya mengurus rumah tangga, memiliki perubahan perilaku yang positif berupa pelaku ekonomi aktif yang memberikan aliran kas masuk bagi keluarga.

Masyarakat lain yang tidak mendapatkan bantuan secara langsung dapat dinyatakan secara umum mendapatkan manfaat yaitu dengan mudahnya masyarakat melakukan mobilitas, baik menyangkut mobilitas kegiatan ekonomi ataupun kehidupan sosial lainnya. adak juga masyarakat yang menjadi responden belum dapat menemukan potensi diri dan lingkungan untuk menciptakan kegiatan ekonomi agar ada tambahan pendapatan atau jaminan kelancaran aliran kas bagi keluarga. Dalam hal ini, peran dari fasilitator sangat penting untuk melakukan pendekatan yang sifatnya langsung pada masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak secara langsung mendapatkan program PNPM.

Hasil kajian penting dalam penelitian ini adalah program PNPM masih perlu berlanjut di Kecamatan Kayangan, ditegaskan demikian karena keberadaannya hanya masih memposisikan wilayah terkait relatif setara dengan pembangunan pada kecamatan lain. Dapat dinyatakan sebagai wujud perhatian pemerintah dari tidak tersentuhnya Kecamatan kayangan dengan program pembangunan, terutama pembangunan fasilitas fisik (sarana prasarana). Kegiatan lanjutannya adalah bagaimana memelihara perilaku positif yang sudah muncul, sehingga keberadaan program PNPM yang sudah di selesaikan dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Informasi di atas bukan bersifat dualisme yang seolah membiaskan temuan sebelumnya, tetapi lebih sebagai kekhawatiran peneliti bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi bagi masyarakat yang baru mengenal belum mempunyai kemampuan, terutama pada jiwa produktif yang muncul dari perilaku produktifnya. Kegagalan atau hambatan dalam menjalankan kegiatan ekonominya dapat saja dengan cepat menyurutkan perjuangannya yang baru mulai. Sisi lain, masih ada masyarakat yang belum muncul perilaku produktifnya, terlebih kegiatan ekonomi aktual.

Pada periode lanjutan, fokus kerja fasilitator adalah membantu masyarakat dalam hal pengenalan kegiatan ekonomi produktif, kesadaran untuk lepas dari kehidupan kemiskinan dan lainnya. Program PNPM perlu disandingkan dengan program lain yang dijalankan pemerintah, misalnya kerja pelatihan dari Balai Latihan Kerja yang dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja atau dengan bantuan dari LIPI berupa kegiatan keterampilan praktek sesuai dengan potensi dan pasar yang ada.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan dan hasil kajian dari apa yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dijalankan di Kecamatan Kayangan merupakan upaya pemerintah dalam memberdayakan potensi dasar masyarakat melalui proses kerja yang cukup panjang, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pemeliharaan, dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari aparatur Kecamatan Kayangan, aparatur desa dan masyarakat serta personal khusus yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan dalam program tersebut.
2. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Kayangan dengan Masyarakat sebagai pemeran utama mendapatkan porsi yang cukup luas untuk mengusulkan kegiatan yang dianggap sebagai permasalahan yang menghambat kegiatan produktifnya, melaksanakan apa yang menjadi usulanya, dan memelihara apa yang sudah dilaksanakannya. Proses koordinasi kerja masyarakat dengan desa, desa dengan pihak Kecamatan terjadi dengan intensitas dan komunikasi yang tinggi, sehingga dapat ditegaskan aktualisasinya berjalan dengan baik.

3. Bentuk Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Kayangan terdiri atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) dan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM GSC), kedua bentuk program tersebut memusatkan konsentrasi pada pengadaan dan atau perbaikan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat, seperti jalan, jembatan, drainase, pembuatan gedung sekolah, pembangunan dam dll selain itu juga berkonsentrasi untuk membantu masyarakat agar tercipta generasi yang sehat dan cerdas, melalui kegiatan pemberian makanan tambahan, pemberian beasiswa pada siswa, pemberian insentif pada kader dan GTT, pemberian biaya pada ibu hamil, dan pembangunan pasilitas kesehatan lainnya berupa pos yandu.
4. Implementasi Program dan aktualisasi Program PNPM telah berjalan bersesuaian. Implikasinya dapat di tegaskan bahwa telah dapat membentuk perilaku produktif masyarakat, meskipun demikian diperlukan kerja lebih giat dari para pelaku pelaksana program PNPM untuk terus berupaya mewujudkan kegiatan ekonomi produktif dan sekaligus mempertahankan dan memelihara masyarakat yang telah memulai kegiatan ekonominya melalui pemafaatan program PNPM.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Kebijakan PNPM di Kecamatan Kayangan yang dimulai sejak tahun 2008 perlu ditindaklanjuti, sehingga kerja evaluasi dan pengarahannya, pemeliharaan-

dapat berlangsung secara terus menerus. Hal ini penting untuk menjaga perilaku produktif masyarakat yang telah mulai terbentuk, termasuk memberikan perhatian spesifik pada masyarakat yang belum menemukan bentuk perilaku produktifnya.

2. Kerja program PNPM di Kecamatan Kayangan perlu dilanjutkan dengan memberikan bantuan pelatihan untuk membangun, menambah keterampilan dan semangat dalam melakukan kegiatan produktif. Pemberian pelatihan dapat dilakukan dengan membangun kerjasama dengan pihak – pihak terkait, seperti dari BLK, LIPI dan lembaga lain yang memiliki perhatian pada pembentukan, pemberdayaan potensi masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Banoewidjoji, Moeliadi, 1983. *Pembangunan Pertanian. Usaha Nasional*. Surabaya.
- Chalid, Pheni, 2008. *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Gibson, L.J., Ivancevich, J.M., & Donnelly, JH., 1997, *Organisasi; Perilaku, Struktur, Proses*, Jilid 1, Penerjemah Adiarni, N., Binarupa Aksara. Jakarta.
- Hartowo, dkk., 2001. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES. Jakarta.
- Kismartini, dkk., 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Maleong J., & Lexy, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nasirin, Chairun, 2010. *Peran Strategis Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Nasution, S., 2000. *Metode Riset*, Jemmaras. Bandung.
- Nasution, E. Mustafa dan Usman Hardius,. 2008. *Proses Penelitian Kuantitatif*. FE UI. Jakarta.
- Nazir, Moh., 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prayitno, & Lincoln Arsyad, 1999, *Petani Desa dan Kemiskinan*. BPFE. Yogyakarta.
- Soetomo, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Spicker, Paul, 1995. *Social Policy: Themes and Approaches*. London:Prentice-Hall.
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Bisnis.*, CV. Alfabeta. Bandung.
- Surjadi, A., 1979. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Alumni. Bandung.
- Syafi'i, M., 2008. *Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Averroes Press. Malang.
- Syakrani, & Syahrani, 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Wahab, Solichin, A., 1994. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi*. Bumi Aksara. Jakarta.

Yustika, Ahmad. E., 2005, *Negara vs. Kaum Miskin*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Dokumen-Dokumen :

BAPPENAS, 1994. *Panduan Program IDT*. Jakarta.

BPS NTB. 2010. *NTB dalam Angka*. Mataram.

BPS NTB. 2009. *Berita Resmi Statistik*. No. 29/07/52/Th III, 1 JULI 2009.

Departemen Dalam Negeri, 2008, *Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Generasi Sehat dan Cerdas*. Jakarta.

Gustina, Indah, 2008. *Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Hak, Amiril, & Riany, Ria., 2007. *Kajian Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Lintas Departemen Periode Otonomi Daerah (Studi di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)*. Penelitian Hibah, Dikti, Mataram.

Kusmono, Ramly, 2008. *Kajian Dampak Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Jakarta.

Mubyarto, 2003, *Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*. UGM. Yogyakarta.

Mujahiddin, 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Produktif Tenaga Kerja Indonesia Kasus TKI Purna Tugas Malaysia di Kabupaten Lombok Barat*. Tesis. Program Migister Manajemen Universitas Mataram. Mataram.

PNPM NTB, 2011. *Laporan Kegiatan Program PNPM*. www.antaramataram.com, Maret, 2011.

_____, 2011. *Gubernur NTB Terima Penghargaan Pemberdayaan Masyarakat*. www.antaramataram.com, Maret, 2011.

Soemartono, Triyuni .2008. *Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali*. Desertasi PPs UNPAD Bandung.

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA.

Dengan hormat;

1. Kami mohon Bapak/Ibu/Saudara bersedia menjadi responden kami pada survei ini.
2. Tujuan Survei ini/penelitian adalah a). Memahami secara mendalam tentang pelaksanaan PNPM di Kecamatan Kayangan Kabupten Lombok Utara. b). Memahami dan menganalisis kebijakan normatip yang diterapkan PNPM di Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara. c). Memahami model – model dan motode kebijakan PNMP yang diterapkan di Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara. d). Memahami menganalisis dan menginterpretasi pemahaman masyarakat terhadap kebijakan PNMP di Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara.
3. Inpormasi dari Survei ini akan sangat bermanfaat untuk melengkapi data pada penelitian yang berjudul “ **Analisis Implementasi Kebijakan PNPM Dalam Membentuk Prilaku Produktif di Kecamatan Kayangan**”
4. Untuk menjaga Keakuratan data, kami mohon isian/jawaban Bapak/Ibu/Saudara dapat diberikan dengan sejujur-jujurnya, sesuai dengan kenyataan.
5. Atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu/Sdra kami menyampaikan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik Bapak/Ibu/Sdr..

Kayangan, 2011
Hormat kami,

Moh. Hakam Yamin

A. Responden : Aparatur pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1. Bagaimana kondisi wilayah kec. Kayangan di lihat dari potensi wilayahnya ?
2. Bagaimana pemerintah kecamatan dilibatkan dalam pemilihan Kecamatan Kayangan mendapatkan program PNPM ?
3. Apakah ada petugas khusus di Kecamatan Kayangan yang ikut terlibat dalam pengelolaan PNPM ?
4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apa kriteria penting yang dijadikan pemerintah (pengelola PNPM) menjadikan Kecamatan Kayangan sebagai penerima PNPM?
5. Apa saja bentuk Program PNPM yang masuk di Kecamatan Kayangan ?
6. Menurut Bapak/Ibu/sdr apakah program tersebut dapat memberdayakan masyarakat ?
7. Apa setiap desa di Kecamatan Kayangan mendapatkan program yang sama ?
8. Dari segi finansial berapa nilai dana yang bergulir dari program PNPM di Kecamatan Kayangan dan bagaimana komposisinya di setiap desa ?
9. Apakah menurut Bapak/Ibu/Sdr ada kegiatan ekonomi masyarakat yang bersifat nyata (kegiatan ekonomi produktif) dengan adanya program PNPM ?

B. Responden : Petugas PNPM.

1. Apa visi PNPM ?
2. Apa misi yang dijalankan dalam PNPM ?
3. Apa tujuan umum PNPM ?
4. Apa tujuan jangka pendek program PNPM ?
5. Apa ada beda Visi, Misi, Tujuan PNPM pada setiap Kecamatan ?
6. Apa rencana kerja yang diperuntukkan bagi Kecamatan Kayangan?
7. Apa bentuk program kerja PNPM di Kecamatan Kayangan -
8. Bagaimana program di atas dapat di wujudkan ?
10. Bagaimana menyusun anggaran PNPM di Kecamatan Kayangan ?
10. Bagaimana pilihan kegiatan PNPM di Kecamatan Kayangan ?
11. Bagaimana kerja aktual PNPM di Kecamatan Kayangan ?
12. Bagaimana implementasi PNPM di Kecamatan Kayangan ?
13. Apa hasil atau capaian kerjanya ?
14. Bagaimana Bapak/Ibu/Sdr lihat tentang proses pelaksanaan program PNPM di jalankan ?

15. Apa Bapak/Ibu/Sdr melihat kegiatan yang jalankan dapat menciptakan perubahan perilaku masyarakat kearah yang lebih baik atau produktif ?
16. Bagaimana kerja PNPM fokus pada penciptaan peluang bagi masyarakat ?
17. Bagaimana perilaku masyarakat dalam memanfaatkan program PNPM, terutama keluarga miskin ?
18. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah program PNPM di Kecamatan Kayangan mampu memberdayakan dan membentuk perilaku masyarakat terutama keluarga miskin ?

C. Responden : Aparatur Pemerintahan Desa.

1. Bagaimana pemerintah desa dilibatkan dalam pemilihan untuk mendapatkan program PNPM ?
2. Apakah ada personal/tenaga khusus di pemerintah desa yang ikut terlibat dalam pengelolaan PNPM ?
3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apa kriteria penting yang dijadikan pemerintah (pengelola PNPM) menjadikan desa ini sebagai penerima PNPM ?
4. Program PNPM apa saja yang masuk di desa ini?
5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah program tersebut dapat memberdayakan masyarakat di desa ini ?
6. Dari segi finansial berapa nilai dana yang disalurkan dari program PNPM di desa ini ?
7. Apakah ada kesesuaian antara program yang diinformasikan dalam PNPM dengan yang aktualisasi nyata di desa Bapak/Ibu/Sdr ?
8. Apakah ada kegiatan kelompok atau sejenisnya yang mengarah pada terciptanya usaha bagi masyarakat Bapak/Ibu/Sdr ?
9. Setelah adanya program PNPM di desa ini apakah masih ada atau tidak unsur produktif yang berpangku tangan (masih nganggur) ?
10. Apakah ada kegiatan ekonomi masyarakat yang bersifat nyata (kegiatan ekonomi produktif) dengan adanya program PNPM ?.
11. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Saudara saat ini terhadap pelaksanaan program PNPM di desa Bapak/Ibu/Saudara ?

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA.

Dengan hormat;

Kami mohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr bersedia menjadi responden dalam survei ini, adapun tujuan Survei/Penelitian ini adalah :

- a). Memahami secara mendalam tentang pelaksanaan PNPM di Kecamatan Kayangan Kabupten Lombok Utara.
- b). Memahami dan menganalisis kebijakan normatip yang diterapkan PNPM di Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara.
- c). Memahami model – model dan motode kebijakan PNMP yang diterapkan di Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara.
- d). Memahami menganalisis dan menginterpretasi pemahaman masyarakat terhadap kebijakan PNMP di Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara.

Informasi dari Survei/penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk melengkapi data pada penelitian yang berjudul “ **Analisis Implementasi Kebijakan PNPM Dalam Membentuk Prilaku Produktif di Kecamatan Kayangan**”.

Untuk menjaga Keakuratan data, kami mohon isian/jawaban Bapak/Ibu/Saudara dapat diberikan dengan sejujur-jujurnya, sesuai dengan kenyataan. Atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu/Sdr kami menyampaikan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik Bapak/Ibu/Saudara..

Kayangan, 2011
Hormat kami,

Moh. Hakam Yamin.

- a. Nama : _____
 b. Umur : _____
 c. Pendidikan : _____
 d. Alamat : _____

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr tahu/kenal mengenai PNPM di desa ini ? :

2. Apa yang Bapak/Ibu/Sdr ketahui tentang PNPM: -----

3. Apa yang Bapak/Ibu/Sdr terima dari program tersebut (PNPM) sekarang : -----

4. Apa Bapak/Ibu/Sdr pernah dikumpulkan atau didatangi petugas PNPM :

5. Jenis bantuan apa yang Bapak/Ibu/Sdr ikuti/dapatkan : -----

6. Apakah ada dana atau hal-hal lain yang Bapak/Ibu/Sdr harus kelola -----

7. Apakah ada perubahan di desa/kampung Bapak/Ibu/Sdr saat ini, : -----
 kalau ada perubahan apa yang dirasakan/dilihat sekarang ini: -----

8. Apakah perubahan itu dapat memberikan kemudahan bagi Bapak/Ibu/Sdr dalam malakukaan aktivitas sehari – hari ? :

9. Apakah dengan adanya perubahan itu Bapak/Ibu/Sdr merasakan semakin baik dalam melakukan aktivitas ? :

10. Apa perubahan / perbaikan yang Bapak/Ibu/Sdr rasakan setelah mendapatkan bantuan PNPM : -----

11. Apa pekerjaan Bapak/Ibu/Sdr sekarang : -----

12. Sejak kapan Bapak/Ibu/Sdr memulai pekerjaan itu : -----

13. Apa Bapak/Ibu/Sdr yakin akan dengan bantuan PNPM dapat mengubah kondisi /keadaan Bapak/Ibu/Sdr sekarang :

14. Dapatkah kegiatan Bapak/Ibu/Sdr akan lebih baik dari sekarang : -----

15. Adakah manfaatnya PNPM ini bagi Bapak/Ibu/Sdr dihubungkan dengan kerja Bapak/Ibu/Sdr :

16. Adakah ada manfaatnya PNPM ini bagi anak Bapak/Ibu/Sdr : -----
----- perubahan apa yang terlihat pada anak
Bapak /Ibu setelah mendapatkan Bantuan ?:

Terima kasih.

UNIVERSITAS TERBUKA

Matriks Hasil Wawancara

NO.	PERSONAL	INFORMASI
1.	Camat	Potensi SDA besar di Kecamatan Kayangan; SDM yang masih rendah
2.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Kunci: kemauan masyarakat untuk diubah perilakunya
3.	Sekcam	Ada indikasi dualisme pemikiran masyarakat atas setiap program
4.	Kasi PMD	Pelibatan semua pihak, bukan saja internal organisasi, tetapi antar organisasi; diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan
5.	Kasi Pembangunan	Pemerintah serius dalam mensejahterakan masyarakat
6.	Kasubag Keuangan	Dana yang mengalir besar, terjadi perubahan sarana dan prasarana
7.	Petugas PNPM-tingkat Kecamatan dan desa	Program PNPM dijalankan dengan prosedur yang telah ditetapkan, penggalian potensi dan penggalian informasi kebutuhan masyarakat. Kerja penyusunan kegiatan benar dari akar masalah
8.	Aparatur desa/delapan desa (kepala desa dan kaur)	Kerja yang sangat berat pada aparatur desa, semua terlibat. Kompleksitas kerja aparatur desa bertambah "perlu <i>reward</i> dari pemerintah atas program PNPM". Implementasi program PNPM sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena masyarakat yang mengusulkan. Ada implikasi nyata pada kegiatan ekonomi masyarakat dan perubahan perilaku
9.	Penerima PNPM MP dan GSC	Positif, ada kesadaran untuk berubah, ada yang telah teraktualisasi nyata.
10.	Masyarakat umum	Kegiatan ekonomi lebih mudah, muncul ide kegiatan usaha dan lainnya

Keterangan : informasi umum semata.

GAMBAR KEGIATAN PNPM KEC. KAYANGAN**1 .GAMBAR KEG . PNPM DI DESA SALUT.**

<p>Rapat persiapan PNPM Desa Salut</p> 	<p>Rapat pemebakalan Kader Pos Yandu PNPM GSC</p> 
<p>Pembagian Makanan tambahan Program PNPM GSC.</p> 	<p>Pembinaan penerima (SPP) PNPM –MP</p> 
<p>Pemasangan Pipa air Bersih PNPM MP.</p> 	<p>Pemasangan Talut PNPM MP.</p> 

2. GAMBAR KEG . PNPM DI DESA SELENGEN.

**Rapat persiapan PNPM
Desa Selengen**



**Pemberian Makanan Tambahan
PNPM GSC.**



Pembinaan Kader PNPM SC



**Pembinaan penerima PNPM – MP
(SPP)**



**Pembangunan POS Yandu PNPM-MP
(Gmbr. 1)**



**Pembangunan POS Yandu PNPM-MP
(Gmbr. 1)**



3. GAMBAR KEG . PNPM DI DESA KAYANGAN

<p>Musawarah PNPM tingkat Desa Kayangan</p> 	<p>Pemb.Gedung Posyandu PNPM-MP</p> 
<p>Prog.Penalutan PNPM-MP</p> 	<p>Pengarahan teknis ttng SPP PNPM-MP</p> 
<p>Pembukaan Jalan. PNPM-MP</p> 	<p>Pembuatan Saluran Air PNPM-MP</p> 

4. GAMBAR KEG . PNPM DI DESA DANGIANG

<p>Rapat PNPM Tingkat Desa</p> 	<p>Penalutan jalan PNPM-MP.</p> 
<p>Pemberian makanan tambahan PNPM-GSC</p> 	<p>Pengerasan dan pembukaan jalan PNPM - MP</p> 
<p>Pelatihan Kader PNPM-GSC</p> 	<p>Pelatihan Calon penerima (SPP) PNPM - MP</p> 

5. GAMBAR KEG . PNPM DI DESA GUMANTAR.**Rapat PNPM Tingkat Desa
Gumantar.****Pengarahan Calon penerima
(SPP) PNPM-MP****Pemberian bantuan Siswa
PNPM GSC.****Penalutan jalan
PNPM-MP****Pelatihan Kader
PNPM-GSC.****Pengerasan Jalan
PNPM-MP**

6. GAMBAR KEG . PNPM DI DESA SESAIT**Rapat Penjelasan Teknis PNPM
Tingkat Desa sesait.****Pemberian batuan Perengkapan
Sekolah Untuk Siswa (PNPM GSC)****Pemberian bantuan makanan
Tambahkan (PNPM GSC)****Pengerasan jalan
PNPM-MP****Pembangunan Jembatan
PNPM-MP****Penalutan dan irigasi
PNMP-MP**

7. GAMBAR KEG . PNPM DI DESA SANTONG**Pembangunan Madrasah
PNPM-MP (Gmbr.1)****Pembangunan Madrasah
PNPM-MP (Gmbr.2)****Penalutan irigasi airS
PNPM-MP****Pembukaan jalan
PNPM-MP****Pengerasan jalan
PNPM-MP****Rabat jalan
PNPM-MP**

8. GAMBAR KEG . PNPM DI DESA PENDUA.

<p>Rapat PNPM Tingkat desa</p> 	<p>Pengerasan jalan PNPM - MP</p> 
<p>Pembukaan Jalan Stapak PNPM - MP</p> 	<p>Perbaikan Saluran Irigasi PNPM - MP</p> 
<p>Pembuatan Jembatan Gmbr. 1 (PNPM – MP)</p> 	<p>Pembuatan Jembatan Gmbr. 2 (PNPM – MP)</p> 